

Akhir abad XIX sampai dengan pertengahan abad XX merupakan masa-masa yang penuh gejolak fisik di kawasan Asia Timur, Berbagai macam peristiwa terjadi berhubungan satu sama lain. Pada akhir abad ke-19 baik China maupun Korea mulai dikuasai oleh kekuatan-kekuatan asing, sementara Jepang sejak pertengahan kedua abad ke-19 mulai membangun dirinya untuk mencapai posisi yang sejajar dengan bangsa-bangsa Barat lainnya.

Kawasan Asia Timur memiliki perjalanan sejarah yang sangat dinamis. Persaingan kelompok komunis dan nasionalis China kembali berlangsung setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, demikian juga dengan Semenanjung Korea yang terpecah menjadi Korea Utara dan Selatan. Buku ini berisi informasi mengenai perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan Asia Timur setelah berakhirnya Perang Dunia II.

SEJARAH ASIA TIMUR BARU

RIRIN DARINI

SEJARAH ASIA TIMUR BARU

UNY PRESS

SEJARAH ASIA TIMUR BARU



UNY Press
Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281
Telp: 0274 - 589346
E-Mail: unypress.yogyakarta@gmail.com

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)



RIRIN DARINI

ISBN : 978-602-5566-57-8



9 786025 556657 8

SEJARAH ASIA TIMUR BARU

Ririn Darini

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SEJARAH ASIA TIMUR BARU

Ririn Darini



SEJARAH ASIA TIMUR BARU

Oleh: Ririn Darini

ISBN: 978 602 5566 57 8

Edisi Pertama

Diterbitkan dan dicetak oleh:

UNY Press

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY

Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp: 0274 - 589346

Mail: unypress.yogyakarta@gmail.com

© 2018 Ririn Darini

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Penyunting Bahasa: Shendy Amalia

Desain Sampul: Ngadimin

Tata Letak: Rizky Ariadi

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Ririn Darini

Sejarah Asia Timur Baru

-Ed.1, Cet.1.- Yogyakarta: UNY Press 2018

ix +157 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978 602 5566 57 8

1. Sejarah Asia Timur Baru

1.judul

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, dengan rahmat dan inayah-Nya, akhirnya penulisan buku sederhana yang berjudul Sejarah Asia Timur Baru dapat diselesaikan.

Asia Timur memiliki sejarah yang sangat panjang, sehingga buku ini dibatasi pembahasannya sejak awal abad ke-20 terutama sejak munculnya pergerakan dan lahirnya negara-negara di kawasan Asia Timur. Buku ini berisi informasi mengenai berbagai perkembangan yang terjadi baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, maupun budaya di kawasan Asia Timur setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Dalam penulisan buku ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih sangat jauh dari sempurna karena buku ini lebih banyak bersifat kompilasi dari berbagai tulisan mengenai Asia Timur. Namun demikian, penulis berharap bahwa buku ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I DARI PERGERAKAN DAN NASIONALISME HINGGA LAHIRNYA NEGARA-NEGARA DI ASIA TIMUR.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Jatuhnya Kekaisaran China dan Lahirnya RRC.....	3
C. Modernisasi, Imperialisme, dan Kekalahan Jepang	11
D. Lahirnya Dua Negara Korea	17
BAB II PERKEMBANGAN POLITIK DI CHINA.....	25
A. Pendahuluan	25
B. Masa Pemerintahan Mao Zedong	26
C. Masa Pemerintahan Deng Xiao Ping	37
D. Permasalahan Internal China	48
BAB III PERKEMBANGAN POLITIK JEPANG.....	55
A. Pendahuluan	55
B. Jepang Menyerah pada Sekutu.....	55
C. Perubahan Politik di Jepang.....	58
D. Perkembangan Sejak Tahun 1970	63

E. Politik Luar Negeri Jepang	64
BAB IV PERKEMBANGAN POLITIK KOREA.....	71
A. Pendahuluan	71
B. Dinamika Politik Korea Selatan.....	71
C. Dinamika Politik Korea Utara.....	79
D. Upaya Reunifikasi Korea.....	85
BAB V PERUBAHAN EKONOMI DI CHINA.....	91
A. Pendahuluan	91
B. Ekonomi China Era Mao Zedong.....	92
C. Kebijakan Ekonomi Deng Xiao Ping	101
BAB VI KEBANGKITAN EKONOMI JEPANG.....	109
A. Pendahuluan	109
B. Ekonomi Jepang Masa Pendudukan Sekutu (1945-1952)	110
C. Kebangkitan Ekonomi Jepang	116
D. Perkembangan Ekonomi.....	119
BAB VII PERKEMBANGAN EKONOMI KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN.....	123
A. Pendahuluan	123
B. Perkembangan Ekonomi Korea Utara.....	124
C. Perkembangan Ekonomi Korea Selatan.....	130
BAB VIII PERKEMBANGAN SOSIAL BUDAYA ASIA TIMUR.....	135

A. Pendahuluan	135
B. Dinamika Sosial Budaya China.....	135
C. Kehidupan Sosial Budaya Jepang	139
D. Kehidupan Sosial Budaya Korea	143
DAFTAR PUSTAKA.....	151
TENTANG PENULIS	157

BAB I

DARI PERGERAKAN DAN NASIONALISME HINGGA LAHIRNYA NEGARA-NEGARA DI ASIA TIMUR

A. Pendahuluan

Akhir abad XIX sampai dengan pertengahan abad XX merupakan masa-masa yang penuh gejolak fisik di kawasan Asia Timur. Berbagai macam peristiwa terjadi berhubungan satu sama lain. Pada akhir abad ke-19 baik China maupun Korea mulai dikuasai oleh kekuatan-kekuatan asing, sementara Jepang sejak pertengahan kedua abad ke-19 mulai membangun dirinya untuk mencapai posisi yang sejajar dengan bangsa-bangsa Barat lainnya. Sejak dibukanya secara paksa wilayah Jepang oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat, Jepang bertekad untuk menaklukkan bangsa Barat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasilnya dalam waktu yang relatif singkat Jepang berhasil menjadi negara industri yang maju dan sebagai akibat lanjutnya adalah Jepang menjadi negara imperialis.

Sebaliknya dengan China. Sejak kekalahan China dalam Perang Candu I melawan Inggris yang berakhir dengan disetujuinya perjanjian Nanjing, sebagian wilayahnya yaitu Hongkong menjadi kekuasaan Inggris dan dilaksanakannya penerapan hak

ekstrateritorial di China. Persetujuan Nanjing menyebabkan bangsa-bangsa asing lain tertarik untuk melakukan persetujuan dengan China sehingga lahirlah berbagai macam *unequal treaty* atau persetujuan yang tidak seimbang antara bangsa-bangsa Barat dengan China. Hal tersebut dapat diibaratkan bahwa sebenarnya secara tidak langsung China telah jatuh pada kekuasaan asing, karena mereka melaksanakan hak ekstrateritorial. Keadaan ini menyebabkan munculnya berbagai macam gerakan di China, dan puncaknya adalah Revolusi 1911 yang menyebabkan jatuhnya kekuasaan Kekaisaran China dan digantikan dengan pemerintahan Republik China. Namun gejolak politik masih terus berlangsung sampai kemudian berakhir dengan lahirnya Republik Rakyat China pada tahun 1949.

Sementara itu, wilayah Semenanjung Korea yang memiliki letak strategis menjadi wilayah yang sering diperebutkan oleh negara-negara besar yang menjadi tetangganya, yaitu Jepang, China, dan Rusia. Pada masa kuno Semenanjung Korea berfungsi sebagai jembatan budaya dari China ke Kepulauan Jepang. China pada saat itu merupakan induk kebudayaan di Asia Timur. Dalam perkembangannya wilayah Semenanjung ini merupakan jembatan bagi Jepang untuk memasuki dan menguasai wilayah China Utara, Manchuria, dan Provinsi Maritim Rusia di wilayah Siberia. Jepang secara resmi menganeksasi Korea pada tahun 1910. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II semenanjung Korea terlibat dalam konflik perang saudara yang berpuncak pada Perang Korea (1950-1953).

B. Jatuhnya Kekaisaran China dan Lahirnya RRC

Kehidupan politik di China merupakan produk dari masa revolusi yang panjang yang berlangsung paling tidak dari tahun 1911 sampai tahun 1949 dan meliputi tiga perombakan sistem politik secara kekerasan (James R. Townsend, 1997: 173). Revolusi pertama terjadi pada tahun 1911, menggantikan sistem kekaisaran yang telah berlangsung selama ribuan tahun dengan sistem pemerintahan republik. Revolusi kedua terjadi pada tahun 1928, ketika Kuomintang (KMT) berhasil membentuk dan menguasai pemerintahan baru menggantikan pemerintahan “panglima perang” (*warlord*) yang terpecah-pecah dalam masa permulaan pemerintahan Republik China dengan sistem dominasi satu partai yang terorganisir dan terpusat. Revolusi ketiga terjadi pada tahun 1949 dengan berdirinya Republik Rakyat China di bawah kekuasaan Partai Komunis China (Darini, 2010: 12).

1. Revolusi 1911

Ketidakpuasan bangsa China terhadap pemerintahan Dinasti Qing terus memuncak sejak kekalahan China dalam Perang Candu yang diakhiri dengan persetujuan Nanjing tahun 1842. Sejak itu banyak wilayah China yang menjadi wilayah pengaruh kekuasaan asing baik bangsa Eropa, Amerika maupun Jepang. Keadaan ini seolah-olah menimbulkan sistem negara dalam negara karena pengaruh asing yang ada di wilayah-wilayah China masing-masing memiliki hak konsesi dan hak ekstrateritorial. Secara politik dan ekonomi kehidupan bangsa China menjadi semakin terpinggirkan akibat ketidakmampuan pemerintah Manchu mengatasi masalah-masalah yang ada di China. Nasionalisme bangsa China bangkit. Akibatnya banyak bermunculan berbagai macam gerakan anti Manchu dan menggantikannya dengan kekuasaan dari bangsa China sendiri dan gerakan anti asing. Gerakan-gerakan tersebut antara lain

Pemberontakan Taiping (1848-1864), Peristiwa Tientsin (1870), Peristiwa Margary (1875), Pemberontakan Boxer atau Tinju Keadilan (1899-1901), dan Revolusi China (1911).

Di antara berbagai gerakan yang bermunculan di China, salah satu pimpinan yang terkemuka adalah Sun Yat Sen. Beliau merupakan tokoh nasionalis China yang dilahirkan di desa Xiangshanxian di Provinsi Guangdong pada tanggal 12 November 1866. Sun Yat Sen mendirikan organisasi Dongmenghui yang bertujuan untuk mengusir bangsa Manchu, merebut kembali China bagi bangsa Tionghoa, dan mendirikan suatu negara yang berbentuk republik.



Gambar 1.1 Sun Yat Sen

Sumber: http://french.china.org.cn/china/node_7126789.htm

Sistem kekaisaran di China berakhir setelah Sun Yat Sen mengobarkan revolusi pada tahun 1911 dan selanjutnya bercita-cita ingin menyatukan seluruh China dalam satu pemerintahan yang didasarkan pada *San Min Chu I* (Tiga Sendi Kedaulatan Rakyat), yaitu nasionalisme (*mintsu*), sosialisme (*ming tseng*), dan demokrasi (*min tsjuan*). Revolusi nasional di bawah pengaruh Sun Yat Sen meletus di Wuchang pada tanggal 11 Oktober 1911. Pada tanggal 12 Februari 1912 Kaisar Xuantong turun tahta setelah terjadinya Revolusi Xinhai. Sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 12 Maret 1912 berdirilah Republik China (ROC). Namun demikian kedudukan Sun Yat Sen sebagai presiden segera digantikan oleh Yuan Shih Kai, seorang *warlord* (panglima perang) yang sangat berpengaruh. Yuan segera mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, sementara Sun Yat Sen mengundurkan diri ke Kanton dan mendirikan Partai Kuomintang (Nasionalis).

Yuan Shih Kai berkuasa antara tahun 1911-1916. Pada tahun 1915 ketika bertemu dengan golongan oposisi yang mengambil bagian dalam Revolusi Republik, Yuan merasa bahwa ideologi republik lebih bertahan lama daripada ambisi pribadi. Ia meninggalkan republik dan mengumumkan restorasi Kekaisaran China dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Sang Kaisar. Akibatnya sebagian besar provinsi di China Selatan melepaskan diri dari kekuasaan Pemerintah Beijing. Setelah Yuan Shih Kai mengumumkan dirinya sebagai kaisar baru China terjadi revolusi terbuka yang dilancarkan di provinsi-provinsi China. Provinsi Yunnan menjadi propoins pertama yang melancarkan revolusi dan diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya.

Pada tahun 1916 Yuan Shih Kai wafat, dan meninggalkan kekacauan terutama di wilayah China Utara karena Yuan belum menunjuk seseorang untuk menggantikan dirinya. Akibatnya terjadi perpecahan di antara para panglima Tentara China Utara, dikenal

sebagai *warlord period*. Masing-masing memikirkan kepentingan pribadi dan membentuk kelompok-kelompok sendiri. Beberapa kelompok yang penting adalah kelompok Feng Tian di bawah pimpinan Zhang Zo Lin di Manchuria, Kelompok Zhi Li di Tian Jin di bawah pimpinan Zhao Kun dan di Provinsi Hunan di bawah pimpinan Wu Pei Hu, dan kelompok An Fu di bawah pimpinan Qi Rui.

2. Revolusi 1928

Yuan Shih Kai meninggal dunia dengan mewariskan kesimpangsiuran perundang-undangan dan angkatan bersenjata Tentara China Utara tanpa seorang panglima yang diakui sebagai pemimpinnya. Akibatnya era 1916-1928 di China dikenal sebagai periode *warlordisme* atau periode para jenderal perang. Selama masa ini para *warlord* saling berperang untuk mendapatkan pengaruh kekuasaan. Sementara itu di wilayah China Selatan Sun Yat Sen masih memiliki pengaruh yang besar. Ia diangkat sebagai kepala pergerakan republik dan menjabat sebagai ketua Kuomintang sampai tahun 1925 ketika beliau wafat. Selanjutnya Sun Yat Sen digantikan oleh Jenderal Chiang Kai Shek.

Selama masa pemerintahannya ini, pada tahun 1928 Chiang Kai Shek berhasil menaklukkan para *warlord* dan selanjutnya menyatukan China di bawah pemerintahan Kuomintang melalui Ekspedisi Utara pada tahun 1926-1928. Dalam upaya menaklukkan para *warlord* pasukan Kuomintang bekerja sama dengan Partai Komunis China.

Rencana operasi militer Ekspedisi Utara disusun oleh seorang penasihat militer Uni Soviet Jenderal Vaseli Blucher. Ekspedisi ini bertujuan untuk merebut dua kota besar yaitu Nanking dan Shanghai. Di samping kekuatan militer, Jenderal Blucher juga menggunakan para kader komunis. Mereka memulai gerakannya dengan memengaruhi serta menggalang kaum buruh dan tani

setempat untuk menjadi pendukungnya. Dalam waktu singkat berbagai kota besar di tepi Sungai Yang Tze berhasil direbut. Jenderal Blucher menduduki Han Gou dan Wu Han, diikuti golongan sayap kiri Kuomintang. Bahkan pada 1 Januari 1927 ibu kota nasionalis dipindah dari Kanton ke Wu Han.

Chiang Kai Shek juga berhasil merebut berbagai kota besar di sebelah timur, diantaranya Nanking, yang selanjutnya dijadikan markas besarnya. Sejak itu Nasionalis China seolah-olah mempunyai dua ibu kota yaitu Wu Han, yang didominasi sayap kiri, dan Nanking yang didominasi sayap kanan (Sukisman, 1992: 172).

Pada tanggal 10 Oktober 1928 Chiang Kai Shek diangkat menjadi Presiden Republik China di Nanking. Selanjutnya, Chiang mengorganisasikan angkatan perang yang disebut Tentara Revolusi Nasional.

3. Perang China - Jepang

Perang China Jepang II terjadi pada tahun 1937, merupakan perang besar antara China dan Jepang sebelum pecahnya Perang Dunia II. Sejak tahun 1932 wilayah Manchuria diduduki oleh tentara Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1936 Letnan Jenderal Hideki Tojo mendesak pemerintah Jepang untuk menguasai China dengan kekerasan senjata. Diawali dengan insiden di sekitar jembatan Marcopolo yang terletak di utara kota Beijing merambat menjadi serangan Jepang terhadap kubu-kubu pertahanan tentara China. Dilanjutkan dengan peristiwa penculikan Chiang Kai Shek di Xi An, sehingga memunculkan persatuan pemerintah Nasionalis dengan PKC dalam Front Persatuan Nasional untuk menghadapi agresi militer Jepang.

Pada Agustus 1937 Jepang memperluas peperangan dengan menciptakan bentrokan bersenjata di Shang Hai yang dijadikan sebagai alasan untuk mengerahkan angkatan lautnya untuk

menyelamatkan kepentingan Jepang di Shang Hai. Dalam waktu 3 minggu Shang Hai berhasil diduduki dan menyebut sengketyanya dengan China dengan sebutan “Peristiwa China”.

Pada 13 Desember 1937, Nanking, ibukota China jatuh ke tangan tentara Jepang, menandai kekalahan yang pahit bagi China. Selama delapan tahun Jepang menduduki Nanking dan membentuk sebuah pemerintah boneka yang terdiri dari kolaborator-kolaborator China, antara lain Wang Qing Wei yang kemudian diangkat sebagai Presiden Republik China tandingan dengan Nanking sebagai ibu kotanya. Negara boneka Manchuria masih dipertahankan dengan bekas Kaisar China, Puyi, sebagai presidennya. Manchuria merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Republik China di bawah pimpinan Wang Qing Wei.

Untuk menghadapi Jepang, PKC dan KMT berkolaborasi membentuk front persatuan. Namun dalam front tersebut Mao menolak berada di bawah pengaruh KMT dan menentang instruksi dari Komintern. Selama aliansi pada tahun 1937 sampai 1945 Mao tetap mengontrol Tentara Merah dan daerah-daerah yang sudah dibebaskan. Penduduk yang di bawah komando Tentara Merah meningkat dari 2 juta menjadi 95 juta, begitu juga dengan pasukan merah jumlahnya meningkat dari 30.000 menjadi hampir satu juta jiwa. Saat awal aliansi dengan KMT, PKC memanfaatkan kesempatan untuk beroperasi di kota-kota dan banyak aktivis PKC yang mendekam dalam penjara dibebaskan.

4. Revolusi 1949

Setelah perang China - Jepang berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, pertikaian antara PKC dengan Kuomintang kembali memanas. Setelah kekalahan Jepang, pemerintah Republik China segera menginstruksikan

kepada segenap jajarannya untuk mengambil alih kedudukan tentara Jepang di seluruh pelosok wilayah China. Sementara Zhu Te, Panglima Angkatan Bersenjata PKC mengeluarkan perintah agar sebagian Tentara Merah memasuki Manchuria dan menuntut pada pemerintah China supaya perlucutan senjata terhadap bekas tentara pendudukan tentara Jepang di daerah yang dikuasai Partai komunis supaya dilakukan unsur Partai Komunis.

Ketika itu Tentara Merah menguasai daerah pedusunan yang amat luas sehingga menimbulkan kekhawatiran pihak Pemerintah China. Oleh karena itu Pemerintah China meminta bantuan AS untuk membantu menyelesaikan masalahnya di China. Presiden Truman berusaha menghindarkan perang saudara di China dengan mengutus Jenderal George Marshall untuk bertindak sebagai perantara bagi sengketa antara Pemerintah Nasionalis dengan Partai Komunis China. Salah satu yang direncanakan adalah pelaksanaan peleburan tentara kedua belah pihak menjadi satu Tentara Nasional. Namun sepeninggal Marshall pertempuran antara Pemerintah Nasionalis dengan PKC kembali terjadi dengan skala yang semakin meluas. Upaya perdamaian kembali dilakukan oleh Marshall tetapi gagal.

Meski awalnya banyak mengalami kekalahan tetapi Tentara Merah semakin dapat memperluas pengaruhnya di daerah pedesaan, melalui politik *land reform* dari PKC. Tanah-tanah milik tuan tanah diambil dan menghadiahkan tanah-tanah garapan tersebut kepada kaum tani penggarap. Tentara Merah yang menguasai wilayah China Utara segera mengarahkan sasarannya ke sebelah selatan Sungai Yang Tze. Selanjutnya mereka merebut Nanking, ibu kota pemerintah Nasionalis China. Akibatnya pemerintah Nasionalis China terpaksa harus memindahkan ibu kotanya ke Kanton. Selanjutnya Hangou, Shanghai dan Qingdao secara berturut-turut jatuh ke tangan kaum komunis.

Setelah separo wilayah China berada di tangan kaum komunis maka Mao Zedong mulai mempersiapkan pembentukan suatu Negara China sebagaimana dicita-citakan oleh Partai Komunis. Langkah awal adalah dengan membentuk Panitia Persiapan Majelis Permusyawaratan Politik. Panitia ini berhasil memilih 21 orang untuk menjabat sebagai Dewan Harian dengan Mao Zedong sebagai ketua dan Chou Enlai sebagai wakil ketua.

Dengan strategi “desa mengepung kota”, PKC berhasil menyingkirkan Kuomintang dan pada tanggal 1 Oktober 1949 memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China (RRC) yang beribukota di Beijing. Bendera Nasional RRC berwarna merah melambangkan revolusi dengan empat bintang kecil-kecil berwarna kuning di bagian pojok atas yang masing-masing melambangkan kelas buruh, kelas tani, kelas borjuis kecil, kelas borjuis nasional, dan sebuah bintang besar berwarna kuning yang dilingkari empat bintang kecil tersebut di atas, yang melambangkan kepemimpinan Partai Komunis. Pemimpin tertinggi tentara RRC berada di tangan Zhu De, sedangkan jabatan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dipegang oleh Chou Enlai.

Pada tanggal 14 Oktober Kanton berhasil dikuasai Tentara Merah, sehingga pemerintah nasionalis terpaksa pindah ke Chongqing. Namun pada tanggal 28 November 1949 Chongqing juga jatuh ke tangan Tentara Merah. Selanjutnya Provinsi Yunnan dan Hainan berhasil dikuasai komunis, sehingga pemerintah nasionalis tidak memiliki wilayah lagi di China daratan. Pemerintahan Chiang Kai Shek melarikan diri ke Taipei yang terletak di Pulau Formosa (Taiwan). Pada tanggal 1 Maret 1950, Chiang memangku kembali jabatannya sebagai presiden Republik China.

Setelah pernyataan berdirinya Republik Rakyat China, Uni Soviet segera memberikan pengakuan kedaulatannya atas RRC dan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan pemerintahan

Nasionalis China. Negara-negara satelit Uni Soviet ikut menyatakan pengakuan kedaulatan bagi RRC. India merupakan Negara di luar blok Soviet yang pertama kali memberikan pernyataan kedaulatan atas RRC, tepatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Pada tanggal 6 Januari 1950 Inggris menyatakan pengakuan kedaulatan terhadap RRC sehingga Inggris merupakan negara demokratis Barat pertama yang mengadakan hubungan dengan pemerintahan komunis China.

C.

Modernisasi, Imperialisme, dan Kekalahan Jepang

Ketika negara-negara di Asia Timur lainnya masih dalam cengkeraman bangsa asing, Jepang telah menjadi negara dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat cepat. Hal ini merupakan akibat dari Restorasi Meiji. Restorasi Meiji menyebabkan perubahan besar dalam sistem politik Jepang sehingga masyarakat Jepang bersentuhan dengan peradaban Barat modern.

Proses modernisasi Jepang dimulai dengan dibukanya politik isolasi Jepang secara paksa oleh Komodor Matthew Perry dari Amerika pada tahun 1854. Masuknya bangsa Barat yang memaksakan hak ekstrateritorialnya dianggap sebagai kegagalan Shogun Tokugawa dalam melindungi Jepang. Daimyo Satsuma dan Chosu berupaya menjatuhkan Shogun Tokugawa dengan alasan untuk mengembalikan kekuasaan kaisar. Mereka memiliki semboyan *sonno joi* yang artinya hormati kaisar dan usir kaum barbar.

Namun demikian Bangsa Jepang menyadari bahwa Jepang harus mencapai tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama dengan bangsa Barat agar terbebas dari ancaman Barat. Penolakan terhadap ancaman bangsa Barat dilakukan dengan pembaharuan, dan semangat nasionalisme bangsa Jepang semakin kuat. Oleh karena itu, mereka juga mengeluarkan slogan *fukoku kyohei* yang berarti negara sejahtera dan tentara kuat. Pemerintah melakukan

pembaharuan di segala bidang kehidupan secara besar-besaran dengan mencontoh Barat. Modernisasi Jepang diawali dengan Sumpah Kaisar (*Charter Oath*) yang mencakup 5 hal, yaitu:

1. Suatu majelis harus diadakan secara luas, semua undang-undang harus diputuskan melalui diskusi terbuka.
2. Tinggi dan rendah harus bersatu dalam pikiran, dan keuangan serta ekonomi nasional harus diperkuat.
3. Pejabat-pejabat sipil, militer, dan juga rakyat biasa harus mencapai aspirasi-aspirasi mereka sehingga tidak mengecewakan rakyat.
4. Kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu harus dilarang, dan tindakan-tindakan harus didasarkan pada aturan internasional.
5. Pengetahuan harus dicari di seluruh dunia, dan landasan kekuasaan kekaisaran harus diperkuat.

Selanjutnya, untuk mewujudkan hal tersebut, kemudian beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah selama Restorasi Meiji adalah :

1. Menghapuskan stratifikasi sosial yang tajam yaitu dengan menghapus golongan samurai. Akibatnya, golongan samurai sebagai golongan yang eksklusif mulai membaaur dengan golongan lain di bidang pertanian, perindustrian atau pertukangan, dan perdagangan yang tadinya dianggap rendah oleh samurai.
2. Melakukan sentralisasi dan unifikasi dalam bidang pemerintahan. Sistem pemerintahan feodal militeris diganti dengan sistem pemerintahan monarki. Lembaga pemerintahan banyak meniru sistem Barat dengan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi Jepang.
3. Mewajibkan pendidikan bagi seluruh rakyat Jepang dan membuka berbagai macam dan tingkat sekolah. Setiap warga

negara diharuskan menuntut ilmu baik di dalam maupun di luar negeri. Pendidikan ini nantinya berpengaruh besar dalam menjadikan Jepang sebagai bangsa yang modern dan kuat dalam bidang ekonomi.

4. Lebih berorientasi kepada kekuatan sendiri daripada bantuan luar negeri. Melalui ekonomi berdikari, Jepang berupaya melakukan alih teknologi misalnya dengan mengimpor mesin-mesin, mempelajari cara menjalankan, memelihara, memperbaiki, membongkar, dan menirunya.
5. Memberlakukan wajib militer melalui undang-undang 1872. Pertahanan negara merupakan kewajiban seluruh rakyat, bukan lagi menjadi kewajiban kaum samurai semata. Di samping itu Jepang meniru Prusia dalam kemiliteran karena keberhasilan negara tersebut dalam perang di daratan Eropa, sedangkan untuk Angkatan Lautnya Jepang meniru keberhasilan Inggris.
6. Melakukan perubahan dalam sistem perpajakan. Sebelumnya sumber pemasukan pajak tidak stabil karena tergantung hasil panen. Pada masa Meiji pajak ditetapkan untuk masa 6 tahun yang harus dibayar dengan uang tunai, sebesar 3% dari nilai tanah. Melalui pemasukan yang stabil pemerintah dapat melakukan pembangunan industri dan militer.

Berbagai macam pembaharuan yang dilakukan oleh Jepang menyebabkan munculnya Jepang sebagai sebuah negara yang maju di Asia. Hal lainnya adalah semangat nasionalisme Jepang telah berubah menjadi ultranasionalisme. Namun demikian kemajuan yang dicapai Jepang ternyata menimbulkan dampak negatif bagi Jepang. Di satu sisi Jepang muncul sebagai negara industri, tetapi di sisi lain sumber daya alamnya sangat terbatas sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi keberlangsungan proses industri di

Jepang. Selain itu hasil industri yang melimpah tidak dapat dipasarkan seluruhnya di wilayah Jepang. Terdapat surplus hasil industri yang harus dipasarkan ke negara lain.

Permasalahan lain yang muncul adalah meningkatnya populasi penduduk di Jepang hingga tiga kali lipat sebagai akibat semakin membaiknya sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Angka kelahiran meningkat dan angka kematian menurun, serta usia harapan hidup masyarakat yang semakin tinggi. Sementara itu wilayah Jepang yang sempit tidak dapat menampung jumlah penduduk yang padat. Oleh karena itu Jepang juga membutuhkan wilayah lain untuk menampung pertambahan penduduknya.

Permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat modernisasi Jepang tersebut mendapat solusi dari pihak militer yang dominan posisinya di Jepang. Mereka mengusulkan untuk melakukan penguasaan wilayah bangsa lain sekaligus untuk mencoba kemampuan militer Jepang yang telah dimodernisasi. Meskipun pada awalnya usulan tersebut ditolak oleh kaum politikus Jepang tetapi pada akhirnya diterima juga. Tujuan imperialisme Jepang adalah merebut daerah-daerah di sekitar Jepang untuk dijadikan sebagai wilayah kolonisasi penduduk Jepang, mendapatkan bahan baku industri dan sebagai daerah pemasaran hasil industri Jepang.

Usaha imperialisme Jepang dimulai pada tahun 1871 ketika Jepang mencoba mengadakan persetujuan dengan China agar China memberikan perlakuan kepada Jepang sebagai the *most favored-nation* seperti kepada bangsa-bangsa Barat. Pada 31 Juli 1874 China mengumumkan pernyataan perang secara resmi kepada Jepang. Peperangan berlangsung di daratan Korea, Manchuria, dan di lautan. Perang China-Jepang I berakhir pada 17 April 1895 dengan ditandatanganinya persetujuan Shimonoseki. Isi persetujuan tersebut adalah:

1. China harus mengakui kemerdekaan Korea secara penuh.
2. China harus menyerahkan Semenanjung Liaotung, Taiwan, dan Penghu kepada Jepang.
3. China harus membayar ganti rugi perang.
4. China harus memperbolehkan kapal-kapal Jepang berlayar di Sungai Yangtse sampai Chungkiang.

Kemenangan militer Jepang tersebut tidak berlangsung lama karena kekalahannya dalam politik. Rusia, dengan dukungan dari Prancis dan Jerman, memaksa Jepang mundur dari Liaotung. Hal ini semakin memperuncing permusuhan Jepang dengan Rusia, terutama dalam memperebutkan pengaruh Korea dan Manchuria. Pada 30 Januari 1902 Jepang membuat perjanjian persekutuan dengan Inggris yang berlaku selama lima tahun. Isinya sebagai berikut:

1. China dan Korea dijamin kemerdekaannya.
2. Kepentingan Jepang di Korea diakui dan dihormati.
3. Jika salah satu dari negara persekutuan itu berperang maka negara yang lainnya akan bersikap netral, tetapi apabila berperang melawan dua negara maka negara yang satunya akan turut dan bersama-sama membuat perdamaian.

Atas desakan Jepang, Inggris, dan Amerika, pada 8 April 1902 Rusia menandatangani persetujuan dengan China mengenai pengosongan Manchuria. Namun Rusia tidak melaksanakan persetujuan tersebut dan justru melakukan politik agresif serta membangun jalan-jalan kereta api untuk kepentingan perang Tsar Nicolas II (1894-1917). Akhirnya pada bulan Februari 1904 pecah perang Rusia – Jepang. Berbagai kemenangan dicapai oleh Jepang dalam perang tersebut. Port Arthur, Dalay, wilayah Sungai Yalu dan Mukden berhasil dikuasai Jepang sehingga kekuatan pertahanan

Rusia di Manchuria melemah. Perang Rusia Jepang berakhir dengan persetujuan Portsmouth (New Hampshire) pada 5 September 1905 melalui perantaraan Presiden AS Theodore Roosevelt. Isi persetujuan tersebut sebagai berikut:

1. Rusia mengakui dan menghormati kepentingan istimewa Jepang di Korea.
2. Hak-hak Rusia di Semenanjung Liaotung diserahkan kepada Jepang.
3. Jepang memperoleh Sachalin Selatan (Karafuto) dan Kepulauan Kurile.
4. Pasukan-pasukan kedua negeri tersebut harus mundur dari Manchuria.
5. Jepang mendapat konsesi dari bagian selatan jalan-jalan kereta api di Manchuria untuk tujuan militer.

Dengan kemenangan Jepang atas Rusia ini maka Jepang telah menjadi negara kelas I di Asia Timur. Kemenangan ini juga membuktikan kemajuan besar Jepang dalam membentuk kekuatan militer yang setaraf dengan Bangsa Eropa. Peranan Jepang dalam arena internasional semakin kuat dan Jepang menjadi semakin ambisius mengejar kepentingan nasionalnya. Pada tahun 1910 Jepang secara resmi menganeksasi Korea sebagai bagian dari wilayah Kekaisaran Jepang.

Usaha berikutnya dari Jepang di bawah Perdana Menteri Tanaka adalah mewujudkan Jepang sebagai pemimpin bangsa-bangsa di Asia Timur dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur. Pada tahun 1931 Jepang menyerbu dan menduduki Manchuria. LBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan agar Jepang segera menarik mundur pasukannya. Namun Jepang justru mengangkat Henry Puyi, bekas Kaisar Hsuan Tung di China, sebagai Presiden Manchuria pada 9 Maret 1932. Pada Maret 1933 Jepang memutuskan keluar dari LBB. Selanjutnya pada 1 Maret 1934 Puyi

dinobatkan sebagai Kaisar Manchuria. Jepang menjadikan Manchukuo sebagai pangkalan angkatan perangnya di daratan Asia. Selanjutnya Jepang terus melakukan ekspansinya ke Mongolia Dalam dan memasuki wilayah China, yaitu Hopei, Shansi, dan Shantung. Melalui insiden Jembatan Marcopolo Jepang melancarkan serbuan ke China pada 1937, sering disebut sebagai Perang China-Jepang II (1937-1945). Di daerah-daerah yang berhasil dikuasainya Jepang membentuk negara-negara boneka.

Hubungan Jepang dengan Inggris dan AS juga semakin memburuk sejak pertengahan 1938. Semakin menguatnya Nazi Jerman di Eropa semakin memperburuk keadaan. Perang China-Jepang selanjutnya masuk kedalam kancah perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Kepulauan Hawaii merupakan basis pertahanan sekaligus sebagai pangkalan untuk mengawasi kepentingan Amerika Serikat di Asia dan Pasifik. Perang Pasifik dimulai ketika Jepang melakukan pengeboman pada pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbour pada 7 Desember 1941. Dalam waktu relatif singkat Jepang berhasil menguasai Filipina, Malaya, Singapura, dan Hindia Belanda. Namun demikian dengan terjadinya peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagaasaki oleh pihak sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kekuatan Jepang menjadi lumpuh dan akhirnya menyerah pada sekutu pada 15 Agustus 1945.

D. Lahirnya Dua Negara Korea

Sejak tahun 1910, Jepang telah menguasai wilayah Semenanjung Korea. Selama 35 tahun Korea berada di bawah kekuasaan Jepang, dan berbagai gerakan nasional di Korea muncul untuk mengusir Jepang. Kaum nasionalis Korea baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri sangat terpengaruh oleh ajaran Woodrow Wilson bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Puncak pergerakan nasional di Korea terjadi pada

tanggal 1 Maret 1919 yang berupa gerakan unjuk rasa besar-besaran yang menunjukkan sikap anti Jepang. Sebanyak 33 orang wakil rakyat Korea menandatangani deklarasi kemerdekaan yang telah disusun sebelumnya, dan dicetak untuk disebarluaskan secara nasional. Mereka juga mengirimkan nota kepada pemerintah Jepang untuk menuntut ditegakkannya kembali kedaulatan Korea. Pemimpin Korea juga mendirikan pemerintahan pengasingan di Shanghai China. Namun gerakan-gerakan ini berhasil ditindas oleh pemerintah Jepang.

Menyerahnya Jepang pada 15 Agustus 1945 mengakhiri PD II dan era pemerintahan Kolonial Jepang di Korea. Sejak saat itu Korea menjadi wilayah pendudukan sekutu, yaitu AS dan Uni Soviet dan bahkan dalam perkembangan selanjutnya Korea terpecah menjadi negara Korea Utara dan Korea Selatan. Pada dasarnya terpecahnya Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan merupakan akibat dari perang dingin pasca PD II.

Lahirnya dua negara tersebut bermula dari diumumkannya perang terhadap Jepang dan masuknya pasukan Soviet ke Korea pada 8 Agustus 1945. Amerika memperkirakan bahwa pasukan Soviet akan segera menduduki seluruh wilayah Semenanjung Korea, terlebih Jepang menyerah lebih awal. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dikuasainya Korea oleh Soviet maka Amerika mengusulkan kepada Soviet untuk membagi Korea dalam dua zona operasi militer sepanjang garis 38 derajat LU (Steinberg, 1989: 48). Usulan tersebut diterima oleh Stalin dan Korea dibagi dalam dua zona militer yang bersifat 'temporer'.

Sementara itu di pihak Korea sendiri, Yo Un-hyong seorang nasionalis moderat sayap kiri membentuk badan politik Korea yang bertugas membuat peraturan dan UU setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Pada 15 Agustus 1945 dibentuk Komite Persiapan Kemerdekaan Korea. Banyak pemimpin nasionalis Korea yang

mencemaskan keputusan sekutu untuk membagi Korea dalam dua zona pendudukan militer. Mereka membentuk pemerintahan Korea sebelum datangnya pasukan AS. Pada 6 September 1945 didirikan Republik Rakyat Korea dengan Syngman Rhee sebagai presiden dan Yo Un-hyong sebagai wakilnya. Menteri kabinetnya terdiri dari kaum nasionalis, sosialis, dan komunis.

Sejak 15 Agustus 1945, wilayah utara telah diduduki oleh pasukan Soviet di bawah Kolonel Jenderal Ivan M. Christyalov yang datang bersama 300 orang komunis Korea yang telah dilatih di Soviet di bawah pimpinan Kim Il-sung. Otoritas Soviet mengakui legitimasi Republik Rakyat Korea dan memberi otoritas kepada Komite Rakyat Korea Utara agar berfungsi sebagai pemerintah regional Korea Utara dan memerintah Korut tanpa pemerintahan militernya sendiri. Dengan dukungan Soviet, Kim Il-sung memperlemah kekuasaan kaum nasionalis. Kekuatan komunis semakin bertambah dengan datangnya 22.200 komunis Korea dari China Barat Laut.

Sementara itu pasukan Amerika Serikat menduduki wilayah selatan di bawah John R. Hodge. Pihak AS tidak mengakui legitimasi pemerintahan Republik Rakyat Korea dan bersama-sama dengan Soviet, Inggris, dan China menyetujui dibentuknya pemerintahan baru Korea di bawah perwalian sekutu selama 5 tahun sehingga menimbulkan kekecewaan rakyat Korea. Dalam pelaksanaannya AS dan Uni Soviet yang telah menduduki Korea menolak kehadiran Inggris dan China. Di pihak lain terdapat gerakan anti perwalian dari rakyat Korea. Untuk mengatasi gerakan anti perwalian, Hodge membentuk Dewan Penasehat Korea yang diketuai oleh Syngman Rhee, tetapi usaha ini gagal karena kebijakan anti perwalian Rhee sangat kuat (Andrew C. Nahm, 1993: 228).

Kegagalan pembentukan pemerintahan perwalian menyebabkan campur tangan PBB yang memutuskan untuk

membentuk Komisi Sementara PBB untuk Korea dan menyarankan selambat-lambatnya tanggal 13 Maret 1948 diadakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat Korea. Tugas komisi PBB tersebut adalah mengadakan pengawasan keberlangsungan pemilihan umum, mengadakan pembicaraan dengan para wakil rakyat hasil pemilu untuk merundingkan masalah kemerdekaan Korea. Setelah wakil rakyat terpilih rencana selanjutnya adalah membentuk Dewan Nasional dan mendirikan pemerintahan Korea yang merdeka. Setelah itu pasukan pendudukan akan ditarik mundur dari Korea. Pada dasarnya rencana tersebut mewakili kepentingan AS. Rencana tersebut ditolak oleh Uni Soviet yang mengusulkan untuk menarik pasukan asing terlebih dahulu baru dibentuk pemerintahan Korea.

Perundingan tidak memperoleh titik temu. Korea mempunyai arti yang sangat penting bagi kedua negara tersebut, terlebih dengan perbedaan ideologi yang sangat jelas. Letak Semenanjung Korea terbilang strategis di kawasan Pasifik dengan sumber daya alam yang cukup kaya. Perdebatan mengenai pembentukan pemerintahan Korea berlangsung lebih dari satu setengah tahun. Selama masa tersebut, baik AS maupun Uni Soviet terus memantapkan politik dan ideologi masing-masing kepada rakyat Korea. Amerika Serikat membangun Korea Selatan secara besar-besaran. Prioritas utamanya adalah mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di Korea Selatan dan menghapuskan komunisme di Korea Selatan. Amerika Serikat berusaha membuat Korea Selatan tergantung kepada AS terutama dalam pertahanan keamanan. Sebaliknya di Korea Utara ideologi komunis diindoktrinasi secara intensif, tujuannya untuk mempersenjatai pemuda dengan ideologi komunis. Mereka juga dilatih kemiliteran, sehingga memiliki kekuatan pertahanan keamanan secara mandiri.

Dengan demikian perbedaan antara Korea Utara dan Korea Selatan semakin tajam.

Pada 26 Agustus 1947 AS dan Uni Soviet menyerahkan kembali mandatnya ke PBB. Pada September 1947 PBB mendesak kedua negara untuk melaksanakan pemilihan umum. Pada 10 maret 1948 diadakan pemilihan umum di wilayah selatan yang diawasi secara langsung oleh PBB. Pada 15 Agustus 1948 AS membentuk Republik Korea dengan Syngman Rhee sebagai presidennya. Wilayah kekuasaannya ditetapkan seluruh Semenanjung Korea. Sementara itu di wilayah utara PBB tidak diijinkan masuk. Pada 9 September 1948 Uni Soviet membentuk Republik Demokratik Rakyat Korea dengan Kim Il-sung sebagai presidennya dengan wilayah seluruh semenanjung Korea. Negara baru ini mendapat pengakuan dari Uni Soviet, China, dan negara-negara Eropa Timur. Pada Desember 1948 PBB mengesahkan hasil pemilu di Korsel dan menyatakan pemerintahan Korsel sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah.

Setelah pemerintahan dua negara terbentuk Uni Soviet menarik pasukannya dari Korea dan pada Januari 1950 AS mengumumkan bahwa wilayah Korea berada di luar pengawasan militernya. Hal ini segera dimanfaatkan Korea Utara melakukan serangan militer ke Korea Selatan secara tiba-tiba pada tanggal 25 Juni 1950. Kota Cuchon, Ongjin, dan Kaesong berhasil dikuasai Korut, dan pada hari ketiga Seoul jatuh ke tangan Korea Utara sehingga Presiden Rhee berserta stafnya meninggalkan Seoul pindah ke Taejon.

Dengan alasan membendung komunisme di Asia (*containment policy*) dan sebagai tanggapan agresi Korea Utara, maka Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang isinya mendesak Korea Utara agar menghentikan perang dan menarik mundur pasukannya pada garis batas 38 derajat LU dan

memberikan sanksi kepada Korea Utara apabila Korea Utara tidak menghiraukan desakan tersebut. PBB mencap Korea Utara sebagai agresor dan mengirimkan bantuan pasukan dari 16 negara untuk menghadapi Korea Selatan. Campur tangan PBB dalam perang saudara tersebut menyebabkan China ikut ambil bagian membantu Korea Utara. Campur tangan dari pihak-pihak luar tersebut justru menjadikan perang dan permasalahan di Korea semakin menjadi-jadi.

Sekjen PBB Trygve Lie mengusulkan perundingan untuk mencegah perang semakin meluas. Berbagai macam perundingan dilangsungkan antara lain:

1. Perundingan Kaesong (10 Juli – 22 Agustus 1951), perundingan ini menghasilkan keputusan:
 - a. Penerimaan agenda perundingan.
 - b. Penentuan garis demarkasi militer antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk membentuk daerah bebas militer sebagai persyaratan menghentikan perundingan.
 - c. Usulan kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Korea tahap berikutnya.

Perundingan ini gagal karena tidak tercapai kesepakatan mengenai garis demarkasi.

2. Perundingan Panmunjom (25 Oktober – 27 Juni 1953)
Perundingan ini membahas masalah garis demarkasi. Pihak utara mengusulkan garis demarkasi selebar 2 mil. Usulan tersebut akhirnya disetujui oleh pihak Korea Selatan.



Gambar 1.2 Demilitarized Zone

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Military_Demarcation_Line

Setelah perang yang berlangsung selama 3 tahun kedua Korea akhirnya setuju untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953. Garis demarkasi militer disepakati memanjang dari muara Sungai Han beberapa mil sebelah barat daya Panmunjom dan melintas garis 38 derajat LU membelok ke barat di semenanjung selatan Kumsong dan berakhir di sebelah utara Kaesong. Garis ini dikenal sebagai Zona Demiliterisasi (DMZ). Setelah persetujuan ini sistem pembagian atas Korea semakin diperkukuh. Penderitaan rakyat Korea selain dari segi materiil juga mengalami penderitaan batin karena jutaan jiwa menjadi korban dan hampir separuh rakyat Korea harus hidup terpisah dari sanak saudaranya (Mohtar Mas'oe'd dan Yang Seung-yoon, 2005: 238).

BAB II

PERKEMBANGAN POLITIK DI CHINA

A. Pendahuluan

Setelah melalui proses perang saudara yang sangat panjang, akhirnya pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong berhasil menyatukan bangsa China dan memproklamkan berdirinya negara Republik Rakyat China (RRC). Chiang Kai Shek sebagai pemimpin dari partai Nasionalis (Kuomintang) yang terdesak melarikan diri ke Formosa (Taiwan) dan mendirikan pemerintahan Republik China di Formosa dengan dukungan Amerika Serikat.

Mao Zedong dan Deng Xiao Ping merupakan dua tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan-perkembangan yang terjadi di China. Selama masa pemerintahannya Mao banyak melakukan gerakan-gerakan massa yang cukup kontroversial. Sementara itu Deng Xiao Ping melakukan politik modernisasi sosialis yang mengubah wajah China menjadi kapitalis tetapi sekaligus tetap memertahankan pemerintahan komunis.

Setelah kematian Deng Xiao Ping pada tahun 1997, meskipun Partai Komunis China tetap memegang kekuasaan tertinggi namun kebebasan yang diberikan kepada masyarakat semakin besar. Sistem pemilihan suara untuk memilih para kepala desa mulai diperkenalkan di beberapa daerah. Bahkan mantan Presiden Jiang Zemin dan Perdana Menteri Zhu Rongji berusaha

keras untuk mempromosikan kepada dunia perdagangan internasional bahwa China tidak akan pernah menghentikan kebijakan pintu terbuka. China bahkan menjadi tuan rumah pada pertemuan-pertemuan seperti APEC (*Asia-Pacific Economy Cooperation/Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik*) dan Olimpiade 2008. Saat ini China juga menjadi anggota WTO (*World Trade Organisation/Organisasi Perdagangan Dunia*). Namun demikian dengan berbagai perubahan-perubahan itu, kebebasan di bidang politik masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan kebebasan di bidang ekonomi.

B. Masa Pemerintahan Mao Zedong

Mao memimpin China sejak berdirinya RRC pada tahun 1949 sampai kematiannya pada tahun 1976, meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden China setelah pengunduran dirinya pada tahun 1959 setelah kegagalan program Lompatan Besar ke Depan. Pada dasarnya kebijakan politik Mao lebih banyak dilakukan dalam bentuk kegiatan kampanye atau gerakan-gerakan massa.



Gambar 2.1 Foto Mao Zedong terpampang di istana terlarang

Sumber: <https://pixabay.com/en/mao-zedong>

1. Kampanye 100 Bunga Berkembang dan Kampanye Anti Kanan

Kampanye 100 Bunga Berkembang dimulai tahun 1956. Kampanye ini secara teori ingin memberikan kebebasan yang lebih besar dalam bidang seni, sastra, dan riset ilmiah. Partai ingin mendata dukungan dari rakyat China terpelajar yang dibutuhkan oleh negara dan mengajak para intelektual untuk mengemukakan pendapatnya terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di China pada saat itu.

Di bawah kebijakan seratus bunga selama kurang lebih satu tahun seluruh negeri menikmati keadaan yang relatif tenang. Pada tahun 1957 partai memerintahkan kepada kaum intelektual untuk memberikan kritik kepada para pejabat pemerintah dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Mao Zedong mendorong para penulis untuk berbicara mengenai masalah-masalah dalam masyarakat baru. Pada awalnya terdapat keengganan, namun kemudian banyak bermunculan berbagai tulisan dalam artikel surat kabar, film, dan karya sastra mengenai masalah birokratisme dan otoriterisme dalam partai. Tetapi pada saat yang hampir bersamaan Mao juga menyampaikan hal lain, yaitu 'memancing ular keluar dari sarangnya' untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang berani menentang rejimnya. Mao melihat bahwa sebagian besar orang Cina yang terpelajar mendukung liberalisasi dan pemerintahan yang moderat.

Kebijakan meminta kritik sebenarnya hanya merupakan perangkap untuk memastikan bahwa ia berhasil membuka kedok orang-orang yang dicurigai akan menjadi pemberontak. Mao menyadari bahwa muncul banyak ketidakpuasan dari kaum intelektual. Setelah berbagai kritik masuk ke pemerintah, Mao segera mengeluarkan kebijakan baru, yaitu kebijakan anti kanan.

Semua intelektual yang mengkritik partai dituduh beraliran kanan. Tuduhan ini sama artinya dengan kontra revolusi yang mengakibatkan bahwa para tertuduh pantas untuk mendapatkan hukuman berat. Setelah satu tahun dilaksanakan dan kampanye anti kanan berakhir, diperkirakan sedikitnya 550.000 orang dicap sebagai kaum anti kanan, yaitu mahasiswa, guru, penulis, artis, ilmuwan, dan para profesional lainnya. Banyak di antara mereka yang dipecat sehingga kehilangan jabatan di pemerintahan dan dijadikan buruh kasar di pabrik-pabrik atau daerah pertanian, maupun dikirimkan ke kamp-kamp kerja paksa. Mereka dan keluarga mereka kemudian hidup sebagai warga negara kelas dua. Di antara mereka yang dibuang, banyak yang melakukan bunuh diri atau tewas dalam perjalanan. Kampanye ini telah merusak moral dan kepercayaan diri serta karier para intelektual, namun juga merusak keluarga mereka (I Wibowo, 2000:235). Namun demikian, kampanye anti kanan tidak mempengaruhi rakyat secara keseluruhan. Para petani dan buruh tetap hidup seperti biasa.

2. Revolusi Kebudayaan (*Cultural Revolution*)

Revolusi Kebudayaan Proletar merupakan periode paling penting dalam politik China setelah tahun 1949. Revolusi ini merupakan kampanye yang paling besar. Kehidupan di kota-kota besar berhenti, produksi juga berhenti. Bangunan dan gedung banyak yang rusak, termasuk kelenteng, gereja, dan masjid. Jumlah korban manusia diperkirakan sebesar 729.511 jiwa. Pada tahun 1978 ketika Deng Xiaoping mengumumkan kebijakan merehabilitasi korban Revolusi Kebudayaan, tercatat sedikitnya 300.000 orang yang menjadi korban tuduhan palsu. Deng Xiaoping sendiri yakin bahwa ada 2,9 juta orang mengalami berbagai macam penganiayaan selama kampanye tersebut (James Wang, 1985:30).

Revolusi kebudayaan merupakan gerakan politik nasional yang diorganisir dan dipimpin oleh sekelompok elite politik di bawah pimpinan Mao zedong. Revolusi tersebut berusaha menguji semua pejabat, khususnya para pejabat tinggi, memperbarui dan membersihkan mereka yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Mao. Dalam pandangan Mao banyak pemimpin menjadi borjuis dan korup. Jadi revolusi kebudayaan dipandang sebagai kampanye pembetulan dan sebagai kampanye massa untuk perjuangan kelas dalam menyelesaikan kontradiksi antara kaum proletar dan borjuis. Artinya kebudayaan disini tidak hanya berarti kesenian, melainkan seluruh aspek dan lembaga kemasyarakatan.

Setelah mundurnya Mao dari kursi kepresidenan China setelah kegagalannya dalam program lompatan besar ke depan, Mao masih tetap merupakan pemimpin tertinggi yang diagung-agungkan oleh rakyat. Namun yang menjalankan pemerintahan adalah dari kaum pragmatis di bawah Liu Shaoqi. Revolusi Kebudayaan dilancarkan pada tahun 1966 oleh Mao Zedong sebagai puncak perseteruannya dengan pejabat presiden Liu Shaoqi dan kliiknya yang dituduh beraliran kanan yang mendukung intelektualisme dan kapitalisme. Liu Shao Qi dan Deng Xiao Ping melihat bahwa kegagalan Lompatan Jauh ke Depan menunjukkan bahwa sosialisme orthodox yang dipegang Mao tidak lagi bisa dipertahankan, oleh karena itu perlu adanya revisionisme seperti yang dilakukan Uni Soviet. Gagasan ini sangat ditentang oleh Mao karena bertentangan dengan ide Mao dan tentu akan berpengaruh pada legitimasi Mao. Revolusi Kebudayaan merupakan gerakan anti kapitalisme. Selaku presiden RRC Liu Shao Qi memiliki gagasan untuk melunakkan penindasan pemerintahan terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat. Melalui program *Tiga Milik Pribadi dan Satu Garansi (sanzi yibao)*, Liu mengizinkan rakyat untuk mengerjakan tanah miliknya sendiri serta memiliki usaha kecil untuk dijual ke pasar bebas. Hal

ini membuat Mao khawatir akan membangkitkan kapitalisme di China.

Di bidang seni dan sastra juga terdapat kelonggaran dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada saat itu tema-tema sejarah banyak digunakan untuk mengemukakan sindiran-sindiran terhadap pemerintah dan Mao. Contohnya adalah drama tentang Mandarin Ming, yaitu tentang seorang pejabat pemerintahan yang hidup pada Dinasti Ming (1368-1644). Drama tersebut menceritakan mengenai keadilan dan keberanian Hai Rui yang mempertaruhkan nyawa dan memprotes Kaisar demi memperjuangkan nasib rakyat yang menderita. Akibatnya Hai Rui kemudian dipecat dari jabatannya dan dibuang. Drama Hai Rui ini dianggap merepresentasikan Marsekal Peng Dehuai yang menyampaikan kritik terhadap Mao mengenai program Lompatan Besar Ke Depan sehingga kemudian dipecat dan dihukum buang oleh Mao (Sukisman, 1993: 91).

Gerakan Revolusi Kebudayaan itu secara langsung mengenai isi seni, literatur, dan drama dengan menekankan bahwa ekspresi kebudayaan harus menghormati nilai-nilai kebangsaan dan proletar dalam masyarakat sosialis, menentang musuh-musuh kelas dan asing, dan menolak nilai-nilai tradisional China. Tujuan revolusi kebudayaan adalah untuk memelihara ideologi komunisme, budaya, dan adat kebiasaan proletariat. Revolusi kebudayaan memaksa pemujaan sepenuhnya terhadap partai komunis dan Mao Zedong. Oleh karena itu unsur-unsur revisionis harus dihilangkan dan dibersihkan dalam PKC. Tradisi dan budaya harus dihilangkan, seperti ajaran Konfusianisme dan adat lama lainnya.

Langkah organisasional Mao selama masa revolusi ini adalah dengan membentuk rantai komando pribadi yang beroperasi di luar mesin partai, meskipun secara resmi menyatakan berada di bawah politbiro dan komite pusat. PKC tidak dapat dijadikan sumber

legitimasi karena terdapat kubu Liu Shao Qi dan Deng Xiao Ping. Mao memobilisasi militer, kaum intelektual radikal dan para pelajar. Mao juga menguasai media khususnya Koran paling berpengaruh "Harian Rakyat". Pada bulan Juni membuat serangkaian editorial yang menganjurkan rakyat untuk menegakkan kekuasaan mutlak ketua Mao, menyapu bersih semua setan, sapi, iblis, ular (musuh kelas) dan mendesak rakyat agar mengikuti Mao dan bergabung dalam Revolusi Kebudayaan yang sangat luas dan belum pernah ada sebelumnya.

James R Townsend (1997:186) membagi Revolusi Kebudayaan dalam empat tahap. Mobilisasi tahap pertama dalam Revolusi Kebudayaan berlangsung dari tahun 1965 sampai bulan Juni 1966. Dalam periode ini kepemimpinan pusat saling bertikai dalam masalah bagaimana menanggapi tuntutan Mao akibat berkembangnya pengaruh kaum revisionis. Kritik terbuka dilancarkan terhadap sejumlah kecil intelektual dan propaganda partai yang telah menyebarkan tulisan-tulisan anti Maois dalam tahun 1961 - 1962. Selama bulan Juni dan Juli 1966, Revolusi Kebudayaan meluas menjadi suatu gerakan massa terbuka untuk menelanjangi semua 'penguasa borjuis', khususnya dalam lembaga-lembaga pendidikan dan propaganda.

Tahap kedua adalah serangan terbuka yang dilancarkan oleh kelompok Pengawal Merah yang berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan November 1966. Revolusi Kebudayaan dikawal oleh Pengawal Merah yang didirikan oleh mahasiswa dan pelajar pada tahun 1966. Pengawal Merah menjadi ujung tombak Revolusi Kebudayaan dan didukung oleh Tentara Pembebasan Rakyat. Dengan dukungan kekuasaan resmi tersebut dan ditutupnya kegiatan sekolah-sekolah, organisasi-organisasi Pengawal Merah terus berkembang, dan berjuta-juta pemuda turun ke jalan berdemonstrasi mendukung ketua Mao, mengutuk dan meneror

mereka yang digolongkan sebagai lawan-lawannya, dan menghancurkan berbagai lambang kebudayaan 'borjuis' atau reaksioner. Akan tetapi walaupun aksi-aksi mereka mengarah kepada ketaatan yang hampir fanatik terhadap Mao, mereka tidak dapat menyingkirkan lawan-lawan Mao dari kekuasaan.

Puncak Revolusi Kebudayaan terjadi pada tahun 1967. Antara tahun 1966-1967 negara mengalami keadaan kacau balau oleh tindakan Pengawal Merah yang secara bebas menyerang apapun juga. Targetnya adalah pejabat-pejabat rendah dan menengah serta kader-kader partai. Mereka mengancam siapapun yang berada dalam posisi pimpinan. Kecamatan-kecamatan sering berubah menjadi sanksi atau hukuman. Korban berjatuh karena hukuman maupun bunuh diri. Misalnya dosen atau petinggi universitas dialih tugaskan ke peternakan babi, dokter ahli dimutasi menjadi petugas kebersihan WC, atau birokrat dikirim ke pedalaman agar menghayati keadaan rakyat. Dalam pelaksanaannya Pengawal Merah membuat kekacauan di masyarakat dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dibubarkan oleh Mao Zedong.

Tahap ketiga berlangsungnya Revolusi Kebudayaan adalah perebutan kekuasaan yang berlangsung dari bulan Desember 1966 sampai bulan September 1968. Gerakan tersebut meluas sampai ke daerah pedalaman, perusahaan-perusahaan, dan pemerintahan serta partai. Kelompok 'pemberontak revolusioner' baru umumnya berasal dari masyarakat pekerja, dan dengan demikian merupakan organisasi-organisasi massa yang lebih luas daripada para pengawal Merah yang terdiri atas kaum mahasiswa dan pelajar.

Gagasan tentang 'perebutan kekuasaan' dari bawah merupakan serangan langsung terhadap wewenang dan organisasi partai lokal. Golongan Maois di Peking menganggap pergolakan di

daerah-daerah ini sebagai suatu keharusan dan memang dikehendaki, tetapi mereka dengan cepat membatasi gerakan ini.

Pada bulan Januari 1967 dikeluarkan instruksi bahwa TPR harus turut campur tangan dengan memberi bantuan sepenuhnya pada pihak 'kiri' dan menguasai fasilitas-fasilitas komunikasi yang penting, transportasi, dan lain-lainnya. Akibatnya China berada di bawah undang-undang keadaan perang, di mana TPR menjadi penguasa administratif *de facto* dan sebagai penengah dalam sengketa-sengketa antar daerah dan organisasi PKC lokal tidak berfungsi lagi dan bahkan organ-organ partai sentral mengalami kemerosotan.

Pada bulan September 1968, para komandan tentara dan para bekas kader menduduki posisi-posisi penting dalam komite-komite baru, organisasi-organisasi massa dipecah belah dan ditindas, dan para mahasiswa diperintahkan untuk kembali ke bangku sekolah atau bekerja di daerah-daerah pedalaman. Akan tetapi organisasi partai masih terpecah belah dan komite-komite revolusi tingkat provinsi telah terlanjur memperkuat wewenang kekuasaan mereka atas daerah bawahannya.

Tahap keempat atau terakhir adalah tahap konsolidasi, kepemimpinan China menyatakan kemenangan nominal dari Revolusi Kebudayaan, tetapi mengakui pula bahwa pembangunan kembali partai dan ekonomi serta struktur politik yang stabil masih harus dicapai.

Revolusi kebudayaan tidak memberi kemenangan yang mutlak kepada golongan Maois. Kepemimpinan yang muncul pada akhir kampanye masih merupakan suatu koalisi campuran dari kepentingan-kepentingan yang berbeda. Revolusi Kebudayaan mengakibatkan kira-kira separo dari elit politik sebelum tahun 1966 dipecat atau diturunkan jabatannya. Dengan diangkatnya sejumlah besar pimpinan politik baru pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi,

periode Revolusi Kebudayaan jelas merupakan suatu periode mobilitas besar-besaran. Tokoh-tokoh militer paling banyak mendapat keuntungan berupa kedudukan dalam Komite Sentral dan sebagian besar posisi-posisi penting pada tingkat provinsi.

3. Politik Luar Negeri

Sebagaimana dijelaskan bahwa teori kontradiksi merupakan unsur terpenting dari pemikiran Mao. Teori ini juga diaplikasikan dalam lingkup hubungan internasional, yaitu untuk mengidentifikasi kontradiksi-kontradiksi utama pada situasi dan waktu tertentu. Mao mengidentifikasi ada tiga kontradiksi di antara negara-negara di dunia, yaitu 1. Kontradiksi antara kubu sosialis dan kubu imperialis, 2. Kontradiksi antara negara-negara terjajah dan negara-negara imperialis, dan 3. Kontradiksi di antara negara-negara imperialis sendiri (Liu dalam Rizal Sukma, 1995: 34). Menurut Mao perdamaian antara kubu sosialis dan imperialis tidak mungkin terwujud. Teori ini disebut Teori Dua Kubu. Imperialisme merupakan sumber terjadinya perang modern, artinya selama negara imperialis masih ada maka perdamaian akan sulit tercapai.

Mao melihat situasi internasional dari sudut pandang musuh dan sahabat. Dalam hal ini China dengan tegas menunjuk Amerika yang memimpin kubu imperialis sebagai musuh utama China, sedangkan Uni Soviet yang memimpin blok sosialis merupakan sahabat, atau lebih dikenal dengan “kebijaksanaan condong ke satu pihak” (*lean to one side*). China memilih untuk condong ke pihak Soviet untuk memerangi imperialisme dan kolonialisme. Sikap ini dimanifestasikan oleh RRC melalui kebijaksanaan luar negeri yang mendukung sepenuhnya semua posisi Uni Soviet dalam masalah-masalah internasional dan menjalin hubungan erat dengan negara-negara sosialis. RRC menjalin hubungan erat dengan unsur-unsur gerakan komunis di dunia dan mendukung mereka menjalankan

revolusi menjatuhkan pemerintahan non-komunis di negara masing-masing.

Ketika pecah Perang Korea pada Juni 1950, RRC memberikan dukungan kepada Korea Utara dengan mengirimkan pasukannya. Di bawah pimpinan Jenderal Peng Dehuai tentara China yang berjumlah 130.000 orang menyeberangi Sungai Yalu dan berhadapan dengan pasukan Amerika Serikat. Sampai berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953 tidak kurang 1 juta tentara China tewas dalam Perang Korea termasuk diantaranya putra Mao. Akibat peperangan ini China dicap sebagai agresor.

Hubungan internasional China mulai mengalami pergeseran sejak munculnya ketidakpuasan China terhadap Uni Soviet terkait dengan perbedaan politik 2 pimpinan Negara komunis tersebut. Di samping itu perhatian Beijing terhadap negara-negara Asia Afrika semakin meningkat, sehingga memunculkan teori Zona Antara. Pada tanggal 6 November 1957 Mao mengeluarkan pernyataan tentang "Zona Antara", bahwa imperialis AS melakukan tindakan ikut campur dalam urusan dalam negeri semua bangsa, terutama dalam urusan-urusan dalam negeri negara zona antara yang terletak di antara kubu sosialis dan imperialis (Rizal Sukma, 1995: 37). Politik luar negeri RRC tersebut pada dasarnya dapat disimpulkan sebagai usaha untuk mendorong bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk mengobarkan revolusi melawan imperialisme pada umumnya dan melawan pemerintah nasional masing-masing yang dinilai reaksioner.

Kubu zona antara yang pertama adalah negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin; dan kubu zona antara yang kedua adalah seluruh Negara Eropa Barat, Oceania (Australia dan Selandia Baru), Kanada, dan Jepang. Ketika hubungan RRC dan Soviet semakin memburuk pada tahun 1972 terdapat perubahan sistem internasional, yaitu: 1. Zona superpower yang terdiri atas

imperialisme AS dan imperialisme sosial Uni Soviet, 2. Zona sosialis yang terdiri atas Negara-negara sosialis, 3. Zona antara pertama yang terdiri atas negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, 4. Zona antara kedua yang terdiri atas negara-negara kapitalis tertentu di Timur dan Barat kecuali superpower. Dalam pandangan tersebut Uni Soviet dianggap sebagai musuh nomor satu. Sengketa RRC – Uni Soviet mencapai puncaknya sehingga RRC tidak lagi mengakui Uni Soviet sebagai puncak pimpinan dari gerakan komunis internasional. China menilai bahwa kedua superpower sedang bersaing sekaligus bersekongkol untuk menguasai negara-negara zona antara, terutama zona antara pertama. Selanjutnya China menjalankan strategi permusuhan kembar terhadap AS dan US.

Pada bulan Februari 1974 Mao memperkenalkan Teori Tiga Dunia. Dunia pertama adalah Amerika dan Uni Soviet. Dunia kedua terdiri atas Jepang, Eropa, dan Kanada. Asia kecuali Jepang, seluruh Afrika, dan Amerika Latin adalah Negara Dunia Ketiga. Teori ini merupakan kompas geopolitik untuk menentukan tempat China dalam politik dunia, dan China menegaskan bahwa dirinya termasuk dalam Dunia Ketiga. China menyerukan negara dunia kedua dan ketiga untuk bersatu membentuk Front Persatuan menentang hegemonisme. Menurut penilaian China ancaman Uni Soviet semakin berbahaya sehingga persatuan itu diarahkan untuk menentang hegemonisme Uni Soviet. Oleh karena itu sejak pertengahan 1970-an politik luar negeri China ditujukan untuk upaya-upaya perbaikan hubungan dengan AS yang dianggap sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu menandingi Uni Soviet.

Mao Zedong memanfaatkan perundingan berkala RRC-AS dengan perantaraan Duta Besar masing-masing di Warsawa. RRC mengajak untuk menciptakan hubungan antara 'rakyat China dan rakyat Amerika'. Presiden Nixon menyambutnya dengan menyatakan kehendaknya untuk menarik pasukan AS dari Vietnam.

Selanjutnya berlangsunglah saling kunjungan regu AS – RRC yang dikenal sebagai “Diplomasi Ping-Pong”. Pada sidang PBB bulan Oktober 1971, RRC diakui oleh PBB sebagai negara yang sah berkuasa di China sehingga diberi hak untuk menjadi anggotanya. Sebaliknya Pemerintah Nasionalis China di Taiwan menjadi batal keanggotaannya dari PBB.

C. Masa Pemerintahan Deng Xiao Ping

Deng Xiao Ping dikenal sebagai arsitek China modern, yang mengubah China melalui kebijakannya membuka China bagi dunia luar yaitu dengan politik pintu terbuka. Kebijakan Deng ini telah menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran di China khususnya di bidang ekonomi dan sekaligus membawa China sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Namun demikian, pemerintahan Deng bukanlah tanpa cela, terutama terkait kegagalannya dalam penyelesaian tuntutan mahasiswa yang berujung pada terjadinya peristiwa Tian’anmen.



Gambar 2.2 Deng Xiao Ping, arsitek China Modern
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiao_Ping

1. Kebijakan Politik Deng Xiao Ping

Deng Xiaoping menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi, pemberian kebebasan terbatas, orientasi keuntungan material, pemekaran kembali nilai-nilai tradisional, dan Konfusianisme. Deng melakukan upaya mengurangi pengaruh kebijakan Mao yang dianggap merupakan penghalang bagi kebijakan modernisasi. Deng Xiaoping yang pragmatis mengajak para pemimpin China untuk meninggalkan sementara masalah-masalah ideologi seperti masalah pertentangan kelas, penguasaan alat-alat produksi secara ketat oleh negara dan bentuk penerapan ideologi kaku lainnya.

Deng Xiaoping mendorong upaya-upaya peningkatan produksi nasional melalui manajemen kapitalistik yang sangat kontradiktif dengan ideologi komunis. Sebagai dampak adanya reformasi ekonomi secara menyeluruh di China sistem politik China pun akhirnya mengalami perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap. RRC mulai melakukan reformasi dan keterbukaan guna memenuhi tuntutan masyarakat China secara umum. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah China meskipun masih dilaksanakan secara terbatas, seperti (leoa56kipuns.wordpress.com/2010/10/23/15/):

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung melalui mekanisme demokrasi.
2. Pelaksanaan sistem otonomi desa.
3. Penghapusan sistem komune di setiap desa.
4. Pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada daerah-daerah provinsi, kotamadya, dan desa.
5. Mengefektifkan kembali lembaga-lembaga politik nasional seperti Konggres Rakyat Nasional dan Dewan Konsultatif Negara, dan secara lebih riil perluasan keanggotaan partai.

6. Pembentukan kembali sejumlah posisi dalam jabatan internal partai seperti:
 - a. Penghapusan jabatan ketua partai,
 - b. Pengaktifan kembali jabatan Sekretaris Jenderal,
 - c. Pembentukan posisi kepala negara (presiden).

Pelaksanaan politik modernisasi di China di satu sisi menggunakan penanaman modal asing atau membuka diri bagi investor asing tetapi di sisi lain tetap ingin mempertahankan prinsip-prinsip komunisme. Oleh karena itu, Deng Xiao Ping mengeluarkan kebijakan “Empat Prinsip Dasar” yang tidak boleh dilanggar. Keempat prinsip dasar tersebut adalah:

1. Jalan sosialis,
2. Berpegang pada kediktatoran proletariat,
3. Berpegang pada kepemimpinan PKC,
4. Berpegang pada Marxisme-Leninisme dan pikiran Mao Zedong.

Untuk mengontrol masyarakat berbagai kampanye juga dilakukan selama masa pemerintahan Deng Xiao Ping, antara lain Kampanye Menangkal Polusi Spiritual dan Kampanye Anti Borjuis.

a. Kampanye Menangkal Polusi Spiritual (1983-1984)

Pada tahun 1983-1984 dilakukan Kampanye Menangkal Polusi Spiritual yang bertujuan mencegah gelombang tuntutan akan kebebasan dan pengaruh buruk dari Barat. Kampanye ini bersumber pada pidato Deng Xiao Ping dalam Sidang Komite Sentral PKC ke-12 yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1983. Deng merasa prihatin dengan meluasnya pengaruh buku-buku, film, musik, dan audio/video rekaman Barat terhadap masyarakat China. Menurut Deng, kebudayaan korup kaum borjuis akan cepat menghancurkan para remaja China.

Seiring dengan pidato Deng tentang polusi spiritual, pemerintah kota Beijing mengeluarkan sebuah peraturan yang

melarang banyak hal, misalnya rambut panjang dan kumis bagi pria, dan lipstik atau perhiasan bagi wanita. Dalam rentang waktu beberapa bulan, kampanye melawan polusi spiritual meluas ke dalam kampanye massa. Para ahli propaganda partai berbicara tentang perlindungan dari kebebasan kaum borjuis dengan menekankan slogan “biarkan udara segar masuk, tetapi dijaga jangan sampai serangga masuk”. Pada bulan November 1983, berbagai kantor, sekolah, pabrik, dan perusahaan mengikuti pelajaran mingguan yang telah ditentukan sebagai bagian dari kampanye ini. Pemerintah juga melakukan penyitaan terhadap publikasi-publikasi, kaset-kaset video, dan film-film yang bersifat pornografi yang menggambarkan gaya-gaya hidup kaum kapitalis. Buku-buku atau artikel mendapat pengawasan ketat dari berbagai macam lembaga termasuk kepolisian. Buku-buku yang dicurigai berlawanan dengan pemerintah dilarang untuk beredar. Kebijakan ini tidak pernah diumumkan secara resmi, namun pemerintah sewaktu-waktu dapat mengeluarkan larangan dengan berbagai alasan misalnya pornografi, membahayakan keamanan negara, atau pun kontra revolusi (I. Wibowo, 2000:240-242).

Antara akhir tahun 1983 dan awal tahun 1984 banyak upaya ditempuh untuk menghentikan kampanye polusi spiritual sebelum hal itu meluas ke kampanye massal secara nasional. Beberapa alasan yang menyebabkan kampanye ini harus dihentikan adalah bahwa kampanye melawan hal kebarat-baratan telah memengaruhi kepercayaan investor luar negeri tentang kemampuan orang-orang China untuk tetap menjaga keterbukaan. Padahal investasi asing sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi China jangka panjang sesuai dengan rencana kaum reformis. Kampanye kemudian dibatasi pada diskusi-diskusi dan kritik-kritik yang mencakup kesusastraan, artistik, dan ideologi.

b. Kampanye Anti Borjuis (1985-1987)

Kampanye pembebasan anti-borjuis mencapai puncaknya sebagai kampanye pembetulan pada awal Januari 1987, ketika Hu Yaobang dipaksa untuk meletakkan jabatan sebagai ketua partai. Adanya ketakutan dan kekhawatiran bahwa kampanye mungkin akan keluar dari kontrol dan memburuk menjadi kampanye anti intelektual seperti tahun 1957 menyebabkan keputusan bahwa kampanye hanya dibatasi dalam partai. Meskipun Zhao Ziyang, pejabat ketua partai saat itu menandakan bahwa kebijakan partai tidak akan mengizinkan kampanye meluas ke luar organisasi partai tetapi bukti-bukti mengindikasikan bahwa kebijakan Zhao tidak sepenuhnya diikuti.

Dalam boikot selama 6 hari pada Juni 1987, mahasiswa Institut Keuangan dan Perbankan Pusat Beijing mengajukan protes terhadap pabrik rokok dekat kampus karena kebisingan yang ditimbulkannya. Mahasiswa kemudian diminta membuat esai mengenai sebab pesan borjuis harus ditentang, sebuah teknik umum yang dipakai dalam kampanye massa sebelumnya guna mempersatukan semua massa.

Selama tahun 1987-1988 usaha Zhao untuk membatasi kampanye pembebasan anti borjuis menjadi sasaran perlawanan dari kaum garis keras. Dalam pertemuan pemimpin puncak di Beidahe, kelompok garis keras menekan Deng untuk menyingkirkan Zhao atau memaksanya untuk membuat kritik diri terhadap kesalahan-kesalahan dalam kebijakan ekonomi dan kelalaian ideologi. Kelompok garis keras tetap memberlakukan secara penuh kampanye pembebasan anti borjuis untuk mencegah erosi nilai-nilai sosialis rakyat. Kaum intelektual di berbagai provinsi memboikot kampanye secara bersama. Orang-orang China yang sedang belajar di luar negeri menandatangani petisi yang memrotes kampanye pembebasan anti borjuis.

Dalam pidatonya pada tanggal 9 Juni 1988 Deng mencirikan gerakan protes mahasiswa sebagai sebuah upaya untuk menciptakan sebuah republik borjuis yang bergantung kepada Barat. Deng menggambarkan keadaan China sebagai konfrontasi antara Empat Prinsip Dasar dan Pembebasan Borjuis.

2. Peristiwa Tiananmen

Peristiwa Tiananmen secara tidak langsung tidak terlepas dari peristiwa Perang Dingin dan perpecahan dalam tubuh Partai Komunis China. Peristiwa Tiananmen 4 Juni 1989 sering dipandang sebagai sejarah kelam pemerintahan Deng Xiao Ping sekaligus sebagai tonggak sejarah yang menentukan bagi perjuangan kaum intelektual China.

Peristiwa yang diawali oleh upacara pemakaman Hu Yaobang mantan sekjen PKC, berubah menjadi demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi tersebut dimulai oleh mahasiswa Universitas Beijing dan kemudian oleh para mahasiswa di seluruh kota Beijing. Demonstrasi mahasiswa tersebut kemudian diikuti oleh buruh, pegawai pemerintah, dan bahkan oleh anggota partai. Pada puncak demonstrasi di bulan Mei 1989 tidak kurang dari satu juta orang berdemonstrasi secara bergiliran di Lapangan Tiananmen (I. Wibowo, 2000: 262).

Sejak dibukanya hubungan diplomatik antara China dengan Amerika Serikat di akhir tahun 1970an maka hubungan antara China dengan Amerika Serikat menjadi baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dengan adanya hubungan tersebut China tidak dapat menghindari ekspansi ideologi yang diterapkan oleh Amerika Serikat melalui pendidikan. Politik Pintu Terbuka memberi kesempatan bagi masuknya pemikiran-pemikiran dan budaya asing termasuk demokrasi Barat. Akibatnya mahasiswa semakin kritis terhadap pemerintah. Rangkaian demonstrasi mahasiswa diawali

pada bulan Desember 1986 ketika secara serentak terjadi demonstrasi di 15 kota besar di China. Mereka menuntut adanya kebebasan berpolitik yang lebih besar di China.

Dalam demonstrasi tersebut terdapat poster-poster dan slogan-slogan yang menghendaki kebebasan di segala bidang dan penindakan terhadap para pemimpin yang dianggap menyeleweng. Sebaliknya Partai Komunis China pada pokoknya mempertahankan empat prinsip dasar. Bagi para penguasa RRC tuntutan para demonstran adalah diberlakukannya demokrasi liberal, yang tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah. Bagi kaum demonstran 'pembangunan sosialis' yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah komunis sebagai demokrasi semu yang munafik. Harian Tentara Pembebasan edisi 4 Juni 1989 mengemukakan:

...kegiatan para demonstran tanggal 3 Juni 1989 adalah suatu tindak kekerasan kontra revolusi yang merupakan kekejaman terburuk dalam abad ini..untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara ...maka Angkatan Bersenjata mengindahkan Partai Komunis dan Kongres Rakyat Nasional telah mengambil keputusan...untuk menumpas pergolakan tersebut...(W.D. Sukisman, 1993:159).



Gambar 2.3 Ribuan massa yang sebagian besar terdiri atas mahasiswa berkumpul di Lapangan Tiananmen, 4 Juni 1989

Sumber : <https://cukuptauaja.wordpress.com/2016/06/04/mengenang-peristiwa-tragedi-tiananmen/>

Puncak demonstrasi terjadi ketika hampir satu juta pekerja dan mahasiswa China memenuhi tempat di depan Gerbang Damai Surgawi. Partai Komunis China merasa sangat dipermalukan dengan peliputan yang begitu meluas oleh media internasional atas peristiwa ini. Pada bulan Juni 1989 jumlah massa di lapangan tersebut sebenarnya sudah menyusut hingga mencapai ribuan saja, namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda hendak mundur. Pada tanggal 3-4 Juni 1989 malam hari pemerintah mengirimkan tank-tank dan kendaraan lapis baja untuk mengatasi aksi demonstrasi tersebut. Peristiwa Tian'anmen merupakan tragedi besar bagi demokrasi China. Mahasiswa sebagai motor penggerak berbagai aksi yang mendukung demokrasi ditembak secara membabi buta ketika melakukan aksi demonstrasi di Lapangan Tian'anmen. Jumlah korban tewas tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Wali kota Beijing, Chen Xitong mengatakan puluhan tentara China tewas, 6.000 tentara terluka, dan 20 warga sipil termasuk 36 mahasiswa tewas serta 3.000 terluka. Sumber yang lain menyebutkan jumlah korban peristiwa Tian'anmen 400-800 rakyat biasa tewas, 7.000 mahasiswa tewas, dan antara 7.000 sampai 10.000 orang (mahasiswa, sipil, dan tentara) luka-luka (Sukisman, 1933: 160).

3. Pertahanan Keamanan

Militer China saat ini tidak lagi hanya sekedar mengandalkan jumlah prajurit. China telah berubah menjadi salah satu negara industri besar, sehingga dengan sendirinya China juga mengalami perubahan menjadi militer yang modern. Meskipun memiliki angkatan bersenjata terbesar di dunia, teknologi yang dimiliki China tertinggal sejauh 20-30 tahun dibandingkan teknologi persenjataan bangsa Barat. Sejak awal tahun 1980an China menerapkan strategi pertahanan aktif (*jiji fangyu*) agar selaras dengan upaya

pembangunan ekonomi atas inisiatif Deng Xiao Ping. Artinya bahwa kebijakan pertahanan di China harus ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada dasarnya strategi pertahanan aktif ditujukan untuk menghadapi tiga jenis perang. Pertama, perang dunia. Kedua, perang skala luas dalam menghadapi serangan dari negara asing terhadap China. Ketiga, perang terbatas atau konflik perbatasan. (Yayan Mochamad Yani, "Makna Pengembangan Kekuatan Militer Cina", <http://www.mimbar-opini.com/mod=publisher&op=viewarticle&artid=2459>, diakses 3 Oktober 2013).

Para elite strategi China sejak tahun 1980 an meyakini bahwa dari ketiga jenis peperangan tersebut perang terbataslah yang akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, sampai saat ini China mengembangkan simulasi perang regional dan terbatas.

Menjelang tahun 1990 arti penting pertahanan maritim dan udara dalam doktrin pertahanan aktif mulai diperhitungkan melalui pengenalan strategi pertahanan air hijau (*jijide jin hai fangyu zhanlie*). Melalui strategi ini, restrukturisasi prioritas pengembangan angkatan bersenjata dari ketiga kekuatan matra udara, laut, dan darat dapat dilakukan untuk membangun kemampuan gerak cepat (*rapid response capability*) untuk menghadapi perang-perang regional dan terbatas atau konflik intensitas rendah (*low intensity conflict*) di sekitar wilayah China. Angkatan bersenjata China menetapkan prioritas pengembangan pada angkatan udara dan angkatan laut. Militer didorong untuk melakukan konstruksi kualitatif militer, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan operasi militer dengan teknologi persenjataan yang tinggi serta kombinasinya.

Doktrin modernisasi kualitas militer inilah yang menjadi landasan filosofis pengembangan militer China sejak tahun 1992 sampai saat ini. Doktrin pertahanan aktif dan konstruksi kualitatif militer yang menjadi landasan strategi pertahanan peripheral dan

proyeksi masa depan (*future projection*) militer dalam rangka mengantisipasi perang terbatas dan regional diimplementasikan dengan dilakukannya peningkatan kekuatan militer China. Hal ini terlihat pada pengembangan kekuatan laut dan udara China, juga dengan peningkatan kualitas dan teknologi persenjataan melalui program penelitian dan pengembangan yang bersifat intensif (Jones Walter, 1993).

Dalam memodernisasi kemampuan Angkatan Bersenjataanya terkait teknologi persenjataan yang lebih modern, China gencar mengadakan pembicaraan dengan AS dan sekutu-sekutunya sejak tahun 1980. Pembicaraan tersebut meliputi kemungkinan produksi senjata bersama, penjualan perangkat keras pertahanan (*defense hardware*), dan teknologi terkait lainnya. Pemerintah AS mengizinkan China untuk membeli peralatan militer atas dasar *Foreign Military Sales* (FMS) dari pemerintah ke pemerintah. Penjualan peralatan militer AS antara lain penjualan helikopter S-70 Sikorsky, informasi mengenai cara-cara produksi amunisi artileri dan paket-paket data teknis lainnya, peralatan avionik untuk mengembangkan pesawat-pesawat interceptor F-8 RRC, torpedo, sonars, sistem pertahanan kapal, dan misil seperti I-TOW dan I-Hawks (Kerry B Dumbaugh dan Richard E Grimmett, 1995: 83).

China juga mengembangkan sarana alih teknologi persenjataan dengan banyak negara lain. China memproduksi APCs (*Armoured Personal Carriers*) melalui lisensi dari Brazil. Dari Prancis, China membeli radar, helikopter, dan sistem ASW. Artileri, peralatan anti kebakaran dan mesin-mesin pesawat dibeli dari Inggris, sedangkan perangkat-perangkat komputer dibeli dari Jepang. Di samping itu, China juga cenderung mengoptimalkan alih teknologi melalui pembelian perangkat-perangkat teknologi berdaya guna ganda (*dual-use technology*), dengan tujuan jangka

panjang untuk mengembangkan kemampuan produksi dan desain China sendiri (Dumbaugh, 1995: 84).

China juga meningkatkan perhatiannya pada perang-perang intensitas rendah yang kemudian mendorongnya mengembangkan unit-unit pasukan gerak cepat yang banyak dipelajari dari pengalaman-pengalaman negara lain seperti Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat dalam menghadapi pertempuran dengan calon teroris dan kekacauan dalam negeri. Selain itu juga untuk mengamankan berbagai kepentingan maritim, klaim-klaim teritorial, dan lepas pantainya.

Terkait dengan isu nuklir, China harus bersaing untuk mendapatkan potensi politik yang penuh dalam sistem internasional. Meskipun China memiliki status negara nuklir, tetapi dalam Sidang Istimewa Majelis Umum PBB tentang pelucutan senjata tahun 1978, China menyatakan bahwa dengan adanya perlombaan senjata Amerika-Soviet, justru memberikan batasan kekuatan nuklir agar dunia tidak terpecah belah oleh ancaman dan pemerasan nuklir. Persepsi China di sini tidak mengandalkan nuklir sebagai sumber *power*, tetapi hanya mengandalkan nuklir sebagai alat banding agar dipandang dalam dunia internasional.

Modernisasi persenjataan militer China yang terus berkembang dan berusaha mengikuti perkembangan teknologi tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat potensi konflik masih mewarnai hubungan China dengan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur. Modernisasi militer China menjadi tantangan bagi aliansi pertahanan Jepang-Amerika Serikat, meski kecil kemungkinannya bahwa China akan menyerang negara tetangganya.

D. Permasalahan Internal China

Sejak kemunculannya sebagai negara RRC, China segera mengonsolidasikan semua wilayah penting di daratan China. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat beberapa wilayah yang mendapatkan status otonomi khusus terlibat konflik dengan pemerintah China.

a. Masalah Taiwan

Taiwan atau Formosa dulunya merupakan wilayah yang dikuasai Jepang dari Kekaisaran China melalui Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1891. Namun setelah kekalahan Jepang dalam perang dunia II, Taiwan dikembalikan kepada pemerintah Republik China baik secara *de jure* maupun *de facto*. Sementara itu di daratan China perang saudara kembali terjadi setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945 antara kelompok nasionalis dan komunis di China. Peperangan ini dimenangkan oleh Partai Komunis China sehingga Chiang Kai Shek, pemimpin Kuomintang dan para pengikutnya melarikan diri ke Formosa. Dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat, Chiang Kai Shek melanjutkan pemerintahan Republik China di Taiwan.

Setelah berdirinya Republik Rakyat China Amerika Serikat segera melaksanakan politik pembendungan (*Containment Policy*) agar komunisme tidak menyebar kemana-mana. Pada tahun 1950 armada pasukan Amerika ditempatkan di Taiwan dan pada tahun 1954 AS dan penguasa di Taiwan menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama dan menempatkan Provinsi Taiwan di bawah perlindungan Amerika. Campur tangan Amerika atas urusan dalam negeri China telah menyebabkan konflik berkepanjangan di Selat Taiwan. China memandang Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang, sementara Taiwan berkeras sebagai negara yang

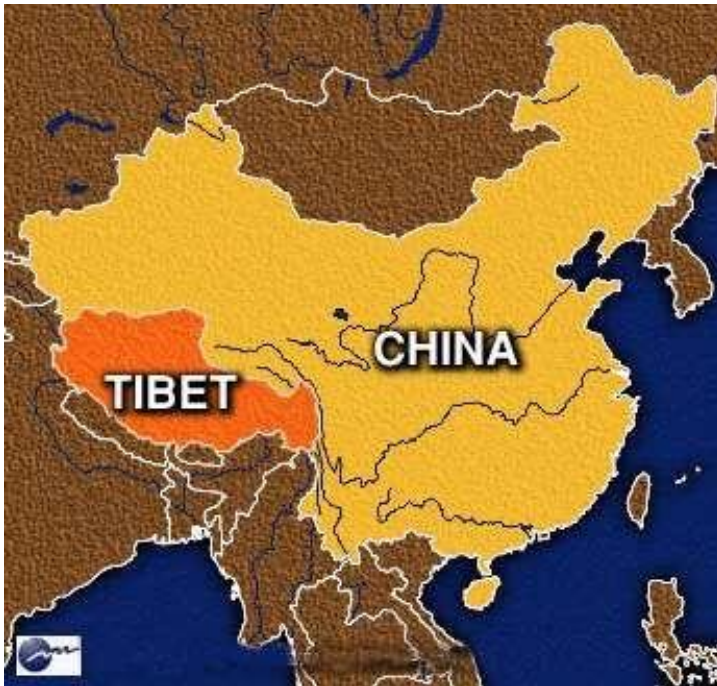
berdaulat dan menganggap pihak komunis melakukan pemberontakan terhadap pemerintah China yang sah.

Seiring dengan perubahan situasi internasional dan semakin kuatnya posisi China, menyebabkan Amerika menyesuaikan kembali kebijakannya terhadap China. Sejak 1971, saling kunjung pemimpin kedua negara, AS dan China dilakukan, dan pembicaraan-pembicaraan dalam masalah politik itu dikenal dengan istilah 'diplomasi pingpong'. Pada tahun itu juga China masuk dalam keanggotaan PBB dan mengusir perwakilan PBB dari Taiwan. Pada tahun 1972 Presiden Richard Nixon berkunjung ke China, dan menandatangani Komunike Sanghai yang menyatakan bahwa Amerika Serikat mengakui hanya ada satu China yaitu Republik Rakyat China, dan Taiwan adalah bagian dari China. Pada tahun 1978, pemerintah Amerika menerima prinsip terkait pembukaan hubungan diplomatik dengan China, yaitu Amerika memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan, membatalkan Perjanjian Pertahanan Bersama dan menarik tentaranya dari Taiwan. Hubungan diplomatik antara AS dan China dibuka secara resmi pada 1 Januari 1979.

Meskipun demikian, Amerika Serikat tidak melepaskan masalah Taiwan dan masih terus ikut campur dalam masalah China - Taiwan. Politik luar negeri Amerika mendua terkait masalah Taiwan. Melalui UU Hubungan dengan Taiwan, Amerika terus menjual persenjataan ke Taiwan dan menghalangi upaya penyatuan antara China dengan Taiwan. Artinya, konflik China - Taiwan yang masih terus berlangsung sampai saat ini tidak terlepas dari kepentingan dan peran Amerika Serikat. Perkembangan saat ini bukan lagi Republik China yang berseteru dengan Republik Rakyat China, melainkan Republik Taiwan.

b. Masalah Tibet

Permasalahan dengan Tibet dimulai ketika dalam rangka konsolidasi kekuasaannya dan dengan dalih 'pembebasan untuk Tibet', Mao Zedong menginvasi Tibet pada tahun 1950 dan mengklaimnya sebagai wilayah otoritas China. Bagi China, Tibet yang terletak di daerah perbatasan Barat Daya China yang berdekatan dengan India, Bhutan, dan Nepal merupakan pintu gerbang bagi China ke arah lainnya. Artinya Tibet merupakan wilayah yang strategis bagi kepentingan pertahanan nasional China. Di samping itu Tibet memiliki potensi ekonomi yang besar baik berupa kekayaan alam dan wisata.



Gambar 2.3 Wilayah Tibet di China

Sumber: <https://www.taringa.net/posts/offtopic/16217492/El-lamaismo.html>

Di bawah tekanan yang besar dari China, pada 23 Mei 1951 Tibet menyetujui penandatanganan “17 poin kesepakatan” (*seventeen point agreement*). Kesepakatan tersebut menjadikan Tibet sebagai wilayah otonomi khusus di bawah kepemimpinan tradisional Tibet yaitu Dalai Lama. Dalam kesepakatan itu pemerintah China yang akan menangani urusan eksternal di Tibet dan menjamin tidak akan mengubah sistem politik yang ada di Tibet dan tidak mencampuri status, fungsi, dan kekuasaan Dalai Lama dan Panchen Lama. China akan mengubah sistem ekonomi, politik, dan sosial yang ada dan akan menjalankan berbagai reformasi di Tibet jika masyarakat Tibet menghendakinya dan setelah dikonsultasikan dengan tokoh-tokoh pimpinan di Tibet (Nurani, 2008: 48).

Namun pemerintah China mengingkari isi perjanjian dengan membatasi pemerintahan yang dipegang Dalai lama dengan alasan ingin menghapus sistem pemerintahan feodalisme dan mengubahnya menjadi sistem pemerintahan komunis. Usaha Dalai Lama untuk memberikan solusi konflik China – Tibet dipersulit oleh kebijakan pemerintah China. Perlawanan terhadap China kemudian tumbuh dan memuncak pada pemberontakan Tibet tahun 1959. Pemberontakan 10 Maret 1959 dilakukan untuk menuntut kemerdekaan Tibet dari China. Dalam peristiwa ini Dalai Lama berhasil lolos dari penangkapan tentara China dan melarikan diri ke Dharamsala di India Utara. Dalai Lama mendirikan pemerintahan sementara di sana dan terus menyuarakan status otonomi yang sesungguhnya untuk Tibet. Perlakuan pemerintah China terhadap masyarakat Tibet yang diskriminatif dan kasus-kasus pelanggaran HAM merupakan isu utama dalam masalah Tibet sampai saat ini.

c. Masalah Xinjiang

Xinjiang adalah wilayah di bagian barat China dan merupakan salah satu wilayah otonomi khusus di China. Sebagian

warganya adalah etnis Uighur yang mayoritas merupakan kaum muslim. Mao Zedong telah menetapkan Xinjiang sebagai wilayah otonomi pada tahun 1957. Arus migrasi Suku Han yang besar ke Xinjiang sebagai akibat kemajuan Beijing dipandang membahayakan eksistensi suku Uighur. Migrasi etnis Han besar-besaran ke wilayah Xinjiang menyebabkan etnis Han mulai menjadi etnis mayoritas di Xinjiang.

Suku Uighur menghendaki wilayah Xinjiang menjadi wilayah yang terpisah dari hukum yang secara umum berlaku di China. Mereka memiliki etnis, budaya, sejarah, dan bahasa yang berbeda dengan Suku Han dari China. Secara budaya suku Uighur lebih dekat dengan Kazakhstan, Kirgiztan, dan Pakistan yang mayoritas adalah muslim. Namun pemerintah China membatasi gerak masyarakat Uighur. Masjid-masjid diawasi dan imam-imam di Xinjiang wajib mengikuti pelajaran nasionalisme. Bahasa mandarin juga digalakkan di sekolah-sekolah di Xinjiang.

Etnis Han di Xinjiang tentu memiliki ikatan politik yang lebih kuat dengan pemerintah pusat, sehingga akses ekonomi etnis Han jauh lebih terbuka dibandingkan pada etnis Uighur. Ketika perekonomian China di wilayah bagian barat semakin berkembang, etnis Uighur tidak merasakan kemajuan ekonomi seperti etnis Han. Mereka tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, secara umum akar permasalahan yang terjadi di Xinjiang adalah perebutan dominasi antara suku asli di Xinjiang yaitu etnis Uighur dengan etnis Han sebagai suku mayoritas di China, dan diskriminasi Pemerintah China terhadap etnis Uighur.

BAB III

PERKEMBANGAN POLITIK JEPANG

A. Pendahuluan

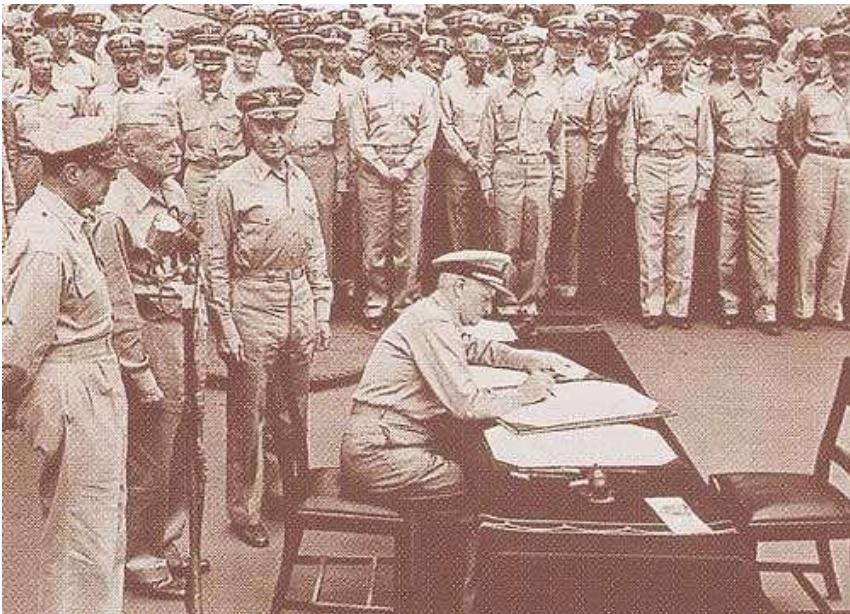
Jepang berupaya mewujudkan cita-citanya membentuk Negara Asia Timur Raya dan berusaha menggantikan kedudukan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa kulit putih. Untuk itu Jepang melibatkan diri dalam peperangan di Pasifik. Sementara itu Amerika Serikat telah membangun Pearl Harbour yang letaknya di tengah-tengah Samudra Pasifik sebagai pangkalan Angkatan Laut AS terbesar di Pasifik.

Perang Pasifik dimulai dengan dibomnya Pearl Harbour pada 7 Desember 1941 dan dalam waktu singkat Jepang berhasil menguasai wilayah-wilayah di kawasan Asia. Namun demikian, sejak pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu, kekuatan Jepang telah berhasil dilumpuhkan. Jepang menyerah dengan ditandatanganinya perjanjian penyerahan Jepang kepada Sekutu di atas geladak Kapal Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945.

B. Jepang Menyerah pada Sekutu

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, melalui perjanjian Postdam pada tanggal 26 Juli 1945, Jepang harus takluk kepada sekutu. Kekalahannya pada tahun 1945 telah menurunkan status Jepang menjadi penguasa klas ketiga (David, 1979: 268). Secara teritorial Jepang kehilangan semuanya kecuali empat pulau, yaitu Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Hokkaido. Kepulauan Kuriles dan

Sakhalin jatuh pada Rusia. China memperoleh kembali kedaulatannya secara penuh atas semua wilayah kekuasaannya. Philipina menjadi negara republik yang merdeka. Korea terpecah menjadi dua negara merdeka yang berbeda arah, dibagi antara Amerika Serikat dan Rusia. Republik Rakyat Mongolia memperoleh kemerdekaannya di bawah perlindungan Rusia. Burma dan India memasuki masa depan politik baru dan merdeka. Indonesia juga memperoleh kemerdekaannya. Wilayah kepulauan Pasifik yang dimandatkan pada Jepang setelah Perang Dunia I dipindahkan pada perwalian Amerika Serikat atas mandat dari PBB.



Gambar 3.1 Penandatanganan kekalahan Jepang di Kapal Missouri
Sumber: http://www.dinosoria.com/bombe_hiroshima.htm

Pihak sekutu akan menciptakan suatu pemerintahan dengan tetap mempertahankan kekuasaan Kaisar Jepang, tetapi kaisar tidak akan mendapatkan haknya sebagaimana yang ia dapatkan sebelum

Perang dunia. Jepang tanpa persyaratan apapun menerima isi perundingan Postdam setelah perang benar-benar usai dan Jepang menjadi pihak yang kalah. Setelah melihat tanda-tanda kehancuran militernya dan adanya jaminan pihak sekutu untuk tidak mengganggu stabilitas kekaisarannya, maka pada tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Jepang memerintahkan kepada seluruh anggota tentaranya untuk meletakkan senjata. Jepang mengakui kekalahannya dari sekutu. Perjanjian penyerahan Jepang kepada Sekutu ditandatangani pada 2 September 1945 di atas geladak kapal Missouri di Teluk Tokyo.

Dengan menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia II maka segenap pasukan sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat kemudian menduduki wilayah Jepang. Tujuan pendudukan sekutu adalah (Mikiso, 1992: 344-346):

1. Mengatur pemulangan tentara Jepang dan melucuti persenjataan mereka
2. Membubarkan kesatuan-kesatuan tentara di Jepang.
3. Memberikan hukuman kepada tentara yang terbukti melakukan kesalahan karena melanggar aturan perang.
4. Menjadikan negara Jepang sebagai negara yang hidup dalam demokrasi baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan.
5. Menghancurkan perindustrian Jepang yang digunakan Jepang untuk mendukung kekuatan militernya.
6. Membangun kembali perekonomian negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negara Jepang secara keseluruhan.

Surat-surat penyerahan telah ditandatangani oleh Jenderal McArthur selaku pemimpin tentara sekutu di Asia Pasifik dan oleh wakil-wakil negara yang ikut berperan dengan sekutu di Pasifik, di atas kapal perang Missouri pada tanggal 2 September 1945. Pada

tanggal 6 September Jenderal MacArthur diangkat sebagai panglima yang mewakili negara-negara yang tergabung dalam sekutu. Pendudukan Sekutu di Jepang berlangsung sampai dengan tahun 1952. Tugas untuk membentuk kembali Jepang secara esensial dilakukan melalui empat usaha sebagai berikut:

1. Pembubaran dan demiliterisasi dari Kekaisaran Jepang sebelumnya.
2. Membangun struktur politik baru yang damai.
3. Membangun tatanan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan menjamin kelangsungan hidup bangunan besar politik baru.
4. Membangun pondasi sosial dan pendidikan baru.

C. Perubahan Politik di Jepang

Pendudukan sekutu di Jepang dimulai setelah disetujuinya Perjanjian Postdam. Salah satu tujuan pendudukan sekutu di Jepang adalah menjadikan Jepang sebagai negara yang demokratis. Tujuan ini dapat dikatakan berhasil karena pada dasarnya Jepang telah mengenal dan memahami demokrasi. Secara umum pendidikan juga telah merata di seluruh lapisan masyarakat. Sebagai implementasinya Sekutu memberikan sebuah kerangka yang kuat dalam perkembangan Jepang dengan saluran-saluran yang demokratis seperti adanya pembaruan Undang-Undang Dasar.

Undang-undang Dasar rancangan sekutu dibicarakan pada parlemen pada 6 Maret 1946. Melalui beberapa amandemen UUD tersebut disahkan dan diumumkan pada tanggal 3 Mei 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 1947. Sistem parlemen terdiri atas Majelis Tinggi dan Majelis Rendah, keduanya dibentuk melalui pemilihan umum serta pemindahan kedaulatan dari Kaisar ke tangan rakyat. Beberapa ketentuan pokok konstitusi baru antara lain:

1. Kaisar merupakan lambang negara dan lambang kesatuan rakyat. Kedaulatan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam konstitusi sebelumnya disebutkan bahwa Kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Jepang menolak perang sebagai hak kedaulatan. Jepang juga menolak ancaman atau penggunaan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan dengan bangsa-bangsa lain.
3. Hak asasi manusia dijamin abadi dan tak terlanggar.
4. Dewan Bangsawan yang lama diganti dengan *House of Councillors* (Majelis Tinggi). Anggotanya sebagaimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Majelis Rendah) dipilih sebagai wakil dari seluruh rakyat. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih tinggi dari *House of Councillors*.
5. Kuasa eksekutif terletak pada kabinet yang terdiri atas perdana menteri dan 20 menteri yang secara bersama-sama bertanggung jawab kepada Diet (parlemen).
6. Otonomi daerah dilaksanakan secara luas.
7. Kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang menyangkut pemerintahan. Kaisar hanya melakukan fungsi kenegaraan yang ditentukan dalam undang-undang dasar, misalnya mengangkat Perdana Menteri dan Ketua Mahkamah Agung. Namun, Perdana Menteri ditunjuk dulu oleh Diet dan ketua Mahkamah Agung oleh Kabinet. Kaisar juga melakukan hal-hal atas nama rakyat seperti mengumumkan undang-undang dan perjanjian, memanggil Diet, dan menyampaikan pelanggaran; semuanya atas usul dan persetujuan Kabinet.



Gambar 3.2 Hirohito, Kaisar Jepang dari 1926-1989
Sumber: http://www.dinosoria.com/bombe_hiroshima.htm

Konstitusi lama yaitu Undang-undang Dasar Meiji tahun 1889 menyebutkan bahwa kekuasaan kaisar yang dianggap sebagai 'Dewa Hidup' dan suci tidak dapat diganggu gugat. Pada tahun baru 1946 sebelum dikeluarkannya UU yang membatasi peran dari tahta kekaisaran, Kaisar Hirohito secara resmi mengumumkan bahwa beliau bukan merupakan keturunan Dewa dan bukan merupakan objek pemujaan. Kaisar juga mulai lebih mendekati dirinya dengan rakyat. Dalam pasal 8 Konstitusi 1947, Kaisar melakukan kegiatan kenegaraan yang mengatasnamakan seluruh rakyat Jepang untuk melakukan (Usmar Salam, 1992:29):

1. Mengumumkan amandemen konstitusi, undang-undang, keputusan kabinet dan persetujuan.
2. Memanggil Diet untuk bersidang.
3. Membubarkan majelis rendah.
4. Mengumumkan pemilu bagi anggota Diet.
5. Menunjuk dan memecat menteri negara yang dinyatakan dalam undang-undang dan membuat surat-surat kepercayaan bagi duta-duta besar.
6. Mengesahkan amnesti umum dan khusus, peringanan hukuman, penangguhan hukuman mati, dan mengembalikan hak-hak.
7. Menganugerahkan tanda kehormatan.
8. Mengesahkan ratifikasi, dokumen diplomatic.
9. Menerima duta-duta besar serta menteri-menteri dari negara lain.
10. Melakukan tugas-tugas yang bersifat seremonial.

SCAP melarang pengajaran doktrin Shinto di sekolah-sekolah dan menghapuskan kontrol dan dukungan negara pada kuil-kuil Shinto. Pilar kekuasaan kekaisaran yang lain yaitu gelar bangsawan juga dihapuskan. Akibatnya 913 keluarga dari bangsawan hingga pangeran kehilangan status sosial dan hak-hak istimewanya.

Partai-partai politik dihidupkan kembali, misalnya Partai Liberal Demokrat dan Partai Demokrat Sosialis. Saat ini terdapat enam partai politik utama di Jepang yaitu Partai Liberal Demokrat, Partai Sosial Jepang, Komeito (Partai Pemerintahan Bersih), Partai Demokrat Sosialis, Partai Komunis Jepang, *New Liberal Club*, dan Partai Sosial Demokrat Bersatu.

Dalam bidang keamanan terdapat 3 prinsip utama, yaitu: memelihara dengan tegas persekutuan erat dengan Amerika Serikat

berdasarkan persetujuan kerja sama dan kemanan timbal balik antara Jepang dan AS, meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang sendiri dengan peningkatan Angkatan Bela Diri, dan melaksanakan diplomasi aktif untuk menciptakan lingkungan internasional yang lebih damai dan mantap.

Perubahan yang terjadi pada tingkat lokal adalah penguatan otonomi pemerintah lokal dan untuk memperkuat kecenderungan demokrasi. Pemerintahan daerah di tingkat prefektur berpusat pada gubernur dan DPRD dari masing-masing 47 prefektur. Pemerintah prefektur yang sebelumnya ditunjuk oleh pemerintah pusat sekarang dipilih oleh pemilih rakyat di daerah secara langsung. Pemerintah juga memberikan kekuasaan penting kepada DPRD yang juga dipilih melalui pemungutan suara rakyat secara langsung. Setiap prefektur, kota besar, kota, dan desa memiliki DPRD masing-masing yang bermajelis satu (*Unicameral Assembly*).

Reformasi lainnya diperkenalkan pada sistem kepolisian. Pada tahun 1947 UU reorganisasi polisi dikeluarkan untuk mendesentralisasikan polisi yang sebelumnya berada di bawah otoritas Kementerian Urusan Rumah Tangga dan agennya, gubernur prefektur. Kota-kota dengan jumlah warga lebih dari 5.000 memerlukan pasukan polisinya sendiri. Pasukan kecil polisi desa diciptakan untuk wilayah dengan populasi yang lebih sedikit.

Perubahan lain dalam demokrasi adalah dilaksanakannya pemilihan umum di bulan April 1946. Wanita diberi hak pilih dan usia pilih yang terendah dari 25 hingga 20 tahun. Hal ini membuka jalan bagi pemilihan pertama berdasarkan sistem hak pilih universal yang sebenarnya. Hak pilih bagi pria sudah berlaku pada tahun 1925.

D. Perkembangan Sejak Tahun 1970

Partai Demokratik Liberal terus mendominasi panggung politik sampai dengan tahun 1990-an. LDP telah mendominasi politik Jepang sejak akhir tahun 1940-an, namun tidak menjadi sebuah monopoli kekuasaan. LDP terdiri atas 5 faksi sehingga diperlukan kompromi-kompromi dan hubungan-hubungan yang saling menguntungkan. Faksi-faksi tidak dibagi berdasar ideologi atau persoalan-persoalan politik meskipun perbedaan itu ada. Sebaliknya, pengelompokan lebih didasarkan pada ikatan-ikatan personal dan regional, dan latar belakang historis. Kemampuan untuk menyediakan dukungan finansial dan patronase, dan keefektifan dalam menghadapi masyarakat merupakan faktor yang menentukan pimpinan faksi dipilih sebagai seorang Perdana Menteri.

LDP mampu mendominasi perpolitikan Jepang karena beberapa alasan. Pertama, dukungan kelompok industrial dan finansial utama, *zaibatsu*. Partai memperoleh dukungan dana untuk melaksanakan kampanye dengan sukses. Beberapa organisasi terdiri atas kepentingan bisnis besar. *Keidanren* (Federasi Organisasi Ekonomi) merupakan yang terpenting, yang terdiri lebih dari 700 korporasi industrial, perdagangan, dan keuangan terbesar.

Kedua, dukungan dari wilayah pedesaan. Pada 1988 sekitar 80% anggota Diet berasal dari konstituen pertanian yang memiliki ikatan dengan LDP. Meskipun populasi komunitas pedesaan lebih kecil daripada distrik kota, jumlah kursi per distrik tetap sama. Oleh karena itu, pengaruh politik di distrik desa lebih besar daripada ukuran populasinya. Untuk memperoleh dukungan dari desa LDP mengakomodasi petani dengan jaminan harga beras dan membatasi impor produk-produk pertanian. LDP juga mendapat dukungan dari pekerja kantoran, eksekutif muda, dan pemilik toko-toko kecil yang

kepentingannya dilindungi kekangan pemerintah pada rantai supermarket.

Partai oposisi, diantaranya Partai Sosialis Jepang (Partai Demokratis Sosial) adalah yang terbesar. Partai ini juga satu-satunya partai yang pernah memegang pemerintahan di luar LDP yaitu pada tahun 1947-1948. Partai Sosialis Jepang gagal membuat serangan politik terhadap LDP, bahkan sebagian anggotanya membentuk partai baru yaitu Komeito.

Pada tahun 1970-an, Jepang telah menjadi kekuatan ekonomi utama dunia tanpa kekuatan militer yang sebanding. Anggaran pertahanan Jepang pada tahun 1976 hanya sekitar 0.8 % dari GNP nya. Jepang muncul sebagai sebuah pola dasar negara modern non-Timur.

E. Politik Luar Negeri Jepang

Politik luar negeri Jepang setelah Perang Dunia II mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kehendak dari negara-negara yang mengalahkannya. Sebelum PD II Jepang mengedepankan kepentingan nasionalnya dan membentuk blok poros sesuai kepentingannya pula, yaitu blok Tokyo-Berlin-Roma. Setelah perang, pada tahun 1950-an sebenarnya Jepang tidak memiliki politik luar negeri sendiri. Jepang melaksanakan politik luar negeri yang condong pada politik AS. AS memiliki kepentingan atas Jepang sebagai sekutu untuk menghadapi Uni Soviet dan RRC, terutama untuk membendung paham komunis. AS juga menjadi pasar terbuka bagi barang-barang yang dihasilkan Jepang maupun sebagai sumber teknologi baru. Terlebih lagi dalam bidang pertahanan dan keamanannya, Jepang sangat mengandalkan Amerika Serikat.

Tujuan dasar diplomasi Jepang setelah Perang Dunia II adalah sebagai berikut (David, 1979: 284):

1. Mengurangi ketegangan dunia dan mendorong iklim kedamaian dunia.
2. Membangun hubungan yang bersahabat dan meningkatkan saling pengertian dengan negara-negara lain.
3. Berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara berkembang.
4. Berjuang keras untuk memperkuat PBB dan pembatasan angkatan (perlucutan senjata).
5. Memajukan kerjasama internasional.

Sejak tahun 1960-an terjadi multipolarisasi dalam politik internasional. Kekuatan dunia tidak lagi berporos pada AS dan US. Blok komunis mulai terpecah-pecah, demikian juga Blok Barat yang dipimpin oleh AS tidak lagi bersatu seperti semula misalnya Prancis dan Jerman Barat yang memiliki kepentingannya sendiri. Selain itu muncul gerakan non-Blok yang diawali dengan berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan pergolakan di Timur Tengah antara Arab dan Israel.

Jepang yang kemudian muncul sebagai kekuatan ekonomi terbesar ketiga dunia juga terpengaruh dengan keadaan tersebut, khususnya terkait dengan ketersediaan minyak bumi bagi keberlangsungan industri Jepang. Oleh karena itu, Jepang menyadari bahwa kepentingannya tidak sepenuhnya sama dengan kepentingan AS, sehingga Jepang mulai melakukan perubahan dalam politik luar negerinya. Jepang memiliki ketergantungan impor minyak dan sumber energi lainnya sehingga '*oil shock*' yang ditimbulkan oleh negara-negara Timur Tengah dan OPEC menyebabkan pergeseran politik luar negeri Jepang. Kepentingan terhadap sumber energi membuat Jepang menginginkan terpeliharanya perdamaian dan

stabilitas dunia secara maksimal. Dalam hal ini politik Jepang tidak sama dengan politik AS, karena AS lebih mendukung Israel sementara Jepang meyakini bahwa pertentangan antara Arab-Israel tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa memecahkan masalah Palestina.

Jepang juga menyadari bahwa Jepang tidak bisa bergantung pada satu wilayah saja untuk mendapatkan suplai energi, sehingga Jepang juga mulai memberi perhatian pada wilayah Asia Tenggara. Salah satu prinsip Jepang dalam politik luar negerinya adalah “menyokong tatanan perdagangan dunia yang terbuka, stabil, dan damai”.

Asia Tenggara yang damai dan stabil diperlukan Jepang bagi keamanan garis perbekalannya dan tumbuhnya ekonomi di wilayah tersebut. Minyak gas dan bumi Asia Tenggara mengurangi kepentingan Jepang terhadap Timur Tengah, sedangkan perkembangan ekonomi di wilayah Asia Tenggara akan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi Jepang. Di kawasan Asia Timur sendiri kepentingan Jepang juga sangat besar. Wilayah Semenanjung Korea merupakan wilayah yang sangat penting untuk Jepang. Jepang mendukung politik pemerintah AS dan Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara dalam kaitannya untuk mencegah masuknya paham komunis ke Jepang. Normalisasi hubungan dengan Korea Selatan dilakukan pada tahun 1965, diikuti dengan pemberian bantuan, pinjaman, investasi dan kerjasama perdagangan.

Jepang juga mulai membuka hubungan dengan RRC. Atas desakan AS, pada tahun 1952 Jepang mengakui kaum Nasionalis di Taiwan dan banyak berinvestasi di negara tersebut. Namun demikian, Jepang menghindari setiap keterlibatan politik atau militer di Taiwan yang akan memengaruhi perbaikan hubungannya dengan China. Simpanan sumber energi baik minyak bumi maupun batu bara yang dimiliki China menarik perhatian Jepang. Jepang juga

melihat China sebagai wilayah yang tepat untuk memasarkan hasil produksinya. Perdagangan dengan China sangat bergantung pada suasana hati petinggi di Peking. Pada 1970 perdagangan dengan China meningkat lebih dari 2% dari jumlah total perdagangannya.

Politik luar negeri Jepang banyak ditujukan untuk kepentingan ekonomi Jepang. Namun demikian cukup banyak persoalan juga dalam politik luar negerinya. Pertama, masalah Kepulauan Kurile yang terdiri atas empat pulau yaitu Kunashiri, Habomai, Etorofu, dan Shikotan yang menjadi objek perebutan antara Jepang dan Uni Soviet pasca PD II. Beberapa kali telah diupayakan perundingan untuk penyelesaian sengketa namun belum membuahkan hasil yang disepakati kedua belah pihak.

Kedua, sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dan China yang memicu ketegangan diplomatik antara keduanya. Sejak 1895 Jepang telah mengklaim Pulau Senkaku sebagai bagian Jepang di bawah Prefektur Okinawa. Setelah berakhirnya PD II berdasarkan Perjanjian San Fransisco Pulau Senkaku hanya disebut di bawah wilayah administratif Pulau Nanse di Jepang dan tidak ada klaim dari pihak China. Namun sejak ditemukan potensi cadangan minyak dan gas di sekitar Kepulauan Senkaku menyebabkan China dan Jepang terlibat konflik perebutan kepulauan tersebut. Pada 1978 keduanya sepakat menandatangani *Japan-China Peace and Friendship Treaty* yang menyatakan sengketa ini akan dikesampingkan dan diselesaikan oleh generasi selanjutnya. Namun pada 1996 sengketa Kepulauan Senkaku kembali memanas. Berbagai upaya penyelesaian masalah dilakukan dan pada 18 Juni 2008 dicapai kesepakatan berupa blok pengelolaan bersama yang akan dilakukan diatas ladang minyak dan gas Shirakaba. Namun demikian, sampai saat ini sengketa Kepulauan Senkaku belum sepenuhnya selesai.

Ketiga, sengketa antara Jepang dan Korea Selatan terkait Pulau Takeshima atau Pulau Dokdo. Takeshima/Dokdo adalah pulau

kecil yang terletak 215 km disebelah timur semenanjung Korea dan 250 km dari Jepang, yang kaya kandungan minyak dan gas bumi. Sengketa ini muncul sejak akhir perang dunia ke 2. Menurut Jepang perjanjian San Francisco tahun 1951 Jepang hanya mengakui kemerdekaan Korea dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan Pulau Dokdo kepada Korea. Sementara itu, Korea Selatan mengklaim bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayah yang bersatu dengan Korea Selatan pada masa Dinasti Shilla pada tahun 512 SM.

Keempat, persetujuan antara Jepang dan China serta Korea terkait penjelasan sejarah agresi Jepang di China dan Korea. Nasionalisme Jepang yang baru bukan ancaman serius bagi perdamaian internasional namun terdapat bukti-bukti bahwa pemimpin tertentu Jepang berusaha menghapuskan noda kesalahan agresi Jepang di tahun 1930an dan 1940an dan menanamkan rasa kebanggaan nasional pada generasi muda. Film-film tentang perang diproduksi. Pada 1982 dalam film *The Imperial Japanese Empire* Jepang digambarkan lebih sebagai korban dari pada penyerang Pearl Harbor. Pada tahun yang sama kemarahan berkembang di Korea dan China ketika menteri pendidikan meminta penulis buku teks ilmu sosial untuk mengurangi agresi dan kekejaman Jepang terhadap negara-negara tetangganya. Misalnya pernyataan tentang kekejaman tentara Jepang di Nanking dinyatakan lebih dari 70.000 orang dilaporkan dibunuh oleh tentara kerajaan Jepang. Kementrian mengubahnya menjadi sejumlah besar penduduk China terbunuh (Hane,1992:415). Belum lagi persoalan kunjungan Menteri Jepang ke Kuil Yasukuni untuk menghormati pahlawan perang Jepang dalam Perang Dunia. Bagi China dan Korea, Kuil Yasukuni merupakan simbol militerisme Jepang dan para pahlawan di dalamnya merupakan penjahat perang.



Gambar 3.3 Kuil Yasukuni

Sumber: <http://www.visitacity.com/en/tokyo/attractions/yasukuni-shrine?>

BAB IV

PERKEMBANGAN POLITIK KOREA

A. Pendahuluan

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu, menandai berakhirnya Perang Dunia II dan sekaligus mengakhiri pemerintahan kolonial Jepang di Korea. Namun demikian hal tersebut tidak berarti bahwa Korea segera menjadi sebuah negara yang merdeka. Sebaliknya, Korea justru menjadi wilayah pendudukan Sekutu, yaitu Amerika Serikat di wilayah selatan dan Uni Soviet di wilayah utara. Bahkan kemudian dalam perkembangan selanjutnya, Semenanjung Korea terbagi menjadi dua negara yaitu Korea Utara dan Korea Selatan sampai saat ini.

Masing-masing Korea membangun negaranya dengan ideologi yang berbeda. Melalui perjuangan yang panjang, Korea Selatan (Republik Korea) berhasil menjadi sebuah negara republik yang demokratis. Sementara itu Korea Utara (Republik Rakyat Demokratik Korea Utara) sampai saat ini masih mempertahankan diri sebagai sebuah negara komunis yang tertutup.

B. Dinamika Politik Korea Selatan

Masalah terbesar dalam dinamika politik Korea Selatan adalah merealisasikan aspirasi demokrasi. Rakyat Korea Selatan berjuang selama kurang lebih 35 tahun setelah perang Korea berakhir untuk mencapai demokrasi. Sejarah politik menuju demokrasi berlangsung dalam 7 periode, yaitu Republik pertama

yang berakhir tahun 1960, Republik Kedua (1960-1961), Pemerintahan Junta Militer (1961-1963), Republik Ketiga (1963-1972), Republik Keempat (1972-1979), Periode Interim (1979-1981), dan Republik Kelima (1981-1988).

Syngman Rhee menjabat sebagai presiden republik pertama (1948-1960). Selama masa pemerintahannya Rhee mengeluarkan

UU Keamanan Nasional tahun 1948 yang membatasi kebebasan berbicara, berserikat, dan pers. Untuk memperkuat kedudukannya Presiden Rhee mencari dukungan dari polisi dan tentara menandai

dimulainya politisasi badan keamanan nasional tersebut. Posisi

puncak dalam kepolisian dan kemiliteran diisi oleh orang-orang

yang ditunjuk oleh Rhee berdasarkan paham politiknya. Rhee

menyadari bahwa Dewan Nasional tidak akan memilihnya kembali

sebagai presiden, sehingga Rhee dan Partai Liberal mendesak

Dewan Nasional untuk meloloskan usulan perubahan UU agar

rakyat memilih presiden dan wakilnya secara langsung. Pada tahun

1952 Rhee terpilih kembali sebagai presiden dengan mayoritas

suara orang-orang desa yang telah diuntungkan melalui program

reformasi agraria tahun 1949. Pemerintahan Rhee yang otokratis

semakin kuat, dan Partai Liberal semakin korup dan melewati batas.

Rhee melalui anggota partai yang duduk dalam Dewan Nasional

mengamandemen UU untuk menghapuskan pembatasan masa

jabatan presiden selama dua tahun dan menghapuskan jabatan

perdana menteri untuk meningkatkan kekuasaan otokratis presiden.

Pemerintahan Rhee juga mengutamakan kebijakan anti

komunisme. Selama pemerintahannya Korea Selatan tidak banyak

mengalami kemajuan pembangunan negaranya. Pertumbuhan

ekonomi sangat rendah dengan tingkat inflasi yang cepat.

Pemerintah tidak melakukan perencanaan ekonomi yang baik dan

sering memanipulasi bantuan asing (Steinberg, 1989: 126).

Pemerintahan yang otokratis, korup, dan nepotis menimbulkan

protes rakyat berupa demonstrasi besar-besaran dan perlawanan mahasiswa pada April 1960 dan didukung penuh oleh militer. Demonstran menuntut mundurnya presiden dan kabinet, membatalkan hasil pemilu, menuntut reformasi dasar-dasar politik dan memecat polisi korup. Amerika Serikat juga menuntut mundurnya Presiden Rhee. Pada 26 April 1960 Rhee mengundurkan diri diikuti para kabinetnya.

Yun Po Son terpilih sebagai presiden dan Chang Myon sebagai Perdana Menteri pada periode republik kedua. Pemerintahan ini mengalami kegagalan karena kedua pemimpin tidak memiliki ketrampilan dan keteguhan politik. Pada masa ini terjadi polarisasi politik sehingga pemerintahan menjadi rapuh dan tidak tegas dalam mengambil sikap. Polarisasi terjadi antara kelompok yang masih setia pada Rhee yang kemudian mendukung Chang Myong dan kelompok anti Rhee yang mendukung Yun Po-son. Mereka gagal mengatasi perpecahan ideologis dan sosial antara kelompok-kelompok politik dan sosial, serta gagal memperoleh kepercayaan rakyat. Berbagai gerakan demonstrasi dan kekacauan terjadi. Puncaknya adalah revolusi militer di bawah pimpinan Mayjen Park Chung-hee yang berhasil menggulingkan pemerintahan republik kedua.

Selanjutnya, di bawah pemerintahan junta militer dibentuk komite revolusioner (*Military Revolutionary Committee*). Tujuannya melindungi negeri dari ancaman-ancaman komunis, menggantikan para pemimpin militer yang tidak efisien dan korup, depolitisasi militer, dan membangun kembali sistem politik, sosial, dan ekonomi bangsa dengan membentuk sebuah pemerintahan bersih dan berkeadilan sosial (Nahm, 1993: 289). Pada Januari 1963 Park mengumumkan bahwa kegiatan politik akan diizinkan kembali untuk memperkuat jalan bagi pemerintahan sipil. Partai-partai baru bermunculan, salah satu yang terbesar adalah Partai Demokrasi

Republik (RDP) dengan Jenderal Park sebagai ketuanya dan Partai Pemerintah Sipil dengan ketua Yun Po-son.

Pemerintahan Republik Ketiga (1963-1972) dimulai ketika Park Chung Hee berhasil memenangi kursi presiden pada Oktober 1963. Kebijakan Park adalah menciptakan stabilitas, membangun perekonomian, dan memperkuat pertahanan nasional. Ia tidak mengenal prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Park, cara demokrasi tidak akan membawa kemajuan ekonomi secara cepat dan justru memperlemah pertahanan nasional. Baginya yang berlaku adalah demokrasi 'terbatas', yaitu membatasi kebebasan sipil, kebebasan bicara dan pers. Park Chung Hee menyatukan kekuatan militer, birokrat, dan teknokrat. Oleh karena itu, rezim Park Chung Hee disebut sebagai rezim Otoriter Birokratis. Presiden Park termasuk salah satu peletak dasar *strong military-dominated government* di Asia.



Gambar 4.1 Park Chung Hee

Sumber: <http://www.macoree.com/textehist19.htm>

Kebijakan pembangunanisme menunjukkan dominasi negara sebagai pihak yang paling menentukan hubungan industrial. Di pihak lain kekuatan demokrasi yang mulai muncul semakin memperbesar tekanan rakyat terhadap kebijakan Park Chung Hee. Merasa terancam maka pada 6 Desember 1971 dengan dalih mengamankan negara dari demonstrasi-demonstrasi, presiden dengan dukungan militer mengumumkan negara dalam keadaan darurat perang, membubarkan dewan nasional, menutup semua universitas yang menjadi basis demonstrasi, melarang semua kegiatan politik, dan mengeluarkan dekrit presiden yang dikenal dengan Konstitusi Yushin.

Pada 28 Desember 1972 Presiden Park kembali dilantik sebagai presiden Republik Keempat (1972-1979). Dengan konstitusi *Yushin* presiden Park mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Park menjadi semakin otoriter, antara lain berhak memilih sepertiga anggota DPR, membubarkan DPR, dan memiliki hak-hak khusus dalam situasi darurat. DPR tidak berhak untuk memanggil presiden ke DPR, memeriksa anggaran belanja badan eksekutif, serta campur tangan dalam pengangkatan dan penurunan kepala Mahkamah Agung (Yang Seung-yoon, 2005: 34). Pada masa kepemimpinannya, Korea Selatan mampu membangun dengan cepat tanpa hambatan berarti dari kelompok oposisi yang menentangnya. Pembangunan mengutamakan pada pertumbuhan ekonomi. Untuk mempercepat industrialisasi pemerintah menciptakan kelompok-kelompok kapitalis baru yang merupakan kroni-kroni terdekat dari penguasa pemerintahan Korea Selatan. Angka ekspor meningkat pesat dan bisnis para konglomerat Korea (*Chaebol*) semakin berkembang pesat.

Namun demikian, gelombang tuntutan demokratisasi terus berlangsung. Demikian juga sentimen anti Amerika Serikat semakin

meningkat. Puncaknya adalah pembunuhan Presiden Park pada 26 Oktober 1979. Kematian Park Chung Hee memunculkan kekuatan-kekuatan sosial yang selama ini terkekang selama hampir dua dekade. Choi Kyu Hah seorang figur senior yang menjabat perdana menteri tanpa kekuatan politik diangkat sebagai presiden sementara dan usaha-usaha untuk mereformasi konstitusi segera dimulai.

Usaha ini berakhir ketika Jenderal Chun Doo-hwan berhasil menahan Jenderal Chung Sung Hwan sebagai pemimpin militer tertinggi di Korea Selatan dan perwira-perwira lain yang terlibat dalam pembunuhan Park. Secara bertahap Chun mengambil alih kekuasaan. Choi Kyu-hah menjabat sebagai presiden sementara selama kurang lebih 8 bulan. Pada 16 Agustus 1980 Choi Kyu-hah dipaksa meletakkan jabatan dan Chun Doo-hwan diangkat sebagai presiden sementara hingga dilangsungkannya pemilihan presiden.

Dalam pemilihan secara tidak langsung Chun terpilih kembali sebagai presiden dan pada 3 Maret 1981 Chun Doo-hwan secara resmi menjabat sebagai presiden Republik Kelima (1981-1988). Selama tiga tahun pertama pemerintahannya Chun bersikap keras dan represif karena menyadari legitimasi pemerintahannya sangat lemah. Pada tahun 1983 ia mulai mengendurkan kekuasaan otoriternya melalui kebijakan liberalisasi politik, di antaranya membuat undang-undang otonomi kampus, pembebasan dosen dan mahasiswa yang ditahan dalam peristiwa Kwangju, pembebasan tahanan politik dan pengembalian hak politiknya. Namun Chun tetap menolak demokrasi sepenuhnya sebelum tahun 1989. Chun mengabaikan tuntutan pemilihan presiden secara langsung dan kebebasan pers.

Pemerintahan Republik Kelima menghadapi permasalahan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkuat kontrol pemerintah dan menguntungkan partai-partai yang berkuasa, firma-firma

bisnis, dan orang-orang yang telah mendukung Chun. Pemerintahan Chun dipandang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mengakibatkan munculnya pertentangan yang menjadikan situasi politik Korea semakin memanas.

Pada masa akhir jabatannya Chun mencoba mewariskan kekuasaannya kepada kolega militernya, Roh Tae Woo. Hal ini membuat suasana politik semakin keruh karena tokoh-tokoh oposan mulai berani memrotes pengangkatan tersebut. Demonstrasi sipil terjadi dan memuncak pada tahun 1987. Akhirnya Roh Tae Woo memutuskan untuk bersaing dalam pemilu. Pada 29 Juni Roh mengumumkan 'Deklarasi Demokratisasi' yang mengusulkan pemilihan presiden secara langsung, penyusunan UU tentang pemilihan presiden, pembebasan tahanan politik, perlindungan HAM, kebebasan politik dan pers, mengembalikan otonomi daerah dan otonomi kampus, memberikan jaminan yang sama pada partai-partai politik yang ada, dan melaksanakan reformasi pembangunan sosial (Nahm, 1993: 309). Ia menuntut presiden untuk menerima usulannya atau ia akan mundur dari kursi DJP dan tidak akan mencalonkan diri pada pemilihan presiden yang akan datang. Persetujuan pemerintah atas usulan ini menjadi tonggak sejarah transisi menuju demokrasi di Korea Selatan.

Pada pemilu presiden secara langsung pertama kali pada 16 Desember 1987, Roh Tae-woo dari *Democratic Justice Party* (DJP) berhasil memenangi kursi presiden. Lawannya adalah Kim Young-sam dari *Republic Democratic Party* (RDP), Kim Dae-jung dari *Party for Peace and Democratic* (PPD), dan Kim Jong-pil dari *New Democratic Republican Party* (NDRP). Roh Tae-woo menjabat presiden Republik Keenam (1988-1992). Terpilihnya Tae-woo menandai pergantian kekuasaan secara damai untuk pertama kalinya dalam sejarah Korea modern. Beberapa arti penting Republik Keenam adalah:

1. Kekuatan politik dapat memiliki sifat keadilan dan basis dukungan rakyat karena pemilihan presiden dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat.
2. Kekuatan dan otonomi badan legislatif dan yudikatif diperkuat sehingga sistem pemerintahan yang terdiri atas tiga badan utama mulai mencari kembali keseimbangannya.
3. Otonomi pemerintah lokal dihidupkan kembali setelah selama 3 dasawarsa tidak dilaksanakan di Korea.
4. Kebebasan pers dan kegiatan perburuhan dihidupkan kembali.
5. Peran militer dihapuskan dan pemerintahan sipil dikembangkan.

Masa pemerintahan Republik Keenam merupakan kekuatan penengah antara politik militer dan politik sipil. Pada akhir tahun 1990-an kecenderungan demokrasi mulai tumbuh di Korea Selatan.

Dalam pemilihan presiden berikutnya Kim Young Sam terpilih sebagai presiden Republik Ketujuh (1992-1997), menandai dimulainya pemerintahan sipil yang menggantikan supremasi militer. Reformasi politik Kim Young-sam dimulai dengan penunjukan beberapa orang yang dianggap reformis untuk menggantikan orang-orang lama yang masih memiliki hubungan kuat dengan kelompok-kelompok otoritarianisme pada beberapa jabatan penting. Kim Young-sam mulai melakukan pemberantasan korupsi. Ia mengungkapkan kekayaan pribadinya kepada masyarakat umum dan bersumpah tidak akan menerima politik uang apapun dan memerintahkan jajarannya untuk melakukan hal yang sama. Reformasi politik yang dilakukan menyebabkan perhatian pada bidang perekonomian agak berkurang sehingga perekonomian Korea Selatan menunjukkan tanda-tanda kemerosotannya.

Pada 1998 Kim Dae-jung dilantik sebagai Presiden Republik Kedelapan (1997-2002). Salah satu kebijakan penting selama masa pemerintahannya adalah kebijakan sinar matahari (*Sunshine Policy*) terkait hubungannya dengan Korea Utara. Kim Dae-jung dikenal sebagai peletak dasar bagi penyatuan Korea. Presiden yang berkuasa setelah Kim Dae Jung berturut-turut adalah Roh Moo Hyun (2003-2008), Lee Myung Bak (2008-2013), Park Geun Hye (2013-2016), dan presiden saat ini Hwang Gyo-an.

C. Dinamika Politik Korea Utara

Berbeda dengan sistem politik demokrasi yang dianut Korea Selatan – meskipun dalam mencapainya perlu waktu yang sangat panjang, Korea Utara menganut sistem politik atau sistem pemerintahan otoriter/totaliter yang dikuasai oleh seorang diktator. Satu hal yang unik, Korea Utara menganut sistem dinasti yaitu kekuasaan diwariskan secara turun temurun. Dimulai dari Kim Il Sung kemudian dilanjutkan oleh putranya Kim Jong Il, dan yang terakhir (presiden saat ini yang menjabat dari 2011) adalah cucunya, yaitu Kim Jong Un.

Kim Il Sung merupakan presiden pertama Republik Rakyat Demokratik Korea. Kim Il Sung meletakkan komunisme sebagai dasar negara Korea Utara. Pemerintahannya terkesan kaku dan tertutup. Selama masa kekuasaannya kediktatoran Kim Il Sung menjadi semakin kuat. Untuk membangun kediktatoran dan pemujaan terhadap dirinya, Kim Il Sung memperkenalkan ideologi *chuch'e (juche)* pada tahun 1955 yang berarti otonom, independen atau percaya diri.



Gambar 4.2 Kim Il Sung

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Il-sung

Isi pokok ajaran *juche* yaitu *jaju* (merdeka di bidang politik), *jawi* (membela diri sendiri dalam pertahanan) dan *jarip* (swasembada dalam bidang ekonomi). Kim Il Sung mengklaim bahwa ide *juche* merupakan pemikiran komunis yang paling sesuai bagi karakteristik revolusi Korea (Tanzil, 1988: 82). *Juche* berfungsi sebagai pelindung partai dengan membenarkan tindakan partai yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Melalui ideologi *juche* Kim Il Sung menutup pintu negeri dari modal dan teknologi asing dengan alasan agar rakyat tidak mengalami perbudakan atau ketergantungan pada orang lain.

Kim melakukan pembersihan terhadap lawan-lawan politiknya atau orang-orang yang dianggap berbahaya, antara lain Jenderal Mu Chong yang dianggap gagal dalam upaya merebut Korea Selatan dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pak Hon-yong yang dituduh sebagai mata-mata Amerika. Menurut

laporan antara tahun 1956-1958 sekitar 5.500 orang partai ditahan dan dikirim ke pusat pendidikan ulang, sekitar 2.500 orang dihukum mati dan sekitar 60% pegawai pemerintah dan partai diganti karena tidak dapat dipercaya (Nahm, 1993: 257).

Pada tahun 1966 Kim Il Sung menghapuskan jabatan wakil ketua partai untuk memperbesar kekuasaan kursi ketua yang dijabatnya. Kim Il Sung menjadi presiden dan merangkap sebagai ketua partai yang kemudian disebut sebagai sekretaris jenderal. Pada tahun 1970-an Kim Il Sung menetapkan putranya, Kim Jong Il sebagai calon penggantinya. Setelah Kim Il Sung meninggal pada 8 Juli 1994, ia mendapat gelar '*the Great Leader*' sebagai presiden abadi (*eternal president*) negara tersebut. Hari kelahirannya dijadikan sebagai hari libur nasional. Struktur kekuasaan elit korea Utara adalah struktur nepotisme. Kaum kerabat Kim Il Sung menduduki jabatan penting tertentu dalam pemerintahan.



Gambar 4.3 Kim Jong Il

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kim_Jong-il

Kim Jong Il sejak 1994 menggantikan kedudukan ayahnya sebagai presiden dan merangkap jabatan sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea sampai dengan tahun 2011. Kim mendapat julukan *Dear Leader*. Pemerintahan Kim Jong Il tidak jauh berbeda dari ayahnya. Kediktatoran masih dipertahankan demi stabilitas pemerintahan komunis. Selama masa pemerintahannya banyak terjadi kesulitan ekonomi yang serius dan kelangkaan pangan. Keadaan pemerintahannya mulai stabil kembali setelah tahun 2000.

Korea Utara menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah adalah Front Demokratik untuk reunifikasi tanah air yang merupakan gabungan antara Partai Buruh (*Choson Rodong Dang*) dan dua partai kecil lainnya, yaitu Partai Demokrasi Korea (*Choson Michu Dang*) dan Partai Agama Chondogyo (*Chondogyo Chongwo Dang*). Pada kenyataannya Partai Buruh merupakan satu-satunya partai yang berkuasa secara mutlak. Partai menempati posisi tertinggi yang menguasai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Rakyat tidak memiliki hak untuk memilih pemerintahannya melalui pemilihan umum yang benar-benar bebas. Pemilihan delegasi untuk Majelis Rakyat Tertinggi (parlemen) ditunjuk oleh partai dan langsung diumumkan secara resmi.

Partai juga mengendalikan seluruh aspek kehidupan rakyat. Partai mengontrol semua media massa, komunikasi massa seperti sastra, seni, kebudayaan, pendidikan ilmiah dan kehidupan sosial. Kegiatan militer dan politik lainnya seperti keamanan, keselamatan umum, dan pasukan intelijen rahasia di bawah kontrol partai. Kim Il Sung menegaskan bahwa hukum Korea Utara dirancang untuk melaksanakan fungsi menegakkan kediktatoran proletariat dan dirancang untuk memraktekkan kebijakan partai sehingga hukum Korea Utara tidak dapat dipraktikkan tanpa kepemimpinan partai.

Dengan demikian, sistem politik Korea Utara merupakan gambaran dari kediktatoran komunis totaliter.

Politik luar negeri Korea Utara hanya terbatas pada negara-negara yang berideologi sama, yaitu Uni Soviet dan China. Hubungan dengan Soviet memburuk ketika Soviet membuka hubungan dengan Korea Selatan pada tahun 1990. Perubahan kebijakan Soviet ini menuai kecemasan keras dari Korea Utara. Menurut Kim Il Sung manuver Mokswa dimaksudkan untuk mengabadikan perpecahan di Semenanjung Korea (Sukma, 1992: 268). Namun demikian, Korea Utara tidak memiliki banyak pilihan akibat ketergantungan ekonomi, politik, dan militernya terhadap Uni Soviet sangat tinggi. Sementara itu China juga memiliki prinsip sendiri, yaitu mulai meningkatkan hubungan baik dengan Korea Selatan dan tetap mempertahankan hubungan baik dengan Korea Utara.

Pada tahun 1960-an Korea Utara merekonstruksi kebijakan militernya yaitu kemandirian melalui kemampuan pertahanan. Empat pedoman militer yang ditetapkan adalah menanamkan rasa kepemimpinan atau kekuatan kader dalam diri setiap prajurit, memodernisasi militer secara keseluruhan, mempersenjatai seluruh rakyat, dan mengubah semua wilayah menjadi benteng pertahanan. Korea Utara juga mengembangkan persenjataan nuklir. Motivasi Korea Utara berawal dari ancaman nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri Perang Korea. Tujuan utama program nuklir Korea Utara adalah untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman dari luar dan untuk memperbaiki status diplomatis Pyongyang di dunia internasional. Menurut Kim Il Sung, program senjata nuklir merupakan kunci untuk membuka semua pintu keinginannya dalam perundingan internasional.

Institute of Science and International Security memperkirakan bahwa Korea Utara memiliki 13-30 senjata nuklir, dan bisa mencapai 50 unit pada 2020 nanti. Pengembangan

teknologi nuklir Korea Utara sudah berlangsung sejak berakhirnya Perang Korea pada 1950. Korea Utara memiliki infrastruktur nuklir dasar atas bantuan Uni Soviet dan pada 1964 Soviet membantu Korea Utara mengembangkan reaktor pertamanya (*Nuclear Research Reactor*) di Yongbon yang awalnya digunakan untuk kebutuhan penelitian, medis, dan industri. Uni Soviet juga memberikan bantuan teknologi pemrosesan ulang plutonium. Korea Utara kemudian mengembangkan persenjataan dan memanggil pulang para ilmunya dari luar negeri.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an Korea Utara mulai mencari teknologi nuklir yang canggih dari Eropa karena saat itu belum ada pengawalan informasi nuklir yang mencukupi termasuk dengan mendatangi konferensi nuklir di Wina dan berbicara dengan ilmuwan Belgia yang merancang pabrik pemisahan plutonium. Pada 2003 dan 2004 menurut CIA atau ilmuwan AS menyebut Korea Utara sudah memiliki plutonium radioaktif dan pada 2006 Korea Utara melakukan uji nuklir pertamanya (BBC World – detiknews, Rabu 6 September 2017, 09:31).

Sumber dana program pembuatan senjata Korea berdasarkan sumber yang dihimpun badan intelijen AS bermacam-macam (BBC World – detiknews, Rabu 6 September 2017, 09:31). Badan Intelijen Pusat AS mencatat sekitar 75% (atau bahkan lebih)

dari perdagangan Korea Utara adalah dengan China. Korea Utara adalah negara pegunungan yang kaya dengan simpanan sumber daya alam termasuk batu bara, emas, perak, uranium, bijih besi, dan logam langka yang banyak dijual ke China dan Uni Soviet selama beberapa dekade sampai kejatuhan komunis. Logam langka digunakan dalam produksi ponsel, komputer, layar LCD, dan mobil.

Dana berikutnya diperoleh dari pekerja Korea Utara yang dikirim ke Rusia, China, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Tenggara. Puluhan ribu pekerja Korea Utara dikirim ke luar negeri

untuk bekerja di restoran, lokasi bangunan, petani sayur dan pembangunan monumen di Afrika. Ekonomi Korea Utara juga disokong oleh penjualan senjata di Asia, Afrika, dan Timur Tengah menurut laporan Panel Dewan Keamanan PBB. Ada kesepakatan ekspor antara Korea Utara dengan beberapa negara Afrika. Korea Utara juga memiliki industri narkoba yang besar dan juga dugaan kejahatan siber seperti pencurian atas US\$ 81 juta atau 1 triliun dari akun Bangladesh di New York Federal Reserve. Beberapa perusahaan China juga diduga membantu menyalurkan uang ke Korea Utara.

Pertahanan Korea Utara termasuk yang paling rapat di bumi, namun sistem tersebut sudah dimodifikasi dan ditingkatkan sampai ke tahap yang tidak diketahui dan kesiagaannya sulit dinalisis. Tentara Rakyat Korea Utara jumlahnya diperkirakan mencapai satu juta tentara biasa dan enam juta tentara cadangan dan paramiliter, memiliki kemampuan untuk melakukan pembalasan yang bisa menimbulkan kerusakan hebat terhadap Korea Selatan, sekutu utama AS. Korea Utara juga memiliki roket artileri konvensional dalam jumlah besar yang sebagian besar tertanam di zona demiliterisasi, dan ratusan roket bisa menjangkau Seoul (BBC World – detiknews, Rabu 6 September 2017, 09:31).

D. Upaya Reunifikasi Korea

Terpecahnya Korea menjadi dua sejak berakhirnya PD II memunculkan berbagai upaya untuk menyatukan kembali Korea sebagai bangsa yang bersatu. Korea Utara telah mengupayakan penyatuan Korea melalui jalan kekerasan yaitu dengan dilancarkannya Perang Korea (1950-1953) yang berakhir dengan gencatan senjata. Korea Selatan mengawali upaya penyatuan ini pada masa Park Chung Hee dengan menekankan sisi kemanusiaan. Pemerintah Seoul mengadakan dialog Palang Merah Utara-Selatan

untuk menyatukan keluarga yang terpisah pada tahun 1972. Namun Korea Utara memasukkan unsur politik yaitu desakan pencabutan UU anti komunis dan penarikan pasukan AS dari Korea Selatan. Akibatnya upaya ini mengalami kegagalan.

Pada era Chun Do Hwan pembicaraan puncak Utara-Selatan mulai digagas kembali untuk upaya penyatuan Korea. Sampai dengan tahun 1990 telah diselenggarakan 8 pertemuan pendahuluan sebelum dilaksanakan putaran pertama pembicaraan tingkat tinggi Utara-Selatan pada 4 September 1990 di Seoul. Selanjutnya, diadakan 8 putaran pertemuan tingkat tinggi yang menghasilkan persetujuan tentang perukunan kembali non agresif, pertukaran dan kerjasama, deklarasi bersama tentang penghapusan nuklir Semenanjung Korea dan perjanjian tentang sub komite pembicaraan tingkat tinggi Utara-Selatan (Fakta-fakta tentang Korea, 1993: 39).

Namun upaya pembicaraan terganjal dengan krisis nuklir pada tahun 1993. Korea Utara menolak inspeksi IEAE (Badan Tenaga Atom Internasional) dan menarik diri dari perjanjian tentang pencegahan penyebaran nuklir yang mengakibatkan ketegangan di semenanjung dan mengundang reaksi internasional. China berinisiatif untuk mengatasi krisis nuklir dengan melakukan diplomasi bersama-sama Korea Utara dan AS. Pada 11 Juni 1993 dihasilkan *Joint Statement* (Keputusan Bersama) yang berisi persetujuan Korea untuk menunda rencana keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT) yang berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas dan menerima pengamanan IAEA yang hanya dilaksanakan untuk aktifitas nuklir pasca 11 Juni 1993. Namun keputusan bersama itu gagal karena Korea Utara menyatakan keluar dari keanggotaan IAEA pada 13 Juni 1994.

Pada era Kim Dae Jung ditetapkan kebijakan Sinar Matahari (*Sunshine Policy*) dalam rangka untuk mengembangkan hubungan

yang baik dengan Korea Utara dan mengajak Korea Utara masuk dalam arena internasional. Akhirnya pada 14-16 Juni 2000 terselenggara pertemuan puncak antara Kim Dae Jung dan Kim Jong Il. Beberapa proyek diselenggarakan pasca pertemuan pertemuan puncak, yaitu (Mas'ood, 2005: 244-253):

1. Proyek mempertemukan keluarga terpisah, misalnya dalam tahun 2000 diselenggarakan 2 kali pertemuan dan didirikannya kantor dan tempat bertemu baik di Seoul maupun di Pyongyang.
2. Kerja sama dalam bidang ekonomi, misalnya menghubungkan kembali jalur kereta api antara Korea Utara dan Korea Selatan sekaligus menghubungkan urat nadi utama ekonomi Semenanjung Korea.
3. Kerja sama dalam bidang pertahanan, yaitu kesepakatan untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan saling percaya dilakukan misalnya dengan memasang sambungan telepon langsung untuk mencegah salah paham dan kesepakatan untuk mengumumkan bila masing-masing pihak akan mengadakan latihan kemiliteran.
4. Kerja sama dalam bidang sosial budaya, misalnya pertukaran dan kerjasama di bidang olah raga. Korea Utara dan Korea Selatan pernah membentuk tim tunggal dalam pertandingan sepak bola di Portugis tahun 1991 dan kejuaraan tenis meja di Jepang.

Usaha penyatuan banyak dipengaruhi oleh peran negara-negara besar yang memiliki kepentingan di Semenanjung Korea, seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan Jepang. Kepentingan Amerika Serikat terhadap Korea Utara antara lain: *pertama*, mengupayakan Korea Selatan tidak menjadi target kemarahan Korea Utara atas hal yang terjadi dengan Amerika Serikat. *Kedua*, menghentikan kepemilikan senjata nuklir Korea Utara dan

mencegahnya untuk mengembangkan, menguji coba, dan menjual misilnya kepada pihak lain. *Ketiga*, melarang kepemilikan senjata kimia dan biologi bagi Korea Utara. Kepentingan Amerika Serikat di Asia Timur adalah melindungi kepentingan keamanan dan ekonomi khususnya Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan kepentingan China antara lain mempertahankan rejim di Korea Utara, menjaga dan mengembangkan hubungan dengan Korea Selatan dan mengembangkan pengaruh dominan China di Semenanjung Korea. Sementara itu kepentingan Jepang terkait dengan kerjasama ekonomi antara Jepang dan Korea Utara. Jepang merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Korea Utara.



Gambar 4.4 Kim Jong Un dan tentara Korea Utara
Sumber: <https://www.nytimes.com/2017/11/04/>

Ketegangan yang terus terjadi akibat uji coba nuklir dan peluncuran artileri dari Korea Utara menyebabkan pada November 2010 Korea Selatan menyatakan bahwa kebijakan sinar matahari telah gagal dan diakhiri. Saat ini usaha ke arah penyatuan Korea

secara damai semakin sulit untuk diwujudkan. Meskipun Kim Jong Un menyerukan hubungan yang lebih baik dengan Korea Selatan tetapi Korea Utara terus melakukan kegiatan uji coba nuklir. Bahkan Korea Utara menggunakan nuklir sebagai bentuk ancaman, Korea Utara terus meningkatkan kekuatan nuklirnya secara kuantitas maupun kualitas. Pada 7 Maret 2013 Korea Utara mengancam akan melaksanakan serangan nuklir kepada Amerika Serikat.

BAB V

PERUBAHAN EKONOMI DI CHINA

A. Pendahuluan

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua keadaan sosial ekonomi di Asia Timur sangat buruk, terutama Jepang yang hancur karena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sementara itu sejak tahun 1945 di China terjadi perang saudara antara Partai Komunis China di bawah Mao Zedong dan Partai Nasionalis di bawah Chiang Kai Shek. Ekonomi China mengalami inflasi yang sangat tinggi. Keadaan di Korea juga tidak lebih baik, karena sejak menyerahnya Jepang kepada Sekutu, Korea kemudian justru terbagi menjadi dua yaitu Korea Utara yang berideologi komunis di bawah pengaruh Sovyet dan Korea Selatan yang berideologi liberalis di bawah pengaruh Amerika Serikat.

Namun demikian saat ini China, Jepang, dan Korea Selatan telah muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia yang sangat diperhitungkan. China bahkan menduduki posisi ekonomi kedua di dunia, diperkirakan akan dapat melampaui Amerika Serikat sebagai pemegang peringkat pertama ekonomi dunia. Perubahan besar dalam ekonomi China dimulai oleh Deng Xiao Ping melalui politik pintu terbuka yang diterapkannya.

B. Ekonomi China Era Mao Zedong

Republik Rakyat China merupakan negara terbesar ketiga di dunia dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta mil persegi. China juga merupakan sebuah negara yang berpenduduk paling padat di dunia. Sekitar 85% penduduknya tinggal di wilayah pedesaan dan 90% nya menempati seperenam wilayah China. Dari seluruh luas wilayah China, hanya 15% tanahnya yang cocok untuk pertanian. Kebutuhan-kebutuhan pangan yang semakin meningkat menimbulkan masalah-masalah ekonomi.

Ketika Mao Zedong memproklamkan negara Republik Rakyat China pada tanggal 1 Oktober 1949, perekonomian China berada pada keadaan yang buruk. Perang China – Jepang dan perang saudara menimbulkan inflasi mencapai 85.000% sehingga harga-harga barang naik (Wibowo, 2000: 36). Oleh sebab itu, selama beberapa tahun pertama kaum komunis memusatkan perhatian pada perbaikan pabrik-pabrik, produksi, dan fasilitas-fasilitas transportasi serta mengendalikan inflasi dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Sejak berdirinya, RRC banyak meniru model Uni Soviet. RRC memperoleh bantuan dari Soviet sejak perjanjian persahabatan tahun 1950 untuk memperbaiki ekonomi China. Berikut ini berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pada masa pemerintahan Mao Zedong:

1. Reformasi Agraria

Program pembaruan agraria di China telah berlangsung sejak tahun 1927, ketika kekuatan komunis telah menguasai beberapa wilayah di Cina yang masih berada di bawah kekuasaan Kuomintang. Ada dua alasan untuk reformasi ini, yaitu menghancurkan kelas bangsawan tuan tanah untuk menghilangkan

potensi ancaman kontra dan mendirikan pusat kekuasaan politik komunis di wilayah pedesaan (Ririn Darini, 2010: 24).

Kebijakan *landreform* di China berlandaskan pada peraturan 28 Juni 1950 mengenai hukum penertiban tanah. Pada saat itu penduduk China dibagi menjadi tuan tanah (pemilik banyak tanah tetapi tidak menggarapnya sendiri), petani kaya (pemilik tanah/lintah darat), petani menengah (pemilik tanah yang menggarapnya sendiri), dan petani miskin. Pembaruan agraria di Cina merupakan proses yang unik, karena dilakukan melalui upaya *trial and error* dan tidak mencontoh model pembaruan agraria di negara lain.

Masyarakat agraris China dibagi dalam lima kelompok, yaitu:

1. Tuan tanah (*landlords*) yaitu mereka yang memiliki tanah luas tetapi tidak mengerjakannya sendiri dan hidup dengan mengeksploitasi tenaga orang lain.
2. Petani kaya (*rich peasants*) yaitu mereka yang memiliki tanah tetapi tanah tersebut dikerjakan sendiri, terkadang mempekerjakan orang lain atau menyewakan tanahnya kepada petani miskin.
3. Petani kelas menengah (*middle peasants*), petani yang mengerjakan tanahnya sendiri tanpa bantuan orang lain.
4. Petani miskin (*poor peasants*) yang hanya memiliki tanah sempit atau menyewa tanah dari orang lain.
5. Orang yang tidak memiliki tanah dimana mereka harus menjual tenaganya dengan mengolah tanah orang lain.

Dalam realitasnya, slogan "tanah untuk penggarap" telah membangkitkan sisi keserakahan para petani yang tidak memiliki sawah, mendorong mereka untuk merampas dengan kekerasan dan tanpa mempertimbangkan dampak moral yang diakibatkan oleh tindakan mereka. Lebih dari 20 juta penduduk desa di seluruh Tiongkok dikategorikan sebagai 'tuan tanah, petani kaya, kaum

pembangkok atau elemen buruk'. Mereka menjadi kelas terendah dalam masyarakat Tiongkok. Program *landreform* dilaksanakan dengan penuh kekerasan. Meskipun menurut teori dan secara prinsip Komunis menentang penyiksaan, tetapi para pejabatnya diperintahkan untuk tidak campur tangan bila para petani ingin melampiaskan kemarahan mereka dengan tindakan balas dendam yang kejam (Jung Chang, Jon Halliday, 2007: 410-415).

2. Gerakan Tiga Anti dan Lima Anti

Kampanye untuk menekan kaum kontrarevolusioner juga diberlakukan untuk menumpas semua kejahatan non politik seperti, perbanditan, pembunuhan, perampokan, perjudian, perdagangan narkoba, dan pelacuran. Di samping itu rezim komunis juga melakukan kontrol ketat atas harta negara. Pada akhir tahun 1951 dilaksanakan kampanye atau gerakan 3 anti.

Gerakan Tiga Anti (*San Fan*) merupakan gerakan anti pencurian, pemborosan dan birokratisme. *Sanfan* merupakan kampanye melawan korupsi dan inefisiensi birokrasi. Gerakan ini terutama ditujukan kepada kader-kader kota yang korup, lebih-lebih yang berkecimpung di departemen keuangan dan ekonomi. Tujuannya untuk menakut-nakuti siapa saja yang mempunyai akses ke uang pemerintah agar tidak korup. Pertemuan massa untuk mengkritik pejabat yang korup atau menindas merupakan teknik khas politik Maois. Hasilnya kurang dari 5% pejabat administrasi dikenai hukuman formal, ada yang dipenjara, tetapi kebanyakan hanya diberhentikan atau diturunkan jabatannya.

Pada bulan Januari 1952 diberlakukan Gerakan Lima Anti (*wu fan*) ditujukan kepada golongan masyarakat yang lebih luas terutama kaum kapitalis, pengusaha-pengusaha swasta yang propertinya belum disita untuk memaksa mereka mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar dan menakuti mereka dengan

tuduhan melakukan suap dan menghindari pajak. Gerakan ini ditujukan untuk menumpas lima macam kejahatan: suap menyuap, tidak membayar pajak, pencurian uang negara, menipu kontrak dengan pemerintah, dan mencuri informasi ekonomi milik negara. Lebih dari 450.000 perusahaan secara resmi diselidiki oleh negara (Meisner, 1998: 87). Ideologi di balik kampanye ini adalah mengikis habis golongan kontra revolusi dan untuk mengonsolidasikan kekuasaan komunis di kota-kota. Gerakan ini menandai awal dari akhir era demokrasi baru. Pada awal 1953 administrasi sipil, ekonomi, dan lembaga-lembaga pendidikan di perkotaan China dengan tegas berada di bawah kontrol partai dan diarahkan secara terpusat. Rezim baru otoriter dan represif tetapi kota-kota diatur secara jujur dan efisien untuk pertama kalinya dalam sejarah China modern.

3. Sentralisasi Pajak

Pada tahun 1950 pemerintah menetapkan bahwa pajak pertanian, pajak komoditi dan berbagai macam pajak industri dan komersial harus diserahkan kepada pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak lagi diberi kekuasaan untuk mengeluarkan pendapatan yang diperoleh dari pajak. Sejak 1928 Pemerintah Nasionalis memang tidak dapat mengendalikan pemerintah daerah dalam menarik pajak. Sejak adanya sentralisasi pajak pendapatan pemerintah mengalami kenaikan yang berarti, dari 6,5 milyar yuan pada tahun 1950 menjadi 13,3 milyar pada tahun 1951 (I Wibowo, 2000: 51). Mobilisasi sumber daya keuangan ini amat vital untuk pembiayaan baik militer maupun birokrasi.

4. Repelita Pertama (1953-1957)

Sejak awal berdirinya, Republik Rakyat China telah banyak meniru model Uni Soviet. Pemerintah Mao mencanangkan program

rencana pembangunan lima tahun I (repelita) tahun 1953-1957 dan dalam periode ini juga terdapat kecenderungan mengurangi tindakan kekerasan dalam kehidupan politik. Pada tahun 1953 industrialisasi dan repelita pada dasarnya merupakan rencana untuk pengembangan industri berat. Pada saat yang sama partai komunis juga mengumumkan awal transisi China untuk sosialisme.

Selain pertimbangan ideologis, Uni Soviet dijadikan model karena keberhasilan Uni Soviet setelah Perang Dunia II dalam menjalankan strategi pembangunan yang menekankan pembangunan industri berat. Uni Soviet juga merupakan satu-satunya negara yang memberikan pinjaman modal kepada China. Bantuan ekonomi dan teknisi Soviet mulai mengalir ke China dengan penandatanganan perjanjian persahabatan, aliansi dan mutual Sino-Soviet pada bulan Februari 1950. Uni Soviet membantu 156 proyek. Bantuan yang diberikan meliputi modal, bidang teknis dan desain, nasehat mengenai konstruksi, dan bantuan mesin.

Untuk mengendalikan sumber-sumber daya ekonomi yang diperlukan bagi investasi industri secara besar-besaran, para pemimpin dengan cepat menciptakan program ekonomi terencana dan terpusat, termasuk pertanian. Pada akhir tahun 1956 semua pemilikan pertanian dimasukkan dalam sistem kolektif, dan sosialisasi ekonomi telah dirampungkan. Hasil-hasil ekonomi dari usaha-usaha repelita I begitu mengesankan, perkiraan yang ada menempatkan China dalam ranking internasional yang tinggi dalam hal pertumbuhan ekonomi selama periode ini.

Antara 1952 dan 1957 industri China tumbuh dengan kecepatan yang melebihi 14,7% dari rencana yang ditetapkan. Total *output* industri China meningkat dua kali lipat. Produksi baja meningkat dari 1,31 juta metrik ton pada tahun 1952 menjadi 4,48 juta pada tahun 1957; semen dari 2,86 juta menjadi 6,86 juta; besi dari 1,9 juta menjadi 5,9 juta; batu bara dari 66 juta menjadi 130

juta; dan daya listrik dari 7,26 milyar kilowatt per jam menjadi 19,34 milyar. China juga untuk pertama kalinya memproduksi sejumlah truk, traktor, pesawat jet, dan kapal dagang. Dalam hal ini China terbukti menjadi murid yang baik dari model Soviet dengan pertumbuhan produksi yang lebih cepat dari industri Rusia selama Repelita Pertama Soviet tahun 1928-1932 (Meisner, 1998: 111).

Keberhasilan paling penting selama masa kekuasaan Mao adalah keberhasilannya memperbaiki sistem persediaan air di China. Selama pemerintahannya dilakukan pembangunan dam, kanal, waduk, akuaduk, saluran-saluran kecil, selokan, dan sistem pompa dalam jumlah yang begitu banyak sehingga sebagian besar daerah di negeri itu dapat bertahan dari kekeringan yang berkepanjangan tanpa bantuan darurat.

5. Nasionalisasi Perusahaan

Pada bulan Juli 1955 Mao memerintahkan dipercepatnya pembukaan lahan-lahan pertanian kolektif dan bulan November mengumumkan bahwa semua industri dan perdagangan yang selama ini ditangani swasta harus dinasionalisasi. Teorinya: negara adalah pemilik perusahaan yang bekerja sama dengan mantan pemilik perusahaan terkait yang selama 20 tahun ke depan hanya boleh memiliki 5% dari nilai perusahaan mereka. Para bekas pemilik perusahaan tetap bekerja sebagai manager dan digaji cukup tinggi, tetapi di atas mereka ada seorang pejabat partai.

Di setiap perusahaan dibentuk sebuah kelompok yang terdiri atas anggota-anggota tim kerja, wakil-wakil pekerja dan wakil-wakil manajemen. Mereka bertugas menilai aset perusahaan terkait agar negara bisa membelinya dengan harga pantas. Tim tersebut sering mengusulkan harga yang sangat rendah untuk menyenangkan negara.

6. Gerakan Lompatan Jauh ke Depan (*Great Leap Forward*)

Mao ingin mewujudkan China menjadi kekuatan modern kelas satu di mata dunia. Metode dan strategi pembangunan diubah melalui Gerakan Lompatan Jauh ke Depan. Mao mencanangkan kampanye ini pada bulan Mei 1958, tujuannya membangkitkan ekonomi China melalui industrialisasi secara besar-besaran dan memanfaatkan jumlah tenaga kerja murah. Kepada rakyat disampaikan bahwa sasaran dari kampanye ini adalah mengungguli semua negara kapitalis dalam waktu singkat dan menjadi salah satu negara paling kaya, paling maju, dan paling berkuasa di seluruh dunia. Program industrialisasi tersebut akan dicapai dalam waktu sepuluh sampai lima belas tahun. Mao menyebut baja sebagai pilar industri dan memerintahkan untuk meningkatkan produksi baja dua kali lipat dalam waktu satu tahun, dari 5,35 juta ton pada tahun 1957 menjadi 10,7 juta ton pada tahun 1958. Slogan Lompatan Jauh ke Depan adalah 'berjalan di atas 2 kaki' dan 'kemandirian pembangunan bersama industri dan pertanian' mencerminkan penerapan teknologi ganda: teknologi modern dan tradisional. Untuk mengembangkan industri baja tersebut Mao tidak mempekerjakan tenaga ahli, tetapi Mao memutuskan untuk menggerakkan seluruh rakyat untuk berpartisipasi dalam gerakan lompatan jauh ke depan. Para ahli yang mencoba berbicara dengan akal sehat dihukum mati. Menteri Pertahanan Peng De Huai mengkritik apa yang terjadi dalam Lompatan Jauh ke Depan dan merekomendasikan pendekatan realistik dalam bidang ekonomi. Peng kemudian dianggap sebagai orang kanan yang oportunist, Mao menyebutnya sebagai kaki tangan kapitalis. Peng dipecat sebagai Menteri Pertahanan, dihukum tahanan rumah dan dikirim ke Sichuan untuk dipensiun dini sebagai pejabat rendah.

Dalam program ini Mao mengesampingkan rasionalitas. Pabrik baja dan industri terkait seperti tambang batu bara

diperintahkan bekerja habis-habisan untuk untuk memperbesar produksi. Pabrik-pabrik tersebut tidak mampu mencapai target seperti yang ditetapkan Mao, sehingga Mao memerintahkan untuk membangun tanur rakyat. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan semua benda logam yang mereka miliki, seperti alat-alat pertanian, alat masak-memasak, pegangan pintu, tempat tidur besi, dan sebagainya, untuk dicairkan dan dilelehkan. Gunung-gunung digunduli, pohon-pohon ditebang untuk dijadikan kayu bakar. Bagi setiap unit diberikan kuota produksi baja, akibatnya masyarakat banyak menghentikan kegiatan rutin mereka selama berbulan-bulan hanya untuk memenuhi kuota (John Halliday).

Pada tahun 1958 juga diumumkan berdirinya Komune Rakyat (*renmin gongshe*), yaitu wadah kolektivitas produksi pertanian dengan skala besar. Seluruh China dikelompokkan menjadi unit-unit baru, masing-masing terdiri atas 2.000 – 20.000 rumah tangga. Dengan sistem ini rakyat menjadi lebih mudah dikendalikan karena petani harus hidup dalam suatu sistem yang diorganisir dan tidak dibiarkan berinisiatif sendiri.

Warga komune harus tetap tinggal di komune masing-masing artinya setiap orang harus mendaftarkan tempat tinggalnya. Untuk kepentingan ini maka dikeluarkan sistem 'kartu tanda identitas' atau *hukou*. Hanya mereka yang terdaftar sebagai penduduk mendapat jatah makanan. Mereka berada di bawah pengawasan kader-kader yang dikoordinir oleh Komite Partai dan partai cabang. Tujuannya agar petani menghasilkan surplus pertanian untuk mendukung industrialisasi. Pada masa lompatan jauh ke depan petani kehilangan hak atas sawahnya. Sawah dikerjakan bersama menurut rencana yang ditetapkan dari pusat. Petani bekerja tetapi tidak mempunyai kontrol atas hasil kerjanya. Komunelah yang menetapkan besarnya konsumsi mereka dan surplus hasil pertanian dikirimkan ke kota.

Mao menjejalkan aneka slogan. Para petani harus “menggali lebih dalam” untuk meningkatkan hasil. Ladang-ladang harus bebas dari “empat makhluk jahat” yaitu burung, tikus, serangga, dan lalat. Maka sepanjang tahun 1958-1960 jutaan serangga, tikus, lalat, dan burung dibantai. Upaya tersebut ternyata mengalami kegagalan. Para petani yang menggali lebih dalam belum sempat memetik hasil ketika mereka jatuh kelelahan. Punahnya burung berdampak pada terganggunya keseimbangan alam sehingga belakangan burung dikeluarkan dari daftar “empat makhluk jahat”.

Pada tahun 1958 diadakan perlombaan antar kelompok pertanian di seluruh China. Kelompok yang berprestasi terbesar dianggap sebagai komunis teladan. Akibatnya setiap kelompok bersumpah untuk menghasilkan panen melebihi hasil ketetapan, dan pada panen berikutnya mereka mengumumkan penghasilan yang lebih. Padahal angka ini sebenarnya angka-angka palsu. Akibat perhitungan palsu tersebut maka Partai Komunis beranggapan bahwa persediaan gandum dan beras telah melebihi batas, sehingga ke depan China harus mengedepankan mata pencaharian lainnya. Puluhan juta petani dikerahkan untuk pembangunan prasarana, jam kerja pabrik dilipatgandakan, bahkan mesin tidak boleh dimatikan meski hanya untuk perawatan.

Petani harus bekerja lebih keras dan jauh lebih lama dari sebelumnya. Mao mengerahkan tenaga dalam jumlah yang sangat besar untuk membangun jaringan irigasi yang meliputi bendungan, waduk, dan kanal. Dalam waktu empat tahun sejak 1958 diperkirakan hampir seratus juta petani diperintahkan meninggalkan pekerjaan di tanah pertanian untuk bekerja dalam proyek-proyek itu. Proyek-proyek besar tersebut dikerjakan dengan peralatan yang seadanya, sehingga dalam pembangunannya banyak proyek yang berhenti di tengah jalan. Pembangunan tersebut juga memakan korban para petani dalam jumlah yang besar. Padahal

para petani tersebut merupakan tenaga kerja yang memproduksi bahan pangan dalam jumlah besar di desa-desa. Lompatan jauh ke depan mengakibatkan salah satu bencana ekonomi yang terbesar pada abad ke-20.

Tahun 1960-an bencana kelaparan meluas ke seluruh China. Banyak orang terserang busung lapar, kebanyakan adalah kaum petani. Di pedesaan bencana kelaparan lebih parah karena mereka tidak mendapat ransum bahan makanan. Kebijakan pemerintah adalah mendahulukan orang kota. Para pemimpin komune menyita beras dari para petani. Di banyak daerah petani yang berani menyembunyikan bahan pangan ditangkap, dipukuli dan disiksa. Akibatnya di seluruh Cina berjuta-juta petani yang seharusnya menjadi tulang punggung produksi bahan makanan mati kelaparan. Pemerintah Beijing mengumumkan program ini menyebabkan kematian tidak wajar sekitar 21 juta orang lebih. Lembaga-lembaga non pemerintah lainnya juga mengeluarkan statistik yang tidak jauh berbeda, sekitar 20 juta orang lebih meninggal karena kelaparan.

Di awal tahun 1961, kematian puluhan juta rakyat akhirnya memaksa Mao menghentikan kebijakan-kebijakan ekonominya. Mao melepaskan jabatannya sebagai presiden RRC dan memberikan kekuasaan lebih besar atas China pada Presiden Liu yang pragmatis dan Deng Xiaoping, sekjen partai.

C. Kebijakan Ekonomi Deng Xiao Ping

Saat ini RRC yang kaya akan tenaga kerja, sumber daya alam, dan bahan baku industri menjadi sasaran investasi besar-besaran dari Jepang, Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat, dan negara-negara dari seluruh dunia. Teknologi industri China termasuk dalam jajaran negara-negara besar dunia, mulai dari teknologi nuklir, roket, tekstil, otomotif, obat-obatan herbal, bahkan saat ini juga mulai mengembangkan industri pesawat terbang sipil

dan militer, dan kereta api super cepat (*Bullet Train*). Di bawah pemerintahan Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao, Cina memiliki pendapatan nasional bruto 1.290 USD dengan pertumbuhan ekonomi 9-10% per tahun. Pertumbuhan ekonomi ini dimulai ketika Deng Xiao Ping mengeluarkan kebijakan reformasi ekonomi di RRC.

Reformasi ekonomi pada tahun 1978 telah menjadikan China sebagai salah satu negara tujuan terbesar FDI (*Foreign Direct Investment*) dunia dan juga memiliki hubungan yang penting di dalam rantai persediaan dunia. China saat ini menjadi penghasil TV dan semen terbesar di dunia. Pada tahun 1998 China menduduki tempat tertinggi di dunia sebagai produsen pupuk buatan dan baja. Selanjutnya, perlahan tetapi pasti China menjadi penghasil banyak barang elektronik: ponsel, TV, komputer yang memasuki peringkat atas dunia. China mengalami perubahan dari sebuah negara yang terpuruk ekonominya menjadi negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dari tahun ke tahun GDP China mulai terlihat peningkatannya.

Perkembangan modernisasi dan reformasi China dimulai dengan naiknya Deng Xiao Ping ke tampuk pimpinan China pada tahun 1978 menggantikan Hua Guo Feng. Bagi Deng, tujuan pembangunan ekonomi China adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Deng Xiao Ping melihat pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangga terutama Jepang dan Korea Selatan lebih maju dibandingkan dengan RRC, sehingga memberi inspirasi bagi Deng untuk merekomendasikan perombakan tata ekonomi China. Kemenangan kubu Deng Xiao Ping membuka jalan bagi kebijakan ekonomi politik baru yang bercirikan ditinggalkannya ekonomi yang terpusat dan ketat. Pada Kongres Nasional Partai Komunis China ke-14 tahun 1992, dengan jelas ditekankan bahwa China secara resmi beralih dari perekonomian

dengan perencanaan terpusat menjadi perekonomian yang diatur berdasarkan mekanisme pasar.

Pertumbuhan ekonomi ini dimulai ketika Deng mengeluarkan kebijakan perombakan tata ekonomi China yang dituangkan dalam gagasan modernisasi empat bidang. Keempat bidang ini meliputi bidang pertanian, industri, iptek, dan militer (pertahanan keamanan). Modernisasi empat bidang dijadikan sebagai konstitusi partai sehingga akan tetap dijalankan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Adapun tujuan Modernisasi Empat Bidang adalah meningkatkan nilai per kapita dari 200 US\$ menjadi 1.000 US\$ pada akhir abad ke-20 (Sukisman, 1993: 144). Kegiatan di bidang ekonomi yang sebelumnya bergantung pada perencanaan dan kontrol pemerintah, maka pada era Deng peranan ekonomi pasar mulai diakui.

Slogan yang dikeluarkan oleh Deng Xiao Ping menjadi sangat terkenal dalam upayanya menumbuhkan ekonomi di China. Slogan tersebut adalah "Menjadi kaya itu mulia." Dengan menjadi kaya seseorang bisa memberi kontribusi untuk kemajuan pihak lain dan juga menjadi inspirasi pihak lain untuk meniru yang kaya itu.

China membangun dengan perencanaan jauh ke depan yang sangat matang. Dengan adanya potensi ekonomi yang ada, China berupaya membangun fondasi untuk menjadi raksasa ekonomi dunia. Dengan dukungan para pemimpin politik, di China mulai diberlakukan sistem ekonomi terbuka menggantikan sistem ekonomi tirai bambu yang tertutup dan telah membuat lebih dari satu milyar penduduk di negeri itu menjadi sangat miskin dan terisolasi dari pergaulan dunia. Secara umum tujuan politik pintu terbuka antara lain :

1. Menarik investasi asing ke China untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi China.
2. Menarik masuknya teknologi asing sehingga mampu mendorong pengembangan teknologi dalam negeri.
3. Menarik masuknya metode manajemen asing yang efektif dan efisien agar dapat diserap oleh manajemen lokal.
4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja China.
5. Meningkatkan devisa lewat masuknya investasi asing yang akan meningkatkan ekspor kawasan tersebut.

Pemerintah RRC mulai membuka diri dengan menarik penanaman modal asing. Untuk mewujudkannya, pada 1980 Deng mendirikan empat zona ekonomi spesial (*Special Economic Zones*) yang menawarkan infrastruktur baru, bebas pajak, dan menawarkan berbagai kemudahan bagi investor asing. Pemerintah membangun berbagai macam fasilitas seperti kompleks industri, kompleks bisnis, kompleks pertokoan, dan kompleks rekreasi. Di samping itu pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jaringan jalan raya, sarana telekomunikasi dan informasi terus dikembangkan. Wilayah yang dipilih adalah Zhuhai, Shantao dan Shenzen di Provinsi Guangdong serta Xiamen di Provinsi Fujian. Salah satu tujuan pembukaan pelabuhan di wilayah tersebut adalah sebagai jembatan bagi masuknya modal asing dan transfer teknologi mutakhir.

Empat zona ekonomi baru itu berada di sepanjang pantai selatan China. Deng menyadari bahwa bila China hanya mengandalkan Shanghai sebagai pusat atau motor pertumbuhan maka perekonomian China hanya akan terpusat di wilayah utara. Empat zona ekonomi khusus itu sekaligus berfungsi sebagai pintu ekspor impor baru bagi negeri itu. Pada April 1988, Hainan yang

sebelumnya bagian dari Provinsi Guangdong dimekarkan menjadi Provinsi sendiri dimasukkan ke zona ekonomi khusus. Di wilayah ini terdapat lebih dari 3.000 perusahaan asing (I Wibowo, 2004).

Tanggal 4 Mei 1984, 14 kota pelabuhan dibuka secara resmi sebagai eksperimen berikutnya dari pemerintah China untuk mensukseskan modernisasi. Kota pantai tersebut dari utara ke selatan berturut-turut sebagai berikut: Tianjin, Shanghai, Dalian (Provinsi Liaoning), Qinhuangdao (Provinsi Hebei), Yantai, Qingdao (Provinsi Shandong), Lianyungan, Nanton (Provinsi Jiangsu), Ningbo, Wenzhou (Provinsi Zhejiang), Fuzhou (Provinsi Fujian), Guangzhou, Zhanjiang (Provinsi Guangdong), dan Beihai (Daerah Otonom Guangxi Zhuang). Ke-14 kota ini tidak diberi status zona ekonomi khusus (Bagus Darmawan, 2006: 52). Zona pembangunan ekonomi dan teknologi ada di kota-kota di pesisir timur. Pada tahun 1993 tercatat ada 19 wilayah yang dibuka bagi investor asing. Berbeda dari zona ekonomi khusus, zona pembangunan ini masih menjadi bagian sebuah kota tetapi dikhususkan untuk investor asing. Di tempat ini mereka memperoleh *tax reduction* maupun *tax exemption*. Di tempat inilah investor asing berbondong-bondong datang memanfaatkan sumber daya alam maupun tenaga manusia yang melimpah (I Wibowo, 2004)

Dalam tempo 10 sampai 15 tahun, Provinsi Guangdong mampu menaikkan rata-rata pendapatan per kapita dari sekitar 150 dollar AS di tahun 1979 menjadi lebih dari 1.000 dollar AS dan di tahun 2000-an menjadi lebih dari 3.000 dollar AS per tahun. Pusat pertumbuhan baru Guangdong (dekat Hongkong) dalam waktu tujuh tahun (1983–1989) setelah pemimpin Deng mencanangkan kebijakan baru itu mampu menyerap investasi 12,2 miliar dollar AS, jauh di atas angka investasi yang diserap Shanghai dalam periode yang sama, yaitu 2,66 miliar dollar AS (Fredy Roeroe, 2005: 31).

Bagi RRC orang-orang keturunan China menjadi sumber terbesar masuknya FDI yang berdatangan dari berbagai penjuru. Sebaliknya bisnis orang-orang keturunan China mudah masuk ke RRC karena memiliki latar belakang karakteristik struktural yang sama dan berlaku umumnya di negara-negara seperti Taiwan dan Hongkong yang menjadi salah satu pusat keuangan dunia. Ciri bisnis mereka ditandai sebagai milik keluarga, sangat mengandalkan *guanxi* (koneksi), konservatif, dan mengonsentrasikan modalnya di sektor-sektor tradisional seperti *real estate* dan properti, perbankan, serta industri perhotelan (Bagus Dharmawan, 2006).

Di sektor industri, selain membuka zona ekonomi khusus, Pemerintah China melakukan alih teknologi melalui sistem *joint venture* dan *counter trade* (imbal dagang). *Joint venture* merupakan bisnis patungan yang kooperatif antara negara komunis dan kapitalis, pertama kali dilakukan oleh Yugoslavia. Pada tahun 1979 Pemerintah Komunis China mengadopsi Undang-undang *Joint Venture* yang berisi:

1. Perlindungan pemerintah terhadap *joint venture* perusahaan China dengan investasi asing.
2. Pernyataan pihak asing bahwa teknologi yang didatangkan dari luar negeri benar-benar mutakhir dan sesuai dengan keperluan China.
3. Jaminan hak milik pihak asing atas laba setelah dipotong pajak.

Nilai perbandingan dalam kepemilikan *joint venture* adalah 51:49 antara Pemerintah China dengan pihak asing. Sejak tahun 1979 lebih dari dua ribu perjanjian *joint venture* ditandatangani, tetapi banyak yang tidak terealisasi. Investasi asing kebanyakan berasal dari Jepang, AS, Prancis, Jerman Barat, Australia, dan Swiss.

Cara lain untuk meningkatkan investasi asing dan alih teknologi di China adalah melalui *Counter Trade* atau imbal dagang.

Teknik *counter trade* sebagai berikut: misalnya China mengimpor peralatan untuk mengolah hasil tambang batu bara yang dimilikinya. Pembayaran peralatan tersebut ditunda sampai hasil pengolahan batu bara terjual. Dengan demikian, China dapat menjaga cadangan devisanya. Hal ini merupakan cara yang ampuh untuk mengurangi defisit perdagangan luar negeri (James Wang, 1992: 132).

Reformasi ekonomi dilakukan pada sektor pertanian. Pada tahun 1978, Deng kembali menghidupkan sistem insentif Liu Shaoqi yang diperkenalkan pada tahun 1960-an. Kebijakan ini termasuk pasar bebas, kepemilikan tanah pribadi, dan tanggung jawab petani dalam mengatur tanah pertanian mereka sendiri menurut kontrak penetapan kuota keluarga setiap rumah tangga. Pemerintahan Deng menghapuskan sistem komune rakyat dan brigade produksi, kemudian diganti dengan pemerintahan administrasi setempat melalui sistem tanggung jawab (*Zerenshi*). Selama tiga tahun pertama modernisasi dilaksanakan di wilayah pedesaan, menyebabkan 800 juta petani mengalami perubahan hidup. Selama periode Mao, eksploitasi negara di pedesaan telah menjadi sumber utama akumulasi modal (Maurice Meisner, 1999: 460). Misalnya pada masa Lompatan Jauh ke Depan pemerintah dengan keras mengontrol politik, produksi, dan pemerintahan setempat. Artinya petani tidak mempunyai apapun, semuanya diserahkan kepada negara. Para petani bekerja di sawah, tetapi mereka tidak mempunyai kontrol atas hasil kerjanya. Keadaan ini kemudian berubah. Petani tidak lagi terikat oleh rencana negara dalam berproduksi. Petani menggarap sawahnya dengan sebuah kontrak, dan setelah kontrak itu terpenuhi petani bebas memanfaatkan kelebihan dari kontrak itu. Misalnya, mereka dapat menjualnya ke pasar bebas dengan harga yang ditetapkan oleh pasar. Dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan baru ini sungguh luar biasa. Dalam

waktu singkat (1978-1980) pendapatan bersih rata-rata per kapita petani naik dari 133,57 yuan menjadi 223,44 yuan. Pada tahun 1998 naik menjadi 2161,98 yuan. Kenaikan dalam pendapatan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kenaikan pendapatan mendorong terjadinya *saving* yang kemudian dapat diinvestasikan dalam industri. Bangkitnya industri di pedesaan akan menghasilkan *return* yang tinggi. Pendapatan yang tinggi dengan sendirinya menyediakan pasar bagi produk industri pedesaan, sehingga ekonomi pedesaan dapat dengan cepat bertumbuh (I Wibowo, 2000: 241).

Indikator perubahan ini juga terlihat pada pola atau gaya hidup masyarakat pedesaan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa para petani China sekarang berpakaian lebih bagus, makan lebih baik, membangun rumah lebih indah bahkan bertingkat. TV berwarna tidak lagi dipandang sebagai barang mewah, demikian juga dengan mesin cuci dan kulkas.

Namun demikian, pembaruan di sektor pertanian bukan tanpa masalah. Secara administrasi, sistem tanggung jawab memunculkan ketegangan-ketegangan baru. Kader-kader pedesaan yang mendominasi sistem pertanian kolektif, dan yang pendapatannya didasarkan pada nilai-nilai kerja yang membutuhkan peran kepemimpinan mereka, melihat bahwa rumah tangga non partai dapat menghasilkan lebih banyak uang dari mereka. Terlebih, proses negosiasi kontrak pada level tim produksi dapat menimbulkan konflik yang lebih intens antara kepala rumah tangga yang menghargai produktivitas relatif dari berbagai pecahan tanah yang berbeda dan tahu yang diperlukan dan siapa yang tidak diuntungkan. Masalah lain adalah rumah tangga dapat meningkatkan pendapatannya dengan bekerja lebih, sehingga nilai-nilai untuk memiliki lebih banyak anak mulai lenyap.

BAB VI

KEBANGKITAN EKONOMI JEPANG

A. Pendahuluan

Pencapaian paling spektakuler Jepang pasca PD II adalah pemulihan ekonomi yang sangat fenomenal. Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat Jepang mampu bangkit sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan oleh masyarakat dunia dan bahkan menjadi negara industri terkemuka di dunia. Pemulihan ekonomi Jepang merupakan salah satu keajaiban dari periode setelah perang. Faktanya, Jepang tidak perlu waktu yang lama untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca PD II. Dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan cerita sukses yang luar biasa dari sejarah ekonomi dunia. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Jepang sampai ke PD II diperkirakan 4 - 5 %. Setelah perang rata-rata pertumbuhannya naik menjadi 9% di tahun 1950 an dan 12 % di tahun 1960 an.

Keberhasilan Jepang mencapai kebangkitan ekonomi tidak terlepas dari karakter orang Jepang antara lain suka bekerja keras, tidak mau dikalahkan oleh keadaan, dan kepandaiannya dalam memanfaatkan kesempatan yang timbul. Perkembangan ekonomi ini juga tidak terlepas dari intervensi-intervensi negara asing yang ikut memengaruhi sistem ekonomi Jepang yang berhaluan kapitalis, khususnya Amerika Serikat, dan tentu saja peran dari pemerintah

Jepang dalam merencanakan dan mengembangkan kegiatan industri dan perdagangan.

Sistem ekonomi Jepang juga menunjukkan ketahanan ekonomi yang tinggi, artinya bahwa sistem tersebut tidak sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tetapi juga memperhatikan kestabilan masyarakatnya. Ekonomi Jepang tidak mudah dipenetrasi dari luar, dan justru sebaliknya sangat agresif keluar. Dalam perekonomian dunia Jepang mengambil berbagai tindakan untuk meliberalisasikan pasarnya. Jepang menjadi anggota GATT (Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan) dan OECD (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi) yang bertekad mempertahankan perdagangan bebas.

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan industri di Jepang antara lain (Sayidiman, 1987:89)

1. Strategi yang tepat dalam menghubungkan produksi dengan perdagangan dan adanya kerjasama yang erat antara pengusaha dan pemerintah.
2. Jam kerja masyarakat Jepang lebih tinggi dari negara-negara industri lainnya.
3. Hasil manajemen perusahaan Jepang.

B. Ekonomi Jepang Masa Pendudukan Sekutu (1945-1952)

Sebagai akibat kalah perang dalam PD II terjadi perubahan besar dalam ekonomi Jepang. Banyak muncul permasalahan sosial dan ekonomi di Jepang. Kota-kota penting di Jepang seperti Kobe, Yokohama, Tokyo, dan Osaka menjadi sasaran serangan pihak Sekutu banyak mengalami kerusakan. Serangan sekutu tidak hanya menghancurkan fasilitas transportasi penting di Jepang seperti jalan raya, rel kereta api, bandara dan pelabuhan tetapi juga menghancurkan pemukiman-pemukiman penduduk, gedung-

gedung, dan pabrik. Banyak orang yang kehilangan tempat tinggal. Pabrik-pabrik dan pusat industri yang mengalami kehancuran tidak bisa melanjutkan kegiatan produksinya. Akibatnya banyak orang kehilangan pekerjaan dan menambah jumlah pengangguran.





Gambar 6.1 Hiroshima setelah pengeboman

Sumber: http://www.dinosoria.com/bombe_hiroshima.htm

Jepang telah kehilangan aset senilai kurang lebih 1,38 triliun yen pada indeks harga tahun 1947 yang setara dengan 20% aset domestik sebelum perang. Kekurangan pangan yang parah terjadi karena adanya gagal panen dan menurunnya hasil produksi pangan. Inflasi yang tinggi menyebabkan munculnya pasar gelap di mana-mana. Jepang telah kehilangan semua wilayahnya di seberang laut, yang menimbulkan beban lain yaitu kembalinya orang-orang Jepang yang sebelumnya bermukim di negara yang pernah dijajahnya, seperti Manchuria, Korea, dan Taiwan. Jumlah penduduk melonjak lebih dari 80 juta dengan penambahan sekitar 6 juta orang dari luar negeri.

Tabel berikut ini menggambarkan persentase kehancuran aset Jepang setelah perang dunia II:

Tabel 6.1 Kehancuran Aset Jepang pada Akhir PD II
(dalam jutaan Yen)

No	Aset	Sebelum Perang	Setelah Perang	Prosentase Kehancuran
1	Aset Total	253,130	188,852	25.4%
2	Perkapalan	9,125	1,796	80.3%
3	Mesin Industri	23,346	15,352	34.2%
4	Bangunan	90,435	68,215	24.6%
5	Material Industri	32,953	25,085	23.9%
6	Aset Rumah Tangga	46,427	36,869	20.6%
7	Komunikasi dan Persediaan Air	4,156	3,491	15.9%
8	Listrik dan Gas	14,933	13,313	10.8%
9	Kereta dan Kendaraan	15,415	13,892	9.9%

Sumber: Economic Stabilization Board, A Comprehensive Report on the War Damage of Japan Caused by Pacific War, 1949.

Meskipun dengan berbagai kesulitan ekonominya, Jepang berusaha untuk bangkit kembali, mula-mula dengan bantuan rehabilitasi dari Amerika. Berbagai perubahan sosial yang dilakukan

setelah perang membantu pembentukan kerangka dasar pengembangan ekonomi selanjutnya.

Kebangkitan ekonomi Jepang tidak terlepas dari kontribusi Amerika Serikat. Jepang yang mengalami kebangkrutan ekonomi mau tidak mau harus mencari bantuan ke luar negeri dan harus merestrukturisasi sistem ekonominya. Di pihak lain, Amerika Serikat khawatir akan adanya intervensi negara-negara komunis seperti China dan Uni Soviet yang secara geografis sangat dekat dengan Jepang. Langkah bantuan ekonomi Amerika Serikat pada Jepang adalah dengan memberi bantuan finansial tunai. Selain itu berbagai kebijakan perdagangan bilateral antar kedua negara juga turut berperan penting untuk merevitalisasi perekonomian Jepang. Salah satunya, AS menyerap sebagian besar produk ekspor yang berasal dari Jepang dengan tarif impor yang murah. Amerika Serikat juga mengatur bunga rendah bagi peminjaman Jepang dari Bank Dunia dan Bank Ekspor Impor AS.

AS juga menjalin kerjasama bilateral terkait masalah keamanan, yaitu AS menjamin keamanan eksternal Jepang. Meskipun tindakan ini dimaksudkan untuk kepentingan Amerika tetapi hal ini justru memberikan keuntungan bagi Jepang. Dalam konstitusi baru disebutkan bahwa Jepang tidak lagi menggunakan perang sebagai instrumen politik luar negeri sehingga Jepang tidak diperkenankan membangun kekuatan militer. Sebagai gantinya, AS bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan Jepang. Dengan demikian, Jepang dapat fokus dalam sektor ekonominya dan meminimalisir pengeluaran APBN untuk bidang militer. Perekonomian Jepang perlahan-lahan bangkit dengan meningkatnya komoditas ekspor dari Jepang ke negara-negara lain khususnya Asia.

Selama masa pendudukan Amerika Serikat kondisi Jepang masih mengalami depresi dan inflasi. *Zaibatsu* sebagai *holding*

company atau kelompok perusahaan yang dijalankan oleh keluarga-keluarga kaya dan memiliki kedekatan dengan pemerintah dibubarkan oleh sekutu, karena dianggap sebagai faktor yang menggerakkan Jepang dalam peperangan. Pemecahan *zaibatsu* juga untuk melepaskan kekuatan-kekuatan persaingan bebas. Hal ini dimulai pada 6 November 1945 dengan keluarnya perintah untuk memecah semua gabungan ekonomi besar. Sebagai langkah pertama penguasaan keluarga dan kepemilikan perusahaan (Mitsui, Mitsubishi, Yasuda, dan Sumitomo) dilikuidasikan. Saham-sahamnya dijual kepada rakyat dan anggota keluarga *Zaibatsu* dilarang bekerja pada perusahaan yang dulu pernah mereka miliki. Aset-aset *Zaibatsu* diambil alih oleh Komisi Likuidasi Perusahaan Bersama.

Anak-anak perusahaan dan gabungan *Zaibatsu* direorganisasikan kembali berdasarkan kepemilikan mandiri. Perusahaan perdagangan Mitsubishi dipecah menjadi sejumlah perusahaan yang saling berkompetisi. Pada akhir 1947, 325 perusahaan lainnya dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil. Selama periode pendudukan sebanyak 83 perusahaan induk dilikuidasi, sementara sekitar 5.000 perusahaan direorganisasi kembali keuangannya. Dampak langsung dari reformasi ekonomi ini adalah penurunan produksi. Pada September 1948 produksi keseluruhan industri hanya mencapai 58% dari puncak produksi pada tahun 1930-1934 (David, 1979: 292).

Tindakan lain yang dilakukan oleh sekutu adalah melaksanakan *land reform* yang tertuang dalam UU Agraria tahun 1846. AS merasa khawatir apabila nanti komunisme akan berkembang di Jepang sebagaimana yang telah terjadi di China di mana kaum petani miskin menjadi sasaran kaum komunis. Selain itu petani-petani miskin juga dikhawatirkan akan menjadi kekuatan

massa gerakan nasionalisme ekstrim sebagaimana sebelum Perang Dunia II.

Tujuan pelaksanaan kebijakan *land reform* adalah untuk menghapuskan feodalisme dan memindahkan kepemilikan tanah dari golongan bangsawan feodal kepada petani. Pemakaian lahan untuk keperluan di luar industri pertanian dibatasi 1 *cho*. Penduduk setempat hanya boleh memiliki lahan seluas 1 *cho*, sedangkan penduduk dari luar daerah tidak diperbolehkan memiliki tanah. Melalui UU Agraria 1846, tanah-tanah *absentee* harus dijual kepada pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki nasib petani dan membangkitkan kesadaran politik.

Melalui *land reform* kemampuan produksi petani semakin meningkat. Sampai dengan 1952 lebih dari lima juta acre tanah telah dibeli dari tuan tanah dan dijual kepada petani penggarap. Hasilnya hampir 90% dari seluruh tanah pertanian dimiliki oleh petani yang di tahun 1945 hanya kurang dari 50% (David, 1979: 290-291). Reformasi agraria telah berhasil membebaskan rakyat dari penguasaan tanah oleh perseorangan. Sistem feodal yang telah berlangsung sangat lama di Jepang mulai hilang pengaruhnya dan telah ditinggalkan sehingga rakyat di desa-desa mengalami peningkatan kesejahteraan.

C. Kebangkitan Ekonomi Jepang

Pertumbuhan ekonomi Jepang mengalami percepatan pasca periode awal pemulihan. Sejak akhir 1950-an hingga awal 1970-an, ekonomi Jepang tumbuh sekitar 10% per tahunnya dan bahkan kemudian menjadi kekuatan terbesar ketiga ekonomi dunia. Sukses ekonomi Jepang ini disebabkan oleh hal-hal berikut (Sayidiman, 1957: 84, David, 1979: 295):

1. Orang Jepang memiliki rata-rata tingkat tabungan yang tinggi.
2. Efisiensi dan kerja keras para pekerja dan pengusaha Jepang.

3. Industri-industri dasar berfungsi sebagai penentu untuk modernisasi peralatan. Industri tersebut adalah industri baja, tenaga listrik, tambang batu bara, dan perkapalan. Investasi untuk modernisasi baja dan tenaga listrik berpengaruh besar pada perkembangan industri lain seperti industri mesin.
4. Perluasan pasaran domestik memungkinkan penggunaan peralatan baru dan pendirian industri-industri baru. Setelah PD II Jepang mengimpor peralatan baru, memperluas dan membeli teknologi baru.
5. Kemajuan pesat dalam pemakaian teknologi dari luar memengaruhi perluasan ekspor.
6. Perbaikan teknik dan industri yang memungkinkan pengurangan impor seperti dalam industri petrokimia dan benang sintesis.
7. Produktivitas pertanian meningkat seiring penggunaan pupuk, pestisida, dan mesin pertanian ringan. Jepang mampu memenuhi kebutuhan padinya sendiri.
8. Pemerintah memainkan peranan utama dalam modernisasi peralatan berupa pemberian peraturan mengenai industri dasar, serta bank pemerintah Jepang menyediakan pembiayaannya. Pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku, subsidi, proteksi, distribusi, dan infrastruktur.
9. Pemerintah berhasil mengimplementasikan kebijakan proteksi. Perusahaan asing diijinkan hanya beroperasi di daerah di mana perusahaan asing tidak akan bersaing dengan perusahaan Jepang atau ketika produksi Jepang tidak mampu memenuhi target. Industri kecil dilindungi oleh tarif, kuota, kontrol mata uang, kontrol penanaman modal asing, dan aturan birokrasi.

Kebangkitan industri Jepang dimulai dengan meletusnya perang Korea tahun 1950-1953. Jepang mendapatkan kesempatan

untuk mengembangkan usaha-usaha perbengkelan dan produksinya. Pada saat ini pertumbuhan ekspor Jepang mencapai satu setengah kali lipat dibanding ekspor sebelum perang. Jepang mengalami peningkatan terutama dalam industri baja. Peningkatan industri ini diarahkan pada pengadaan perlengkapan militer untuk keperluan perang, sebagai penyedia kebutuhan militer AS. Perang Korea memberikan peluang besar bagi munculnya kelompok usaha yang disebut *Keiretsu* (kelompok yang terjalin erat). Ada dua macam *keiretsu*. *Keiretsu horisontal* merupakan pengelompokan dari ratusan perusahaan raksasa dengan inti enam bank yaitu Sakura Bank (Mitsui), Mitsubishi Bank, Sumitomo Bank, Fuji Bank (Yasuda), Sanwa Bank, dan Daichi Kangyo Bank. Masing-masing bank dikelilingi oleh lembaga keuangan lainnya yaitu perusahaan asuransi, dagang, dan manufaktur. *Keiretsu vertikal* merupakan produsen skala raksasa yang bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan, seperti Toyota, Honda, Nissan, Sony dan Matsushita (Panasonic). Perusahaan ini bekerjasama dengan ribuan perusahaan lain yang bertindak sebagai subkontraktor. Sebagai contoh, Toyota bekerja sama dengan banyak perusahaan kecil untuk mensuplai suku cadangnya (Mikiso, 1992: 384).

Sejak tahun 1960 an Jepang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya hingga lebih dari 10% per tahun. Pasaran dunia yang tadinya dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa dan AS dapat diambil alih oleh Jepang berkat daya saing yang tinggi dan kemampuan Jepang dalam mengembangkan peniruannya. Industri Jepang berkembang pesat mulai dari alat-alat optik dan kamera, alat elektronik, industri kapal, arloji, dan industri otomotif. Baja, aluminium, petrokimia, semen, dan industri berat lainnya tumbuh secara mencolok. Bahkan Jepang juga menjadi produsen baja terbesar ketiga setelah AS dan Uni Soviet.

Faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang yang pesat pada periode ini adalah penanaman modal yang besar oleh industri swasta untuk pabrik dan peralatan baru. Penanaman modal yang besar menjadikan industri Jepang kuat bersaing di pasaran dunia, kemampuan menciptakan produk baru memberikan keuntungan dari produksi massal dan meningkatkan produktivitas pekerja. Faktor pendorong lainnya adalah tersedianya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi. Pemerintah juga menganjurkan masyarakat untuk menabung yang bertujuan merangsang penanaman modal dan melindungi industri dengan memberi potensi pertumbuhan dan menggalakkan ekspor. Kemakmuran ekonomi Jepang ini terus berlangsung sampai tahun 1970-an, dengan laju pertumbuhan ekonomi mendekati rata-rata 12 %.

D. Perkembangan Ekonomi

Pada tahun 1970 Jepang dapat berbangga dengan menempati tiga ekonomi terbesar di antara negara-negara maju di dunia. Laju pertumbuhan ekonomi Jepang mengalami kemerosotan sejak berlangsungnya krisis minyak I tahun 1973-1974. Terjadinya krisis minyak II tahun 1979-1980 berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi Jepang yang hanya mencapai kurang dari 4%. Sejak terjadinya krisis minyak pada tahun 1970-an pertumbuhan industri berat mengalami hambatan yang besar. Dalam hal industri baja misalnya, pada tahun 1982 produksinya menurun di bawah 100 juta ton. Naiknya nilai yen memaksa industri ini untuk mengurangi jumlah pegawai dan produksinya. Terlebih dengan munculnya Korea sebagai produsen baja yang besar semakin memperburuk industri baja Jepang.

Daya saing industri aluminium Jepang menurun drastis sejalan dengan kenaikan harga minyak dan biaya tenaga listrik. Pada tahun 1982 kemampuan peleburan tinggal separuhnya saja sekitar

700.000 ton dan pada tahun 1985 hanya mencapai 300.000 ton. Sementara itu kemampuan industri petrokimia Jepang menurun lebih dari 30% sejak tahun 1983. Industri-industri lain juga merosot perannya karena daya saing yang melemah dan menurunnya permintaan dunia terhadap produk, seperti misalnya industri logam nonbesi, pembuatan kapal, tekstil, dan industri lain.

Kemerosotan pada industri-industri tersebut menyebabkan para pengusaha beralih pada bidang bisnis yang lain misalnya elektronika. Produknya berupa peralatan perindustrian dan komponen-komponen elektronik, televisi, peralatan audio, komputer, radio, kalkulator, arloji, peralatan komunikasi mengalami perkembangan pesat. Teknologi mikroelektronika berkembang pesat yang diterapkan pada alat-alat mesin yang terkontrol secara numerik, robot industri, sistem distribusi otomatis, dan bidang-bidang otomomasi pabrik lainnya, komunikasi data, *personal computer*, *word processor*, *facsimile*, mesin fotokopi dan bidang-bidang pengolahan data. Pada tahun 1981 Jepang menguasai 70% pasar dunia *computer chip*. Pada tahun 1991 Jepang mempunyai pendapatan per kapita tertinggi di dunia.

Industri mobil merupakan sektor manufakturing yang paling penting di Jepang. Industri mobil di Jepang telah mencapai tingkat kematangan dan produksi yang stabil. Pada tahun 1989 Jepang mengekspor 4.392.000 mobil dan menguasai 19,4 % dari pasar mobil di AS. Penjualan mobil oleh Jepang yang berlebihan ke negara-negara lain terutama Amerika Serikat, menyebabkan adanya pembatasan ekspor dan mendorong para pembuat mobil untuk mendirikan pabrik di luar negeri (Mikiso Hane, 1992: 379). Honda, Daihatsu, Suzuki, dan Toyota merupakan merk produk industri mobil Jepang yang menguasai pasar global.

Bidang lain yang memainkan peran penting dalam ekonomi Jepang antara lain bidang distribusi, jasa, keuangan dan asuransi,

angkutan dan telekomunikasi, tenaga listrik, gas, dan pengadaan air. Selama periode pertumbuhan ekonomi cepat pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, produksi massal, penjualan massal, dan konsumsi massal telah menjadi ciri khas perekonomian masyarakat Jepang sehingga *department store*, supermarket, dan toko barang khusus berkembang dengan pesat.

Konsentrasi pada teknologi tinggi menyebabkan penurunan dalam industri tradisional. Misalnya, Jepang bukan lagi sebagai produsen utama bahan tekstil atau baja. Tahun 1985 tekstil mencapai 48,2% dari ekspor Jepang, tetapi tahun 1989 hanya mencapai 2,5%. Tahun 1956 Jepang menghasilkan lebih dari 50% dari kapal dunia, tetapi tahun 1978 turun hingga 31,9%. Namun industri kapal Jepang bangkit lagi dan pada tahun 1981 menguasai 51,9% bisnis pembangunan kapal dunia dan terus mempertahankan peringkat itu selama dekade 1980an.

Usaha usaha untuk memperbaiki produktivitas dan kualitas memungkinkan bisnis Jepang dapat menyesuaikan secara konstan dengan perkembangan ekonomi dunia. Agen-agen pemerintah terutama Kementerian Industri dan Perdagangan Luar Negeri dan sektor bisnis telah bekerja sama dalam merencanakan arah pengembangan ekonomi. Manajemen orang-orang Jepang juga percaya pada perencanaan jangka panjang dan kemauan untuk menerima keuntungan jangka pendek tingkat rendah. Terlebih lagi banyak konglomerat keuangan dan industrial menguasai perbankan.

BAB VII

PERKEMBANGAN EKONOMI KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN

A. Pendahuluan

Korea Selatan dan Korea Utara memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda sesuai dengan ideologi yang dianut oleh masing-masing negara. Pada masa awal berdirinya Korea Selatan segera mengambil kebijakan ekonomi nasionalnya. Korea Selatan mengandalkan pengembangan teknologi dan modal ekonomi melalui pinjaman modal asing. Dalam kurun waktu yang cukup singkat Korea Selatan telah berhasil menjadi negara industri yang maju. Dalam waktu kurang dari 30 tahun Korea Selatan maju pesat dari sebuah negara pertanian menjadi negara industri dan perdagangan. Hal ini sangat berbeda dengan Korea Utara yang pertumbuhan ekonominya sangat rendah.

Pembangunan dan pemulihan ekonomi merupakan hal yang paling mendesak dan paling berat bagi pemerintah Korea Utara setelah perang. Diperkirakan sekitar 80% kapasitas produktif Korea Utara hancur akibat perang. Untuk membangun kembali perekonomiannya pemerintah Korea Utara melakukan berbagai rencana dengan bantuan dari Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya. Berbeda dengan Korea Selatan yang muncul sebagai

kekuatan ekonomi dunia, maka Korea Utara merupakan negara miskin dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

B. Perkembangan Ekonomi Korea Utara

Ekonomi Korea Utara sebelum perang jauh lebih kuat dan stabil dibandingkan Korea Selatan. Wilayah Korea Utara kaya dengan sumber daya alam, misalnya batubara, timah, emas, granit, bijih besi, tembaga, dan natrium; dan banyak industri yang telah dikembangkan oleh kolonial Jepang di wilayah ini. Oleh karena itu, ekonomi Korea Utara pada periode 1945-1950 cenderung stabil. Namun saat ini keadaan ekonomi di Semenanjung Korea berbalik, salah satunya karena sifat tertutup Korea Utara sehingga hanya beberapa negara saja yang mau menjalin hubungan kerjasama. Kerjasama ekonomi Korea Utara dilakukan dengan Uni Soviet, China, Jepang, dan Korea Selatan.

Korea Utara menerapkan sistem ekonomi sosialis. Hampir seluruh aspek ekonomi dipegang oleh negara. Pembangunan ekonomi Korea Utara dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan, yaitu: satu rencana 3 tahun (1954-1956), satu rencana 5 tahun (1957-1961), satu rencana 6 tahun (1971-1976), dan dua rencana 7 tahun (1961-1967 dan 1978-1984). Rencana pertama didesain sebagai pemulihan pasca perang dan rencana-rencana berikutnya bertujuan pada perluasan industri terutama industri berat. Melalui sistem ekonomi yang dikendalikan secara ketat dengan sistematika perencanaan negara, pengalihan sumber daya manusia secara menyeluruh maupun bantuan keuangan dan bantuan lain yang diberikan oleh Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya, maka pembangunan dan pemulihan ekonomi Korea berjalan dengan cepat sampai pertengahan tahun 1960-an. GNP meningkat dari \$320 juta pada tahun 1953 menjadi \$3,6 milyar pada tahun 1967, dan GNP per kapita meningkat dari

\$41 pada 1953 menjadi \$218 pada 1967. Selama periode ini andil pertanian dalam GNP turun dari 59,1% menjadi 19,3% sedangkan andil perindustrian meningkat dari 23,2% menjadi 62% (Nahm, 1993: 262-263). Tetapi, setelah tahun 1967 pertumbuhan ekonomi Korea Utara mengalami penurunan. Penyebabnya adalah berkurangnya bantuan dari Uni Soviet dan tumbuhnya birokratisme.

Untuk meningkatkan produksi Kim Il-sung mencanangkan beberapa kebijakan. Yang pertama adalah Gerakan Kuda Terbang (*chollima*) yang dimulai pada tahun 1958. Dalam gerakan ini sekitar satu juta pekerja dimobilisasikan sebagai “tim kerja kuda terbang” dan mereka ditunjuk dalam berbagai proyek untuk memimpin para pekerja lokal. Pertanian diorganisasikan dalam pertanian kooperatif, pemilikan tanah secara individu dihapuskan. Model pertanian kooperatif dengan metode Chongsan-ri diberlakukan, tujuannya meningkatkan antusiasme dan keterampilan teknis kelompok kerja para petani. Bagi pekerja industri diperkenalkan metode Taean yang bertujuan untuk memperkenalkan kepemimpinan kolektif partai dan pekerja pada masing-masing pabrik. Pada Februari 1973 dicanangkan tiga revolusi (pemikiran, teknologi, dan kebudayaan) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekitar 60.000 pemuda kader partai yang terpilih diorganisasikan dalam ‘Kesatuan-Kesatuan Kecil Tiga Revolusi’ untuk dikirim ke pertanian-pertanian dan pabrik-pabrik agar bekerja lebih giat (Nahm, 1993: 264).

Korea Utara mengembangkan industri berat yang meliputi industri mesin, tenaga listrik, pertambangan, baja, dan kimia. Rencana tiga tahun rekonstruksi pasca perang (1954-1956) menargetkan perindustrian kembali produktif dengan memulihkan basis industri yang memasukkan banyak bahan baku, mesin, dan peralatan baik dari Uni Soviet maupun dari China. Prioritas bagi industri berat telah menyebabkan perkembangan industri ringan

tertinggal jauh. Komoditas bukan dasar seperti sabun, handuk, sepatu, dan sandang sangat terbatas, dan barang tidak habis pakai seperti pena dan sepatu terlalu mahal bagi rata-rata keluarga di Korea Utara.

Untuk meningkatkan produksi padi, Korea Utara melakukan proyek-proyek pengambilan tanah secara ambisius, merombak wilayah-wilayah yang bergelombang dan bukit-bukit rendah menjadi area penanaman tanaman pangan. Para petani dalam pertanian kooperatif menyerahkan hasil-hasil pertanian dan menerima bagian tertentu dari hasil panen itu seperti pembayaran uang bagi padi dan barang-barang yang mereka hasilkan. Semua petani terikat pada pertanian bersama, demikian juga dengan para buruh pabrik. Hanya setelah mendapat ijin dari pemerintah mereka dapat berganti profesi. Tetapi untuk mendapatkan ijin itu dapat dikatakan hampir tidak mungkin.

Pihak swasta atau *joint venture* hanya menangani aspek yang tidak diatur oleh negara. Semua aspek penting dalam kehidupan dipegang oleh negara, misalnya sekolah, kesehatan, dan perumahan. Semua aspek tersebut ditanggung oleh pemerintah. Perdagangan tidak terselenggara di Korea Utara. Semua toko dioperasikan oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan swasta dan restoran tidak diijinkan beroperasi. Semua apartemen dan perumahan petani merupakan milik pemerintah yang disewakan dengan harga yang sangat rendah. Tetapi upah pekerja juga rendah. Perpajakan sebagai 'sebuah warisan masyarakat kuno' dihapuskan. Sebagai gantinya, rakyat dengan pendapatannya didukung untuk menyumbang pemerintah untuk berbagai tujuan.

Masalah ekonomi yang paling berat di Korea Utara adalah defisit perdagangan yang sangat kronis. Hampir 35% anggaran nasional digunakan untuk kemiliteran. Korea Utara hanya memiliki sedikit ekspor. Kerjasama ekonomi Korea Utara pada umumnya

dilakukan dengan negara-negara blok sosialis terutama Uni Soviet dan China. Selain itu perdagangan dengan Jepang juga mencakup sekitar 10,8% dari seluruh perdagangan luar negeri Korea Utara. Barang-barang yang diekspor antara lain mesin-mesin, motor listrik, berbagai produk logam, bahan mineral, bahan bangunan, tekstil, tembakau, dan ginseng. Barang yang diimpor antara lain mesin dan alat pabrik, minyak, barang petro-kimia, makanan kaleng, ban kendaraan, wol, dan kulit (Tanzil, 1988: 88).

Sejak China dan Uni Soviet mengutamakan perekonomian nasional, keadaan ekonomi Korea Utara mengalami penurunan ketika kedua negara menuntut pembayaran tunai. Hutang Korea Utara kepada negara-negara sosialis yang menjadi mitra dagang utama semakin meningkat. Pada tahun 1979 Korea Utara menjadi negara komunis pertama yang gagal memenuhi hutang luar negerinya. Kondisi ekonomi Korea Utara semakin memburuk. Menurut sumber Jepang perdagangan luar negeri Korea Utara turun sampai 10% pada tahun 1989 dan keadaan tidak dapat diperbaiki karena hutang-hutang yang tidak terbayar dan perubahan kurs mata uang negara-negara sosialis. Berbagai laporan yang diterbitkan pada tahun 1989 dan 1990 menunjukkan kelangkaan bahan bakar dan pangan yang begitu parah di Korea Utara. Hasil panen tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyat yang semakin bertambah karena banyaknya tanah yang kurang subur dan seringnya mengalami banjir atau kekeringan.

Penduduk yang tidak mampu masuk universitas biasanya akan bekerja di bidang pertanian atau menjadi buruh pabrik. Lulusan sekolah menengah biasanya telah siap kerja. Lulusan universitas biasanya masuk di ketentaraan. Tentara Korea Utara banyak membutuhkan orang-orang yang memiliki kualitas otak lebih tinggi dibanding kualitas otot karena di dalam tentara ada banyak divisi, seperti divisi seni, komputer, teknologi,

pembangunan, dan lain-lain. Oleh karena itu, banyak warga Korea Utara yang tertarik masuk tentara, terlebih masuk tentara merupakan cara menaikkan taraf kehidupan selain melalui jalur partai. Kim Jong Il mengedepankan bidang militer dalam kebijakannya (*military first*). Menurut Kim Jong Il kekuatan ekonomi merupakan hal yang terakhir untuk membentuk *powerfull great state* Korea Utara setelah kekuatan politik dan militer. Menurutnya, jika kekuatan politik dan militer di Korea Utara telah maju maka kekuatan ekonomi akan ikut maju sebagai dampaknya (Chung, 2004: 294). Oleh karena itu, sampai saat ini Korea Utara lebih fokus pada perkembangan politik dan militernya.

Kemajuan pesat di bidang militer ditandai dengan berhasilnya Korea Utara dalam pengayaan uranium dan senjata nuklir. Korea Utara telah membuat teknologi persenjataan militer yang dikenal dengan *Mass Weapon Destruction* dalam usaha untuk mencegah intervensi militer pihak asing terhadap Korea Utara. Keberadaan senjata pemusnah massal ini yang menjadikan Korea Utara sebagai ancaman bagi Amerika Serikat dan Korea Selatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Korea Utara tidak berlangsung lama dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa ketegangan antara Korea Utara dengan AS dan Korea Selatan akibat isu-isu pembangunan nuklir oleh Korea Utara pada 2003. Ketegangan tersebut menyebabkan alokasi perbelanjaan negara difokuskan pada pengembangan senjata dan militer sebagai upaya pencegahan perang yang sewaktu-waktu dapat terjadi (Chung, 2004: 303).

Reformasi ekonomi mulai didengungkan oleh Kim Jong Un, pengganti Kim Jong Il setelah meninggal. Ia menyusun kabinet untuk mengambil alih kebijakan ekonomi yang selama ini dipegang oleh militer. Selama pemerintahan Kim Jong Il, kebijakan-kebijakan ekonomi lebih ditentukan oleh militer. Kebijakan Kim Jong Il telah

menjerumuskan Korea Utara menjadi lebih terpuruk dalam isolasi karena ambisi nuklir, kemiskinan dan politik represi.

Kim Jong Un membentuk kelompok reformasi ekonomi pada Partai Buruh yang berkuasa. Pemerintah melakukan reformasi pertanian dan ekonomi. Kebijakan Korea Utara ini berkaca dari negara sekutunya yaitu China. Dalam 17 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Korea Utara menunjukkan perkembangan pesat meski DK PBB menjatuhkan sanksi berat akibat peluncuran uji coba nuklirnya. Sanksi internasional menyebabkan pemerintah Korea Utara mengizinkan swasta untuk menanamkan modal. Mereka bisa menjalankan bisnis setelah rezim Korea Utara mengizinkan privatisasi terbatas dan melibatkan suap pada pejabat (Liputan 6, 10 Mei 2017, 20:25).

Kebijakan pemerintah setempat yang memperbolehkan warga negara Korea Utara untuk berdagang dan berbisnis telah menumbuhkan gelombang orang kaya baru di Korea Utara sejak 2002. Mereka sebagian besar memiliki hubungan baik dengan rezim pemerintahan Kim Jong Un dan membayar suap pada pihak pemerintah untuk kegiatan bisnisnya. Sejalan dengan pertumbuhan kelas menengah Korea Utara yang menghasilkan uang dari pendapatan tidak resmi, permintaan produk-produk seperti kosmetik, ponsel pintar, jus buah impor, dan pakaian merk asing semakin meningkat. Saat ini banyak warga Korea Utara yang meningkat kelasnya secara ekonomi. Mereka menjadi golongan kaya yang disebut '*donju*'. Para *donju* menghasilkan uang dengan berdagang di pasar informal atau dengan mendirikan usaha kecil. Beberapa bisnis beroperasi sebagai bentuk kemitraan publik-swasta, di mana staf BUMN yang diberi izin untuk memulai perusahaan kuasi-otonom. Sekitar 70% dari keuntungan perusahaan itu masuk ke kas negara, dan sisanya untuk individu.

Munculnya kaum elit baru dengan gaya hidup mewah di Korea Utara menimbulkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Banyak warga negara Korea Utara yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar masyarakat Korea Utara hidup di wilayah pedesaan dan tidak menikmati kebebasan (Liputan6, 10 Mei 2017, 20:25). Namun demikian, kapitalisme Korea Utara yang mulai menggeliat mengalami beberapa hambatan antara lain tekanan pemerintah, korupsi, dan kekurangan suplai energi.

C. Perkembangan Ekonomi Korea Selatan

Ekonomi Korea Selatan mengalami kehancuran setelah berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953. Pendapatan per kapita hanya mencapai \$ 67, lebih rendah dari sebelum perang dan merupakan salah satu pendapatan yang tersendah di dunia. Sebesar 40% struktur ekonomi hancur, 2/3 nya dari sektor industri. Produksi pertanian mengalami penurunan hingga 27% dari masa sebelum perang. Tanpa mendapat bantuan pangan dari luar negeri maka orang-orang Korea Selatan mengalami kelaparan (Steinberg, 1989: 122). Namun dalam periode berikutnya, ekonomi di Korea Selatan mengalami perkembangan yang luar biasa dalam empat dekade sejak tahun 1960-an. Bahkan, saat ini Korea Selatan menjadi salah satu negara paling kaya dan tercanggih di dunia. Pertumbuhan ekonominya sangat cepat baik di bidang industri, pencapaian teknologi, maupun pembangunan sarana dan prasarananya. Produk-produk elektronik dari Korea Selatan seperti Samsung dan *Life Goldstar* (LG) menguasai dunia dengan produknya berupa telepon seluler canggih, televisi plasma, LCD, dan semikonduktor. Selain industri elektronik, Korea Selatan juga mengembangkan industri otomotif seperti KIA, Hyundai, dan Daewoo, industri baja, dan pembuatan kapal-kapal.

Pesatnya kemajuan ekonomi di Korea Selatan sejak tahun 1960-an sering disebut sebagai *Miracle of the Han River* atau keajaiban di Sungai Han. Kebangkitan ekonomi Korea dimulai sejak kepemimpinan Park Chung Hee yang mengkonsolidasikan kembali segala bidang kehidupan di Korea. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan Park Chung Hee meliputi kebijakan *Economic Planning Board (EPB)*, *Export-Oriented Industrialization (EOI)*, *Heavy Chemical Industry (HCI)*, dan Gerakan *Saemaul Undong* yang diterapkan di pedesaan Korea (Darini, 2010: 24-27).

Pemerintah Korea Selatan membentuk Badan Perencanaan Ekonomi (EPB) untuk mengarahkan dan menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk investasi modal, produksi, dan juga ekspor. EPB diketuai oleh wakil perdana menteri bertanggung jawab terhadap rencana pembangunan lima tahun (Repelita). Program repelita disusun dalam empat tahap dimulai pada tahun 1962. Tahap pertama dan kedua diarahkan untuk pembangunan industri. Tahap ketiga (1972-1976) untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian, dan tahap keempat (1977-1981) adalah pembangunan ekonomi yang mandiri dan pemerataan hasil pembangunan (Darini, 2010: 24).

Setelah implementasi rencana pembangunan ekonomi 5 tahun pertama tahun 1962-1966 pertumbuhan industri modern telah mengubah karakter ekonomi Korea Selatan. Pemerintah mengarahkan sektor swasta khususnya para *chaebol* (konglomerat besar seperti Hyundai, Samsung, Daewoo) untuk mewujudkan agenda pembangunan yang disusun oleh pemerintah berupa pengembangan industri manufaktur seperti elektronik, otomobil, dan semikonduktor. Produk industri ini diarahkan untuk pasaran ekspor, sehingga pemerintah memberi kemudahan dalam hal perkreditan bagi para eksportir. Keberhasilan ekspor Korea Selatan yang pertama terjadi pada ekspor produk industri ringan seperti

tekstil dan pakaian jadi, komponen elektronik yang berlangsung dalam kurun waktu antara tahun 1964-1974. Keberhasilan Korea Selatan pada periode tersebut sangat ditunjang oleh perkembangan ekonomi dunia yang tengah mengalami lonjakan industri yang luar biasa sehingga Korea Selatan tidak mengalami kesulitan untuk memasarkan produk-produknya. Terlebih lagi Korea Selatan mendapatkan kemudahan untuk masuk ke pasar domestik Amerika.

Sejalan dengan itu sejak paruh kedua dasawarsa 1970-an terjadi perubahan orientasi industri yaitu dari industri ringan ke industri berat dan kimia. Dimulai dengan berdirinya industri minyak pada tahun 1964, kemudian diikuti dengan berdirinya industri-industri lain seperti industri petrokimia, industri mesin, industri elektronik, industri besi dan baja, industri otomotif, industri semen, industri perakitan kapal, dan industri pupuk kimia.

Perkembangan industri di Korea Selatan juga memunculkan kompleks perindustrian yang direncanakan pemerintah dengan hati-hati. Wilayah Seoul dan Inchon menjadi zona industrial besar terutama bagi industri ringan. Menyusul kemudian pusat-pusat industri lainnya seperti P'ohang, Ulsan, dan Pusan, Masan dan Chang'won, Pulau Koje, Kwangyang, dan Kwangju. Untuk mendukung perkembangan ekonomi pemerintah membangun jalan raya dan jalan Kereta Api, memodernisasi dan memperluas pelabuhan dan sistem lalu lintas udara dan terusan langsung lainnya.

Munculnya kota-kota industri baru memicu terjadinya urbanisasi para pemuda desa secara besar-besaran. Hal ini karena terjadinya kesenjangan antara wilayah perkotaan dengan perdesaan. Tingkat pertumbuhan sektor pertanian tertinggal jauh dari sektor industri, sehingga ketika terjadi pertumbuhan ekonomi kesenjangan antara pendapatan rumah tangga petani dengan pendapatan masyarakat urban semakin lebar. Besarnya urbanisasi

menyebabkan tekanan penduduk di wilayah urban, sehingga pada 1970 Presiden Park mencanangkan gerakan *Saemaul Undong* (Gerakan Masyarakat Baru). Gerakan ini memiliki semangat kemerdekaan, mandiri, dan gotong royong. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat desa, menghapuskan jeratan kemiskinan, membantu mengembangkan kerajinan dan penghematan, mengembangkan semangat kerjasama dan menolong diri-sendiri, dan memodernisasi masyarakat pedesaan.

Pada dasarnya gerakan ini merupakan kampanye untuk membangun ekonomi diri sendiri untuk meningkatkan taraf hidup. Pemerintah memberikan bimbingan administratif dan teknis, bantuan keuangan bagi proyek-proyek desa, dan membentuk lembaga pelatihan untuk pemimpin desa. Proyek-proyek masyarakat baru antara lain berupa modernisasi perumahan masyarakat desa, pembangunan jalan-jalan dan saluran air, pembangunan sistem sanitasi, dan memberikan pengetahuan sains dan teknologi bagi masyarakat desa. Gerakan ini menjadi gerakan nasional sebagai cara untuk memelihara semangat kerja sama dan persatuan.

Saemaul Undong dioperasikan melalui tiga tahapan. Tahap *pertama* adalah melakukan berbagai perbaikan lingkungan hidup pedesaan terutama yang menyangkut fasilitas fisik. Tahap *kedua* adalah memperbaiki infrastruktur dasar, dan tahap *terakhir* adalah memperluas kesempatan kerja pertanian dan non-pertanian di samping menggarap aktivitas lain yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga setempat (Hilmy Mohtar, 1996: 59).

Dari uraian yang ada dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, yaitu antara lain:

1. Bimbingan dan perencanaan Negara.

2. Inisiatif dari pengusaha dan badan hukum swasta berdasarkan prinsip ekonomi bebas.
3. Bantuan ekonomi Amerika Serikat, pinjaman Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, serta ganti rugi dari Jepang.
4. Impor peralatan dan teknologi industri terbaru.
5. Etos kerja rakyat.
6. Tingkat pendidikan yang tinggi.

BAB VIII

PERKEMBANGAN SOSIAL BUDAYA

ASIA TIMUR

A. Pendahuluan

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di bidang politik dan ekonomi, maka berlangsung pula perubahan-perubahan dalam bidang sosial dan budaya di Asia Timur. China era Mao yang sangat tertutup menyebabkan kehidupan sosial budayanya terkekang oleh pemerintah. Keadaan ini mulai berubah sejak China dipimpin oleh Deng Xiao Ping. Demikian juga dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jepang yang mengalami perubahan seiring demokratisasi yang diperkenalkan oleh pihak Sekutu. Sementara itu arah kehidupan sosial dan budaya di Korea Utara dan Korea Selatan mengalami perkembangan sesuai dengan ideologi yang dianut negara masing-masing.

B. Dinamika Sosial Budaya China

Kebudayaan China telah berkembang selama ribuan tahun sebelum masehi. Peradabannya yang tinggi telah menjadikan China sebagai pusat kebudayaan Asia Timur yang memberikan pengaruh-pengaruhnya bagi wilayah-wilayah di sekitar China, misalnya ajaran Konfusius. Namun demikian, pada era pemerintahan Republik Rakyat China telah terjadi perubahan-perubahan besar dalam

kebudayaan China. Sejak komunis berkuasa tahun 1949 kehidupan keagamaan di China tidak berjalan bebas. Mao beranggapan bahwa agama termasuk juga ajaran Konfusianisme merupakan semangat budaya yang menentang kemajuan serta mendukung feodalisme dan kapitalisme. Akibatnya PKC melakukan tekanan terhadap kelompok agama. Semua kegiatan keagamaan harus dilaksanakan di tempat-tempat ibadah yang telah mendapat izin dari pemerintah. Bahkan pada era Revolusi Kebudayaan berbagai macam tempat peribadatan dihancurkan.

Pemerintah menggunakan pendidikan sebagai alat untuk menanamkan kepercayaan dan nilai-nilai baru untuk membangun masyarakat sosialis revolusioner. Bentuk dan isi pendidikan disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Sebagai contoh tujuan pendidikan pada tahun 1958 sejalan dengan penekanan dalam bidang pertanian yaitu membantu komune meningkatkan produksi pertanian. Kurikulum tambahan pada pendidikan sekolah menengah di pedesaan meliputi studi politik, ideologi, dan aritmatika. Kurikulum sekolah kejuruan paro waktu di pedesaan mengajarkan reparasi mesin dan mengemudikan traktor. Untuk mengatasi masalah urbanisasi pemerintah menerapkan dua perubahan mendasar dalam kebijakan pendidikan, yaitu mengurangi jumlah sekolah kejuruan paro waktu dan semua lulusan sekolah dasar dan menengah yang tidak bekerja di pabrik dan atau melanjutkan ke sekolah tinggi teknik atau universitas diarahkan pergi ke desa dan bekerja di sektor pertanian.

Di bidang seni pemerintahan Mao membentuk lembaga sensor yang diterapkan dengan sangat ketat terhadap penerbitan buku-buku. Buku *Mao Talks Yan'an* (ceramah-ceramah Yan'an mengenai sastra dan seni) digunakan sebagai pedoman penulisan bergaya realisme sosialis. Para penulis harus mengabdikan kepada perjuangan politik, tidak hanya sekedar mencari kepuasan diri atau

ketenaran melalui karya sastranya. Adanya berbagai larangan dan pembatasan mengakibatkan China tidak banyak menghasilkan kesusastraan modern.

Penggunaan kesusastraan sebagai wahana pengajaran politik mencapai puncaknya pada masa Revolusi Kebudayaan. Sastra pada masa ini menggambarkan tokoh-tokoh secara hitam-putih, bahwa pahlawan harus sempurna dalam ideologi, motif, dan tindakan, penuh keberanian, tidak pernah menipu; sebaliknya penjahat harus penuh keburukan dengan latar belakang kelas yang mencurigakan atau nista, dan digerakkan oleh perasaan dendam dan iri hati. Tidak ada tokoh 'tengah-tengah' yang mungkin menunjukkan permainan halus antara kesusilaan dan kepentingan diri sendiri. Penjahat selalu tidak dapat diperbaiki dan akhirnya dieksekusi atau dihukum seumur hidup. Perang senantiasa digambarkan secara gemilang dan romantik, dan pahlawan-pahlawan memperoleh kemenangan demi kemenangan (Bonavia, 1987: 156).

Dalam gaya hidup keseharian, kaum perempuan tidak boleh lagi berambut panjang dan berdandan sesukanya. Bila ketahuan maka rambut mereka akan dipotong dan celana panjang ketat mereka akan dirobek di depan umum. Bentuk pakaian di China seragam dan monoton (Bonavia, 1987: 164). Pada umumnya busana yang dikenakan adalah model jas dan celana panjang longgar berwarna abu-abu, biru, dan hitam. Pada musim panas para gadis diperbolehkan mengenakan blus dan rok sampai di bawah lutut, dan pada musim dingin dapat mengenakan jaket berlapis tebal dengan warna-warna tidak mencolok. Gaya hidup masyarakat tidak menunjukkan adanya keinginan untuk mencari kekayaan atau benda-benda materi lainnya.

Setelah era keterbukaan yang dicetuskan oleh Deng Xiao Ping perubahan terlihat sangat jelas di China. Tempat-tempat

penginapan, restoran, dan pertokoan tumbuh pesat di berbagai tempat. Kebijakan satu keluarga satu anak dicetuskan untuk membatasi jumlah anggota keluarga di China. Berbagai metode digunakan untuk mencapai tujuan ini, misalnya dengan kampanye publik secara intensif dan menekan rakyat yang memiliki satu atau dua anak untuk tidak memiliki anak lagi.

Saat ini pemerintah China yang secara resmi menganut atheis telah memperlunak sikapnya terhadap praktik-praktik keagamaan dan banyak situs keagamaan yang telah direstorasi. Agama Kristen berkembang pesat di China, dan berbagai sekte peranakan yang menggabungkan kepercayaan tradisional dan agama juga semakin populer. Kaum muslim China sebagian besar bermukim di wilayah Xinjiang dan Xian, sedangkan penduduk di wilayah otonomi Tibet, Provinsi Qinghao, dan Sichuan merupakan penganut Buddha Tibet.

Beberapa festival diselenggarakan setiap tahun, di antaranya Qing Ming atau Festival Cahaya yang diselenggarakan untuk menghormati leluhur dengan membersihkan makam dan Festival Perahu Naga yang diadakan saat purnama pada bulan kelima kalender bulan untuk menghormati Qu Yuan, seorang penyair yang menenggelamkan diri pada abad ke-3 SM untuk memprotes korupsi di kerajaan (George Mcdonald, 2013: 23-24).

Dunia seni modern dan kebudayaan China sangat menarik. Beberapa film China seperti *Red Sorghum*, *Farewell My Concubine*, dan *Lost in Beijing* karya Li Yu telah mendapat pengakuan internasional, meskipun karya tersebut secara resmi justru dilarang beredar di China. Meskipun demikian, pemerintah China belakangan ini mulai menyelenggarakan acara-acara internasional berskala tinggi melalui konferensi-konferensi, festival-festival film, dan penyelenggaraan olahraga berskala besar seperti olimpiade. Pemerintah China membatasi akses informasi masyarakat melalui

pembatasan internet yang disebut *Great Firewall Tiongkok*. Pengguna internet hanya terhubung dengan situs-situs yang direkomendasikan dan menghapus situs-situs yang dianggap berbahaya oleh pemerintah.

C. Kehidupan Sosial Budaya Jepang

Pendudukan Sekutu, pertumbuhan ekonomi, pengaruh-pengaruh baru dari Barat, dan pendidikan yang berlangsung sejak akhir PD II berpengaruh pada masyarakat Jepang. Pendudukan Amerika telah meletakkan dasar-dasar dari revolusi sosial baik pada masyarakat tingkat atas maupun bawah. Masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat. Individualisme dan semangat demokrasi dari Barat masuk dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Perubahan sosial di masyarakat dipercepat dengan ledakan ekonomi Jepang.

Setelah PD II status kebangsawanan di Jepang dihapus kecuali keluarga Tenno Heika. Bekas keluarga bangsawan harus menanggalkan sebutan-sebutannya dan hidup seperti rakyat biasa. Orang-orang terkaya di Jepang terdiri atas kalangan industriawan dan pedagang. Namun demikian, kehidupan petani juga tidak kalah baiknya dengan orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan, industri, dan perdagangan. Pada umumnya masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang sejahtera.

Bentuk keluarga Jepang mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Saat ini Jepang cenderung membentuk keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak menggantikan unit keluarga besar pada masa lalu. Kebiasaan-kebiasaan lama seperti menghormati ayah, peran anak laki-laki masih dipertahankan meskipun peranan keluarga sebagai kelompok sudah sangat berubah. Peranan wanita juga mengalami perubahan terutama disebabkan semakin meningkatnya pendidikan kaum

wanita. Hukum sipil yang direvisi pada tahun 1947 menempatkan kedudukan perempuan sejajar dengan kaum laki-laki di setiap aspek kehidupan. Mereka banyak terlibat dalam segala bidang pekerjaan, bahkan terdapat kecenderungan wanita lebih mengejar karier dan menunda usia perkawinannya atau bahkan tidak menikah sama sekali. Suami berperan mencari nafkah dan menjamin posisi keluarga dalam masyarakat. Dalam ranah reformasi sosial perubahan legal yang terlihat jelas terjadi pada sistem keluarga, terutama status perempuan. Persamaan hak istri dengan suami dijamin, istri diberi hak untuk memiliki properti sendiri secara mandiri, dan memiliki hak untuk menceraikan suaminya seperti seorang suami menceraikan istrinya. Hak anak sulung dihapuskan dan anak perempuan diberikan hak waris yang sama dengan anak laki-laki.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat mengubah pola hidup keseharian masyarakat. Semakin meluasnya penggunaan alat-alat rumah tangga modern bersamaan dengan produksi massa makanan instan, meluasnya suplai makanan beku, pakaian jadi, dan kebutuhan lain mengubah corak hidup masyarakat Jepang. Tiga pusaka “cermin, permata, dan pedang” di masa lalu telah digantikan dengan televisi set, kulkas, dan mesin cuci pada tahun 1950-an, dan pada tahun 1960-an bertambah dengan mobil, televisi berwarna, dan pendingin ruangan. Pada awal 1970-an muncul slogan villa, liburan, dan berpergian ke luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jepang menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi.

Gambaran fisik pedesaan Jepang mulai berubah pada 1960-an. Pabrik-pabrik dibangun di wilayah pedesaan untuk mendapatkan buruh-buruh murah yang tersedia. Pekerjaan-pekerjaan dalam industri baru merupakan faktor utama merosotnya basis masyarakat yang lama. Jumlah rumah tangga petani menurun dari 6,18 juta di tahun 1950 menjadi 5,34 juta di tahun 1970. Di

banyak tempat desa-desa didesak oleh perkembangan kota. Bagian-bagian dari pulau-pulau utama Jepang kecuali Hokkaido terlihat seperti kota-kota yang besar sekali (*megalopolis*). Pada 1970 pendapatan rata-rata rumah tangga petani meningkat sampai \$3.880 dan 60% dari pendapatan ini berasal dari kegiatan non-pertanian (David, 1979: 338).

Jepang merupakan bangsa pembaca. Surat kabar dan majalah merupakan saluran penting bagi penyebarluasan informasi di seluruh negeri. Setiap rumah tangga rata-rata membaca dua surat kabar sehari. Surat kabar Jepang memperoleh kebebasan sepenuhnya. Tidak satu pun harian nasional yang terkait dengan partai politik.

Generasi baru seluruhnya berbeda dengan pendahulunya. Mereka lebih santai dan terus terang, lebih kurang sopan, dan lebih egoistik. Meningkatnya kejahatan anak-anak merupakan ancaman terhadap meningkatnya tekanan sosial. Pada 1983 terdapat 2.125 kasus kekerasan di sekolah, di mana 929 kasus murid menyerang guru. Kejahatan yang dilakukan anak-anak meningkat dari 58.000 di tahun 1975 menjadi 136.000 di tahun 1988. Meningkatnya tekanan untuk belajar giat, bekerja keras dan beban untuk memenuhi harapan yang bersifat profesional dan personal meningkatkan tekanan sosial. Kasus bunuh diri meningkat terutama pada orang-orang yang berusia lebih dari 65 tahun. Pada tahun 1987 lebih dari 3% kematian akibat bunuh diri sebanyak 23.831 jiwa (Mikiso, 1992:36). Di Jepang dikenal kelompok gangster yang disebut *yakuza* yang telah ada sejak zaman sebelum Meiji. Pada zaman modern *yakuza* terlibat dalam kegiatan perjudian, narkoba, prostitusi, dan pemerasan. Mereka membuat jaringan dengan kepentingan bisnis besar. Pada tahun 1990 dilaporkan, dari 3000 perusahaan besar di Jepang, 1900 tercatat di *Tokyo Stock Exchange*, diminta untuk membayar geng *yakuza*. Kebanyakan perusahaan memenuhinya

agar terhindar sebagai korban kebakaran, kecelakaan, sabotase atau gangguan pada rapat pemegang saham. Pada tahun 1990 diperkirakan terdapat 86.000 sampai 87.000 anggota geng yang tergabung dalam 2.800 kelompok geng. Sindikat terbesar adalah Yamaguchi-gumi yang berpusat di Kobe dengan 22.000 orang anggota.



Gambar 8.1 Geng Yakuza, Kenichi Shinoda (tengah) ketua sindikat kejahatan terbesar di Jepang, Yamaguchigumi, setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 2011.

Sumber: <http://edition.cnn.com/2015/09/15/asia/yakuza-yamaguchi-gumi-explainer/index.html>

Di bidang kebudayaan bermunculan sastra baru Jepang, antara lain Uno Chiyo, Enchi Fumiko, Hayashi Fumiko, Miyamoto Yuriko, dan Sata Ineko. Tema-tema yang diangkat misalnya konflik antara tradisional dan modern, eksistensialisme, nihilisme, pencarian identitas, dan konsep-konsep Buddha. Dalam budaya pop, pornografi dan buku-buku komik bermunculan. Foto-foto dan film pornografi menggambarkan sadisme yang berlebihan, pelecehan terhadap wanita secara brutal yang merefleksikan ketakutan akan ketidakmampuan dari kaum maskulin. Pada tahun 1983, 1,2 juta

buku komik diterbitkan. Pembacanya meliputi kelompok masyarakat yang sangat luas, dari pelajar kaum pengusaha hingga ibu-ibu rumah tangga yang ingin lari ke dunia fantasi (Mikiso, 1992: 402-406).

D. Kehidupan Sosial Budaya Korea

Perkembangan ekonomi dan pendidikan merupakan faktor yang paling berpengaruh bagi transformasi sosial. Transformasi sosial di Korea Selatan berjalan cepat setelah tahun 1953. Perkembangan pendidikan di Korea Selatan berjalan dengan cepat melalui perencanaan yang matang. Pemerintah Korsel melakukan usaha-usaha besar mengembangkan pendidikan sains dan teknologi. Tahun 1967 dibentuk Kementerian Sains dan Teknologi dan pada tahun 1971 didirikan Institut Sains dan Teknologi Korea.

Pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan, dan fasilitas-fasilitas industri di kota-kota besar dan sekitarnya menyebabkan urbanisasi meningkat. Munculnya industrialisasi mengubah struktur sosial masyarakat. Proses industrialisasi menimbulkan persaingan individu dalam pasar ekonomi. Liberalisme ekonomi di Korea Selatan memunculkan golongan konglomerat kaya hingga beberapa keturunan yang disebut kaum *chaebol*. Mereka memiliki status sosial yang tinggi dengan kekayaannya. Sementara kelompok masyarakat yang kalah dalam persaingan ekonomi menjadi kelompok masyarakat biasa (Darini, 2009: 33).

Perbaikan ekonomi di wilayah pedesaan memunculkan klas menengah sebagai klas sosial baru. Gaya hidup seperti dalam berpakaian maupun gaya arsitektur rumah juga mengalami perubahan. Namun perubahan sosial yang paling signifikan adalah runtuhnya sistem keluarga besar baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan munculnya sistem keluarga modern, kekerabatan

antara suami dan istri, orang tua dan anak, istri dan saudara iparnya juga mengalami perubahan.

Kedudukan perempuan di Korsel mengalami perubahan dengan adanya tuntutan persamaan hak-hak asasi dan sipil maupun persamaan sosial secara penuh. Terdapat persamaan di depan hukum bagi semua orang. Semakin banyak perempuan berpendidikan tinggi dan menempuh karier sebagai hakim, pengacara, ahli fisika, seniman, penulis, politikus, pendidik, teknisi, dan sebagainya. Konsep perempuan sebagai pengasuh anak dan pengurus rumah tangga melemah dengan cepat.

Pemerintah mengadakan program-program kesejahteraan bagi anak-anak dan lanjut usia antara lain dengan membangun panti jompo dan sanatorium yang dilengkapi dengan fasilitas khusus. Pencapaian Korsel di bidang olahraga adalah terpilihnya Korea Selatan sebagai penyelenggara Olimpiade Dunia ke-24 di Seoul dengan fasilitas olahraga super modern pada tahun 1988.

Bidang jurnalisme di Korea bangkit kembali setelah adanya kebijakan liberalisasi kebudayaan pada tahun 1988. Integritas jurnalisme di Korsel semakin kuat. Di bidang penyiaran berdasarkan aturan pemerintah pada tahun 1980 sistem radio televisi *Korean Broadcasting System* (KBS) mengambil alih sistem pemancar utama milik swasta. Pusat Kesenian Seoul didedikasikan bagi pengembangan kebudayaan asli dan kebudayaan luar. Beberapa perkumpulan kebudayaan swasta seperti Yayasan Seni dan Kebudayaan Korea, Taman Budaya Hoam, dan Teater Seni Boneka Rakyat memberi kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan kebudayaan tradisional dan Barat secara besar-besaran.

Beberapa aspek penting dalam bidang perfilman tahun 1980-an adalah munculnya kelompok pembuat film muda *avant-garde* yang menekankan sisi gelap masyarakat Korea, masyarakat pinggiran, penindasan, dan tidak adanya kemanusiaan serta

tantangan feminisme. Karya sastra didominasi tema kekejaman manusia atas manusia lain. Penyair menulis sajak-sajak berisi protes yang mengkampanyekan keadilan sosial dan demokrasi.

Arsitektur modern dengan hasil-hasil baru karya sastra, lukisan, pahatan, seni keramik, dan bangunan-bangunan dengan desain spektakuler mengubah wajah wilayah urban di Korea Selatan. Taman-taman budaya, katedral, gereja-gereja, sekolah, stadium, dan bangunan-bangunan perdagangan yang didesain dan dibangun sedemikian rupa yang menghasilkan arsitektur universal di Korea Selatan.

Industri pariwisata dan hiburan juga menjadi sektor perekonomian yang penting bagi Korea. Korea juga memberikan pengaruh budaya yang cukup besar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Dalam dunia hiburan Korea Selatan dikenal melalui fenomena budaya yang disebut dengan Hallyu (*Korean Wave*). Gelombang budaya Korea ini diwakili oleh industri hiburan yang dikenal dengan sebutan K-Drama, K-Pop, dan film-film Korea yang sangat dipengaruhi oleh warisan arsitektur, kultur, identitas tempat, kuliner, dan politik pemerintahan. Hal tersebut memberikan citra positif bagi pariwisata di Korea Selatan, dan pada umumnya memicu negara yang terkena gelombang budaya untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan Korea. K-Drama mulai diputar di China dan kemudian menyebar ke negara-negara lain seperti Hongkong, Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Timur Tengah. *Korean Wave* merupakan bentuk *soft power* terhadap dunia internasional yang memberikan pengaruh positif terhadap citra Korea Selatan baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi.

Kesuksesan Korea Selatan dalam pembangunan ekonomi berdampak pada tingkat kesehatan di Korea Selatan. Angka harapan hidup laki-laki naik dari 51 tahun dan perempuan 54 tahun pada

1960 menjadi 77 tahun dan 83,8 tahun pada tahun 2009. Di bidang pendidikan Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan angka melek huruf atau kemampuan baca tertinggi di dunia. Pendidikan juga menjadi dasar pertumbuhan ekonomi yang cepat selama empat dekade terakhir karena telah melahirkan angkatan kerja berpendidikan.

Berbeda dengan masyarakat Korea Selatan yang menikmati kebebasan, komunisme mengontrol seluruh aspek kehidupan masyarakat Korea Utara secara ketat dengan gaya hidup spartan. Cara hidup masyarakat terefleksikan dalam slogan-slogan seperti kesederhanaan, keseragaman, dan kesesuaian.

Konstitusi negara mengisyaratkan kehidupan masyarakat tanpa kelas tetapi elit-elit baru yaitu kelas yang memiliki hak istimewa seperti pejabat partai tingkat tinggi tetap muncul. Informasi dan hak istimewa dijatah menurut kedudukan kelas masing-masing individu dan kekuasaan. Sejak tahun 1958 pemerintah Korea Utara membagi kelas masyarakat menjadi tiga kelas fundamental yaitu kelas inti, kelas tidak stabil, dan kelas musuh. Kelas inti merupakan elit pemerintahan yang memiliki kekuatan dan hak istimewa untuk menikmati kemewahan. Sebagian besar bermukim di Pyongyang dan memiliki akses layanan teknologi tinggi, layanan kesehatan, rumah mewah, sekolah, restoran mewah, dan rumah mode. Mereka diizinkan memiliki telepon pribadi, membaca publikasi asing, memiliki radio siaran asing, dan boleh bepergian ke luar negeri. Kelas tidak stabil merupakan warga mayoritas, pada umumnya adalah spesialis, pekerja biasa, petani, perawat, dan guru. Mereka bergaji rendah dan tinggal di daerah, serta tidak diizinkan melakukan perjalanan ke Pyongyang tanpa izin khusus. Kelas ketiga atau kelas musuh terdiri dari orang-orang yang diklasifikasikan memiliki latar belakang menentang pemerintah dan memiliki kecenderungan tidak setia pada pemerintah. Mereka antara lain birokrat Korea Utara yang

bekerja sama dengan pemerintah Jepang di masa lalu, keturunan para pemimpin agama, dan keluarga dari orang-orang yang melarikan diri ke Korea Selatan. Mereka adalah orang-orang hukuman dengan jenis pekerjaan yang berat dan berbahaya, diperkirakan berjumlah 4 juta orang (The Institute for South-North Korea Studies, 1992: 30-41).

Kebudayaan sosialis dikelola dan diawasi partai. Tujuannya menjadikan semua bentuk seni dan sastra yang merefleksikan realisme sosialis atau kesetiaan partisan. Kehidupan kesenian di Korea Utara berhubungan dengan kegiatan-kegiatan revolusioner Kim Il-sung, pejuang pengikutnya, kader partai, dan pasukan tentara rakyat. Partai menekankan penghapusan pemikiran-pemikiran dan kebudayaan kuno. Pada tahun 1959, Partai menerbitkan risalah yang isinya menyatakan bahwa agama adalah batu sandungan utama yang menghambat revolusi sosialis dan merupakan alat yang digunakan oleh kaum imperialis untuk mengeksploitasi para pekerja (Paolo, 2007:16). Agama dianggap sebagai musuh ilmu pengetahuan dan kemajuan sehingga partai melarang semua agama yang ada. Para alim ulama dan pendeta dipaksa bergabung dengan para pekerja. Sekitar 2000 gereja dan 400 kuil dihancurkan, dan hanya sebagian kuil Buddha bersejarah yang dipelihara. Sekitar 50.000 umat Katolik, 30.000 umat Protestan, dan jutaan umat Buddha tidak mempunyai tempat untuk kegiatan keagamaan. Baru setelah tahun 1984 pemerintah Korea Utara membiarkan rakyatnya mengadakan pertemuan keagamaan, namun demikian terdapat larangan untuk memasukkan orang ke dalam agama baru (Nahm, 1993: 275).

Beberapa elit penguasa memiliki akses informasi lebih dari yang lain. Informasi semakin lebih cepat didapat oleh pejabat dengan peringkat tinggi. Media massa dan komunikasi massa dikontrol secara ketat dan diatur oleh partai. Informasi dibangun

dalam sistem sosialis yaitu bahwa semua informasi dikontrol dan fungsi media massa bukan untuk menyebarkan berita dan informasi kepada publik melainkan untuk penyebaran pendidikan, indoktrinasi dan propaganda peraturan, serta kebijakan dan program partai.

Di Korea Utara tidak ada kebebasan berbicara, berserikat, beragama, publikasi, tempat tinggal, perjalanan, atau pun profesi bagi rakyat. Rakyat biasa tidak boleh bepergian ke luar negeri. Kunjungan orang asing ke Korea Utara dibatasi dan baru setelah tahun 1980 lebih banyak lagi orang asing yang diijinkan memasuki Korea Utara meskipun hanya diijinkan melakukan perjalanan di lokasi-lokasi tertentu. Otoritas patriarkal dalam keluarga dihapuskan dan semua anak diajarkan untuk menganggap Kim Il-Sung sebagai ayah masyarakat. Semua anak yang berusia 3 bulan sampai 5 tahun di asuh di panti asuhan dan TK yang dikelola pemerintah berdasarkan UU tahun 1976. Anak-anak diindoktrinasi dengan ideologi *juche* agar setia pada Kim Il-Sung dan menjadi seorang sosialis.

Semua sekolah di Korea Utara tidak memungut biaya. Pada 1989 tingkat melek huruf rakyat meningkat lebih dari 90%. Pendidikan di Korut bersifat wajib untuk masa sebelas tahun pertama. Sistem sekolah dan pengajaran dibentuk menurut tujuan dan filsafatnya. Setelah menyelesaikan pendidikan sebagian besar perempuan bekerja di pertanian atau pabrik-pabrik lokal dan laki-laki melakukan wajib militer. Pejabat militer yang memutuskan seseorang bisa melanjutkan pendidikan atau bekerja. Anak-anak pejabat militer dibebaskan dari dinas militer untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Universitas Kim Il-Sung merupakan lembaga pendidikan tinggi nasional. Beberapa universitas maupun sekolah tinggi teknik lain didirikan di seluruh negeri. Hanya lulusan

sekolah menengah terseleksi yang berhak memasuki institusi pendidikan tertinggi ini.

Di Korea Utara, kegiatan ilmiah, sastra, dan seni budaya harus membantu mewujudkan karya kreatif “realisme sosialis” komunis dan berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan sebuah revolusi ideologi serta revolusi kebudayaan yang berpegang pada prinsip-prinsip revolusi semangat partai, semangat kelas, dan semangat individu. Intinya, semua karya ilmiah, sastra, dan seni merupakan bagian dari partai dan pemerintah. Penulis dan pekerja seni digaji oleh partai dan pemerintah sehingga mereka harus selalu patuh pada perintah partai dan pemerintah. Semua kegiatan tadi dikendalikan oleh partai dan pemerintah, dan dianggap sebagai sarana yang kuat dalam melaksanakan revolusi ideologi komunis (*The Institute for Peace Affair*, 1991: 23).

Semua sistem penyiaran radio dan televisi dioperasikan oleh negara dan frekuensi penyiaran diawasi dengan ketat oleh partai. Sistem penyiaran TV dan radio asing tidak diijinkan untuk dilihat dan didengar. Film-film asing tidak disiarkan kecuali film-film dari Uni Soviet dan China. Kesenian bersifat revolusioner yang memuliakan dan memuji Kim Il Sung. Kesusasteraan dan kesenian merupakan senjata utama revolusi untuk memengaruhi rakyat dengan pandangan revolusioner dan ideologi komunis. Sekitar 300 lagu di Korea Utara 80% nya memuja Kim Il Sung. Sastra dan lukisan tradisional diganti dengan yang membangkitkan semangat revolusioner dan kesadaran sosialis, sehingga semua lukisan, novel, dan cerita-cerita dari Korea Utara berhubungan dengan kegiatan revolusioner Kim Il Sung, pejuang pengikutnya, kader partai, dan pasukan tentara rakyat sebelum dan selama Perang Korea.

Korea Utara sangat tertinggal jauh dari Korea Selatan dalam perkembangan kesenian modern. Namun sejak masa pemerintahan Kim Jong Un telah banyak dilakukan perubahan dalam kebudayaan.

Kim Jong Un lebih terbuka dibanding rezim pendahulunya. Kim terlihat mengunjungi berbagai pameran, melakukan orasi di depan umum, dan menonton konser rock di akhir pekan. Kim juga memberikan kebebasan lebih banyak pada kaum perempuan, termasuk untuk mengenakan rok mini. Sejak awal tahun 2012, Kim Jong Un telah membentuk band baru bernama *Moranbong* yang terdiri atas beberapa gadis muda dan cantik yang dipilihnya sendiri, seperti *girl band-girl band* yang banyak berkembang di Korea Selatan. Namun lagu-lagu yang dibawakannya termasuk anti-mainstream karena cenderung berupa lagu patriotik dan sosialis, dan selalu menyanyikan lagu kebangsaan Partai Buruh (Sindonews.com, 23 Juli 2015, 14:01). Mereka selalu tampil dalam acara peluncuran misil Korea Utara, dengan lagu-lagu antara lain “Song of Hwasong Rocket”, “Make Others Envy Us”, dan “Toast to the Victors”. Penontonnya antara lain tentara, insinyur misil, dan Kim Jong Un sendiri.



Gambar 8.2 Band Moranbong

Sumber: <https://qz.com/1026276/north-koreas-girl-group-moranbong-band-helped-celebrate-hwasong-14-icbm-missile-launch/>

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zaenurrofik, *China Naga Raksasa Asia: Rahasia Sukses China Menguasai Dunia*, Jogjakarta: Garasi, 2008.

Bagus Darmawan, *Cermin dari China: Geliat Sang Naga di Era Globalisasi*, Jakarta: Kompas, 2006.

Bonavia, David, *Cina dan Masyarakatnya*, terj. Dede Oetomo, Jakarta: Erlangga, 1990.

BBC World, "Bagaimana Korut Danai Senjata Nuklir? Ini 7 Hal yang Harus Anda Tahu", *detiknews.com*, Rabu 6 September 2017, 09:31.

Chang, Jung, *Angsa-Angsa Liar: Tiga Puteri Cina*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Chang, Jung, Halliday, John, *Mao: Kisah-Kisah Yang Tak Diketahui*, terj. Martha Wijaya dan Widya Kirana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Chung, Young Chul, "North Korean Reform and Opening: Dual Strategy and 'Silli (Practical) Socialism'", *Pacific Affairs*, Vol. 77, No. 2 (Summer, 2004), hlm. 283-304.

David, M.D., *History of Modern Japan, Bombay*: Himalaya Publishing House, 1979.

Dwicipta, "Belajar dari Siasat Deng dan Soekarno", Kompas, Selasa 3 Mei 2011, hlm. 12.

Dumbaugh, Kerry B., dan Richard E Grimmett, "Arms Sales to China: the Limits to US-China Cooperation", Washington Quartely 9, no.3 (Summer 1986): 88-89, dalam Rizal Sukma, Pemikiran Strategis China dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping, Jakarta: CSIS, 1995.

Economic Stabilization Board, A Comprehensive Report on the War Damage of Japan Caused by Pacific War, 1949.

Freddy Roeroe, "Belajar dari China, Bukalah Pintu di Bibir Pasifik", Kompas, (Rabu, 9 Maret 2005), hlm. 31.

Hane, Mikiso, Modern Japan: A Historical Survey, USA: Westview Press, 1992.

Hilmy Mochtar, "Strategi Pembangunan Kawasan Periferal: Pengalaman Korea Selatan dan Filipina", Prisma, No. 8, Agustus 1996.

James Luhulima, "Militer China Kekuatan Pengimbang di Asia Pasifik", Kompas, 28 Januari 2006, hlm. 59.

Jepang Dewasa Ini, Wakaba: International Society for Educational Information, 1989.

Ji Guoxing and Hadi Soesastro (ed.), Sino-Indonesian Relations in Post-Cold War Era, Jakarta: CSIS, 1992.

leoa56fkipuns.wordpress.com/2010/10/23/15/

Mcdonald, George, *Travellers: Beijing dan China Utara*, Jakarta: Elex Media, 2013.

Meisner, Maurice, *Mao's China and After: A History of the People's Republic*, New York: the Free Press, 1999.

Mittler, Rana, *China Modern Menguasai Dunia*, terj. Freddy Mutiara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Muhaimin, "Mengenal Moranbong: Girl Band Korea Utara Corong Kim Jong-un", *Sindonews.com*, 23 Juli 2015, 14:01.

Nahm, Andrew C., *Introduction to Korean History and Culture*, New Jersey: Hollym International Corp., 1993.

Nurani Soyomukti, *Revolusi Tibet: Fakta, Intrik, dan Politik Kepentingan Tibet - China - Amerika Serikat*, Yogyakarta: Garasi, 2008.

Poltak Partogi Nainggolan, *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiao Ping*, Jakarta: Palapa, 2014.

Pye, Lucian W., *China: An Introduction*, Canada: Little, Brown and Company, 1984.

Ririn Darini, "Sejarah Korea Pasca 1945", *Diktat tidak diterbitkan*: UNY, 2009.

_____, "Park Chung Hee dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan", *Jurnal Mozaik*, Vol V No. 1, Januari 2010.

_____, *Garis Besar Sejarah China Era Mao*, Diktat tidak diterbitkan, UNY, 2010.

Rizal Sukma, *Pemikiran Strategis China: dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping*, Jakarta: CSIS, 1995.

Rizal Sukma, "Arah Politik Luar Negeri RRC Pasca Tian'anmen: Perkiraan Dekade 1990-an", *Analisis CSIS Tahun XIX*, No. 4 Juli-Agustus, 1999.

Sayidiman Suryohadiprojo, *Belajar dari Jepang: Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup*, Jakarta: UI Press, 1987

Sukisman, W.D., *Sejarah Cina Kontemporer: Dari Revolusi Nasional Melalui Revolusi Kebudayaan Sampai Modernisasi Sosialis*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Sylvietanaga, "Xinjiang dan Masalah Klasik china", <https://sylvietanaga.com/2009/07/25/xinjiang-dan-masalah-klasik-china/>

Tanzil, H.O.K., *Catatan Perjalanan Awal 1987 Republik Rakyat Cina, Republik Rakyat Demokrasi Korea dan Republik Rakyat Mongolia*, Bandung: Alumni, 1988.

Taufik Adi Susilo, *China Connection*, Jogjakarta: Garasi, 2008.

The Institute for Peace Affairs, Human Rights in North Korea, Seoul:
The Institute For Peace Affairs, 1991.

The Institute for South-North Korea Studies, The Human Rights
Situation in North Korea, Seoul: The Korea Herald Inc., 1992.

Townsend, James R., "Sistem Politik China", dalam Mohtar Mas'ued
dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik,
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.

Vina A. Maulina, "Mengintip Gaya Hidup Mewah Kaum Elit Korea
Utara", Liputan 6.com, 10 Mei 2017, 20:25.

Wang, James F., Contemporary Chinese Politics: An Introduction,
1992.

Walter S., Jones, Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan
Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Wibowo, Ignatius, Negara dan Masyarakat: Berkaca dari
Pengalaman Republik Rakyat Cina, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2000.

_____, Mao dan Reformasi Praksis, Jakarta: Pusat Studi Cina, 2000.

_____, Belajar dari Cina: Bagaimana Cina Merebut Peluang dalam
Era Globalisasi, Jakarta: Kompas, 2004.

Yayan Mochamad Yani, "Makna Pengembangan Kekuatan Militer Cina", <http://www.mimbar-opini.com/mod=publisher&-op=viewarticle&artid=2459>, diakses 3 Oktober 2013

TENTANG PENULIS

Ririn Darini lahir di Yogyakarta 18 November 1974. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada pada 1998, kemudian menyelesaikan pendidikan S-2 di Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada pada 2004. Sejak tahun 1999 menjadi staf pengajar pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Beberapa karyanya antara lain Panduan Pembelajaran untuk Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah pada tahun 2005, Buku Sejarah SMA/MA Peminatan Ilmu-ilmu Sosial 2013, dan Buku Sejarah Kebudayaan Indonesia Masa Hindu Buddha yang diterbitkan penerbit Ombak pada 2013. Untuk berkorespondensi dapat menghubungi ririn_darini@uny.ac.id.